



# PETA PROSES BISNIS

---

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

Jl. Jend. A. Yani No. 01 Paringin Telp. (0526) 28060 Fax. (0526) 28408

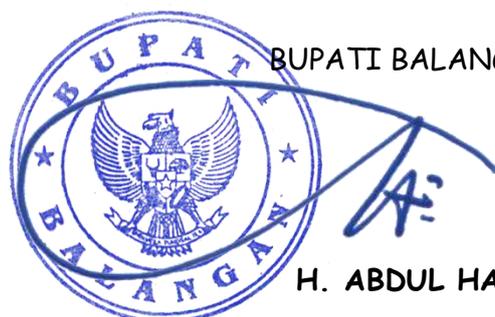
## Kata Pengantar

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Balangan dapat menyusun dan menyelesaikan Peta Proses Bisnis Kabupaten. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Dr. Ngalimun, S.Sos,M.M dan Juanhandy, SH selaku narasumber dan evaluator dari Kementrian PANRB Republik Indonesia atas bimbingan, waktu dan tenaga selama pelaksanaan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan serta ucapan terimakasih disampaikan pula kepada Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan atas usaha dan kerjasamanya.

Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/848/Kum Tahun 2021 tanggal 17 September 2021. Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan menggambarkan tata hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, maka dengan disusunnya Peta Proses Bisnis Kabupaten Balangan diharapkan kinerja organisasi dimasa mendatang akan lebih terencana dan sistematis sesuai dengan fungsi dan tujuan tiap unit organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset penting bagi organisasi yang memuat informasi ke dalam satu kesatuan dokumen organisasi, sehingga penyusunannya melibatkan seluruh elemen organisasi. Keterlibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis berfungsi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan. Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Dengan demikian, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.





BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ **848** /Kum TAHUN 2021  
TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Balangan, yang selanjutnya disebut Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar organisasi pada Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri dari tingkatan sebagai berikut:  
a. peta prosès;  
b. peta sub proses;  
c. peta lintas fungsi bisnis; dan  
d. peta relasi.
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis sebagaimana dalam diktum KETIGA huruf a memuat seluruh sasaran pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Balangan, yang terdiri dari:  
a. proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama dan memenuhi kriteria sebagai berikut:  
1. berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal;

2. berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
  3. memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- b. proses pendukung merupakan proses yang menghasilkan keluaran untuk mendukung pelaksanaan proses utama.

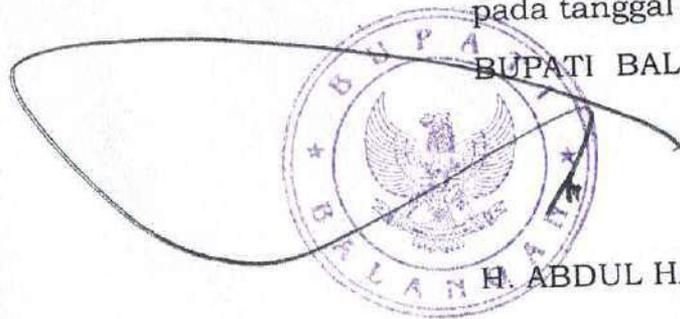
KELIMA : Peta Sub proses sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b memuat seluruh proses bisnis yang mengacu pada program dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Balangan.

KEENAM : Peta Lintas Fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf c memuat rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/848/Kum TAHUN 2021  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2021  
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## VISI KABUPATEN BALANGAN

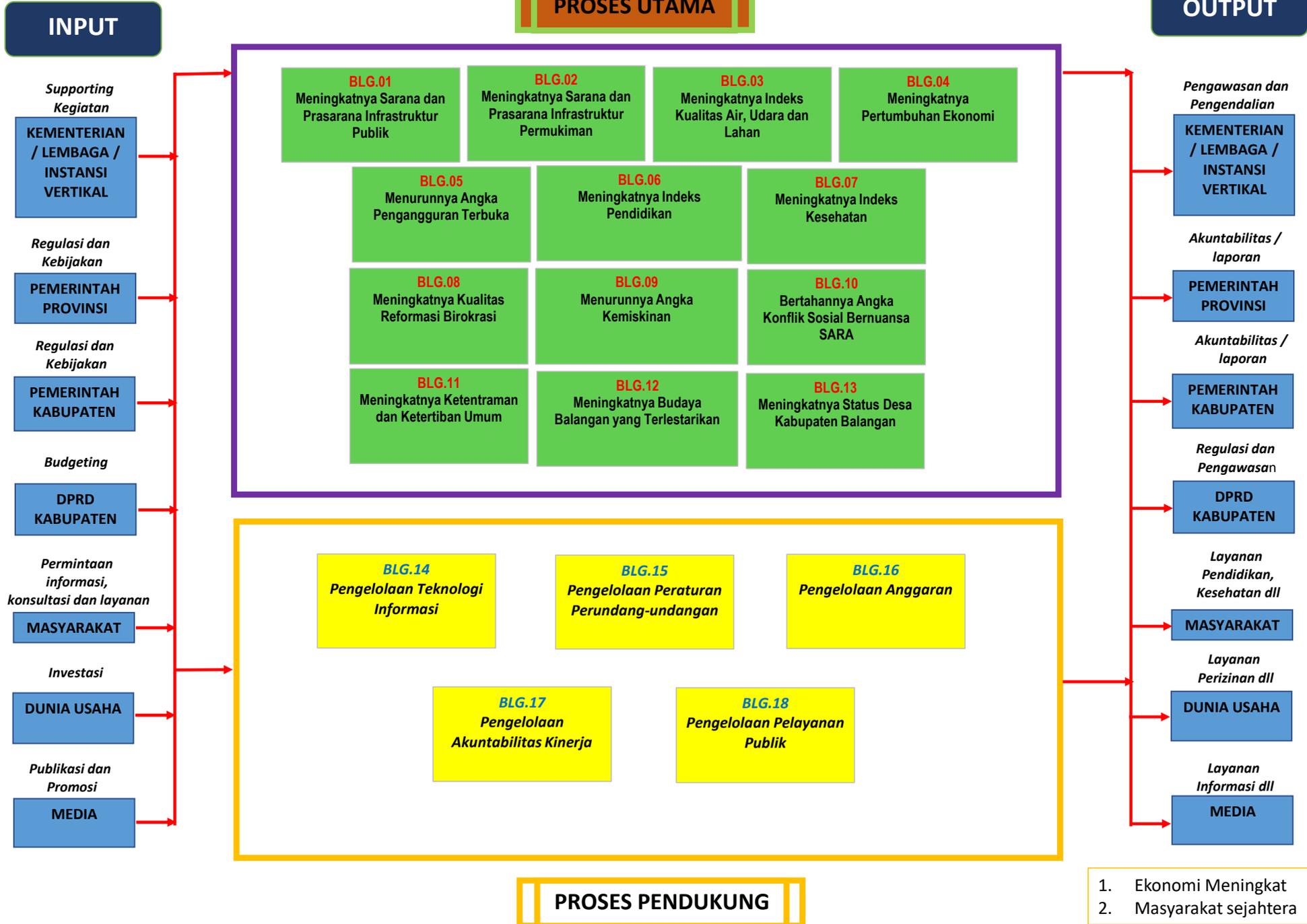
" **MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA** "

"

## MISI KABUPATEN BALANGAN



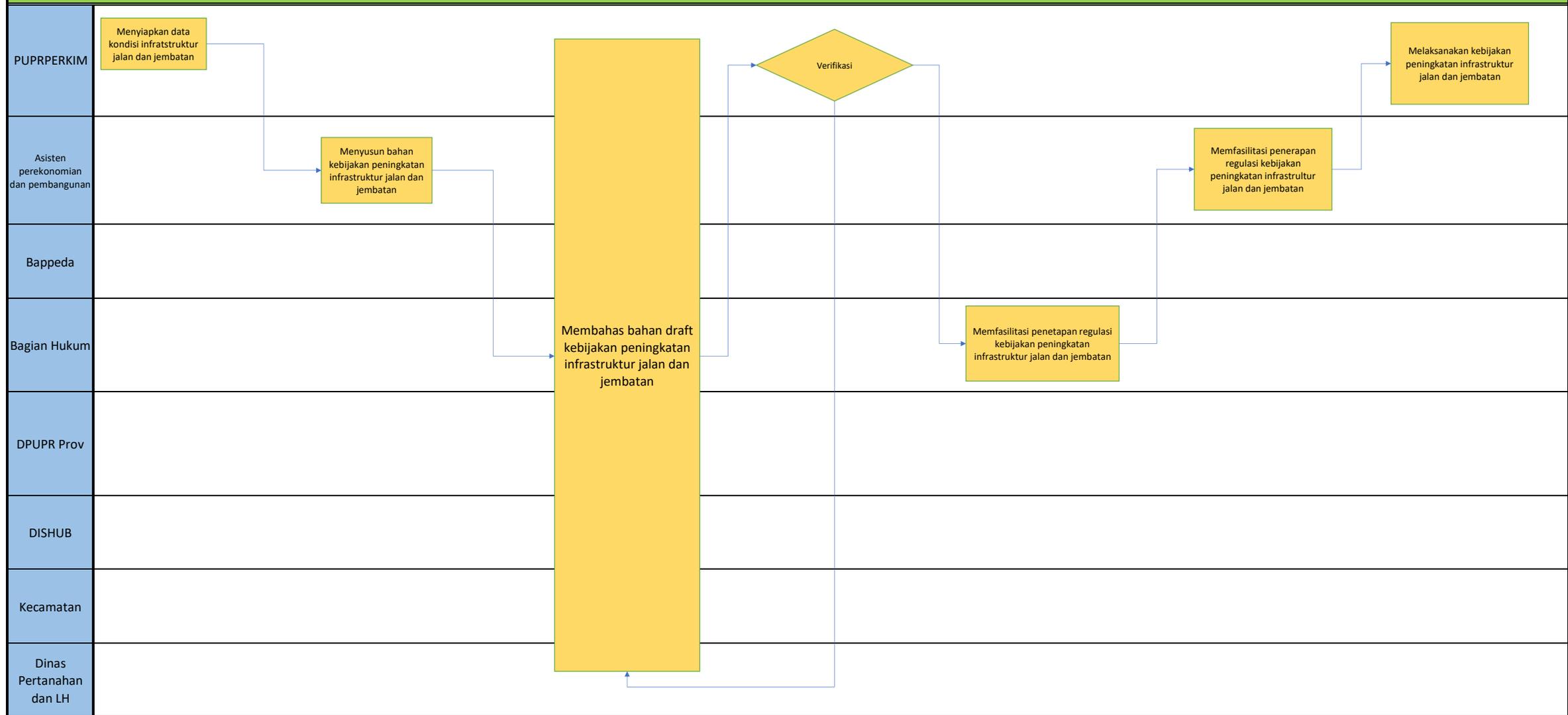
# PETA PROSES BISNIS KABUPATEN BALANGAN



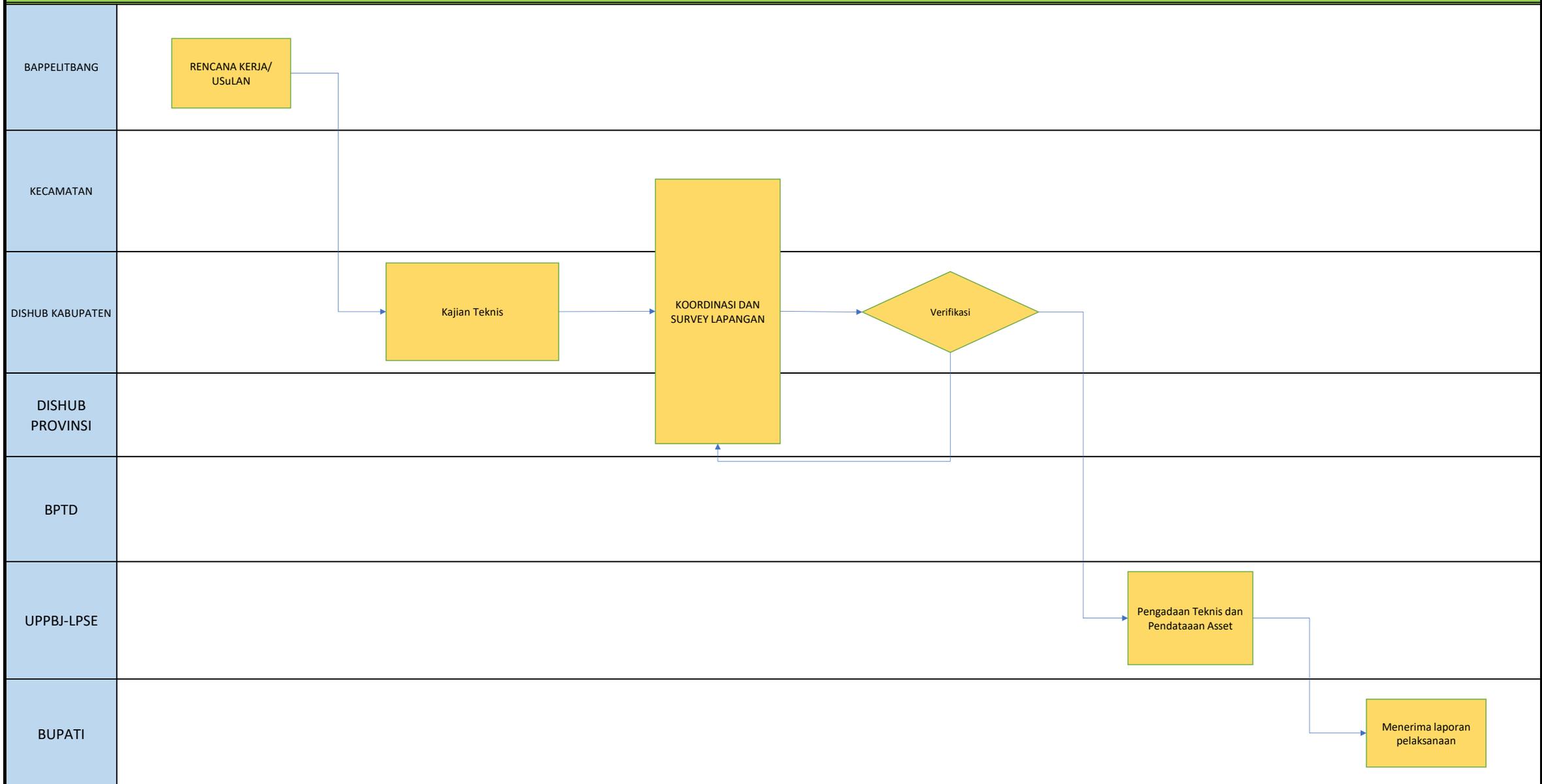
# PETA SUB PROSES



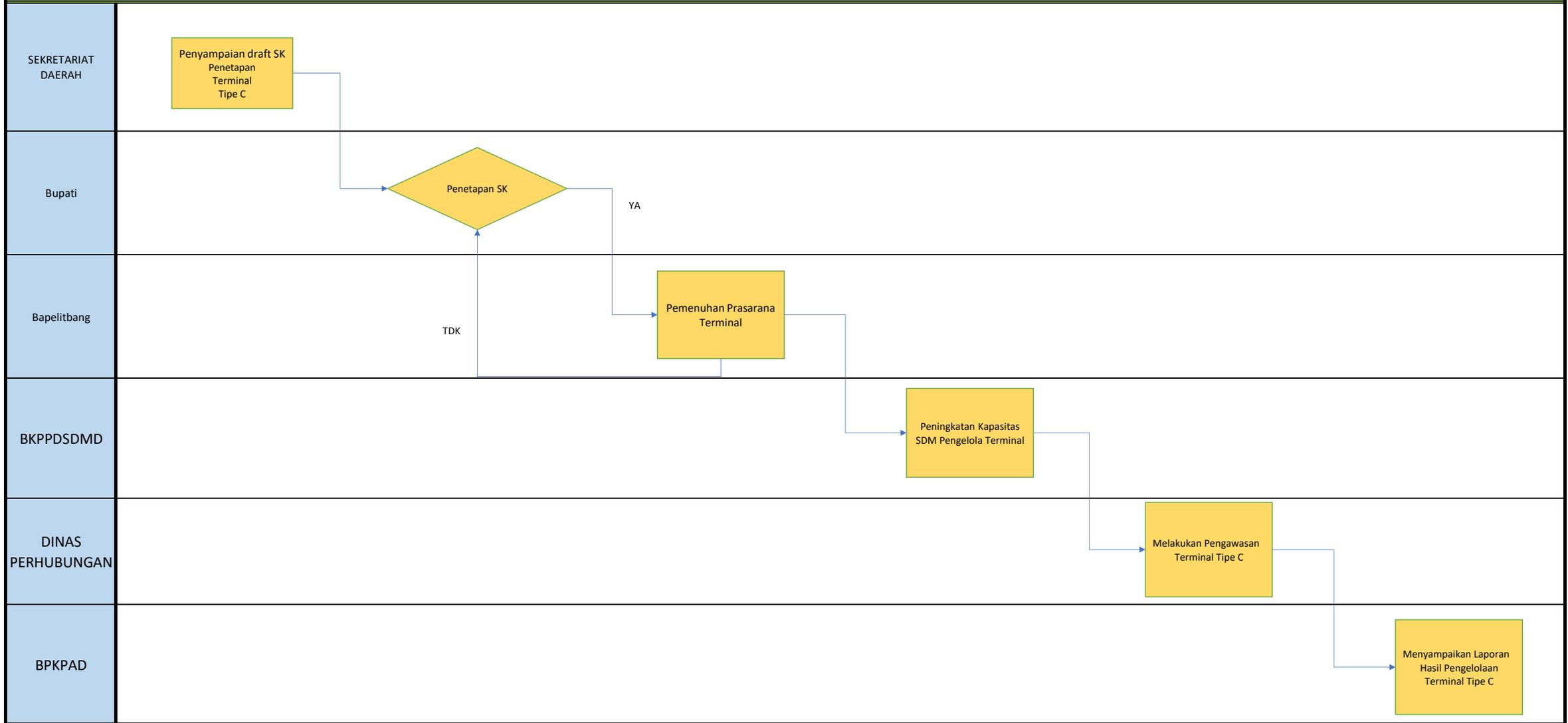
**BLG.01.01.CFM.01 Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kab / Kota**



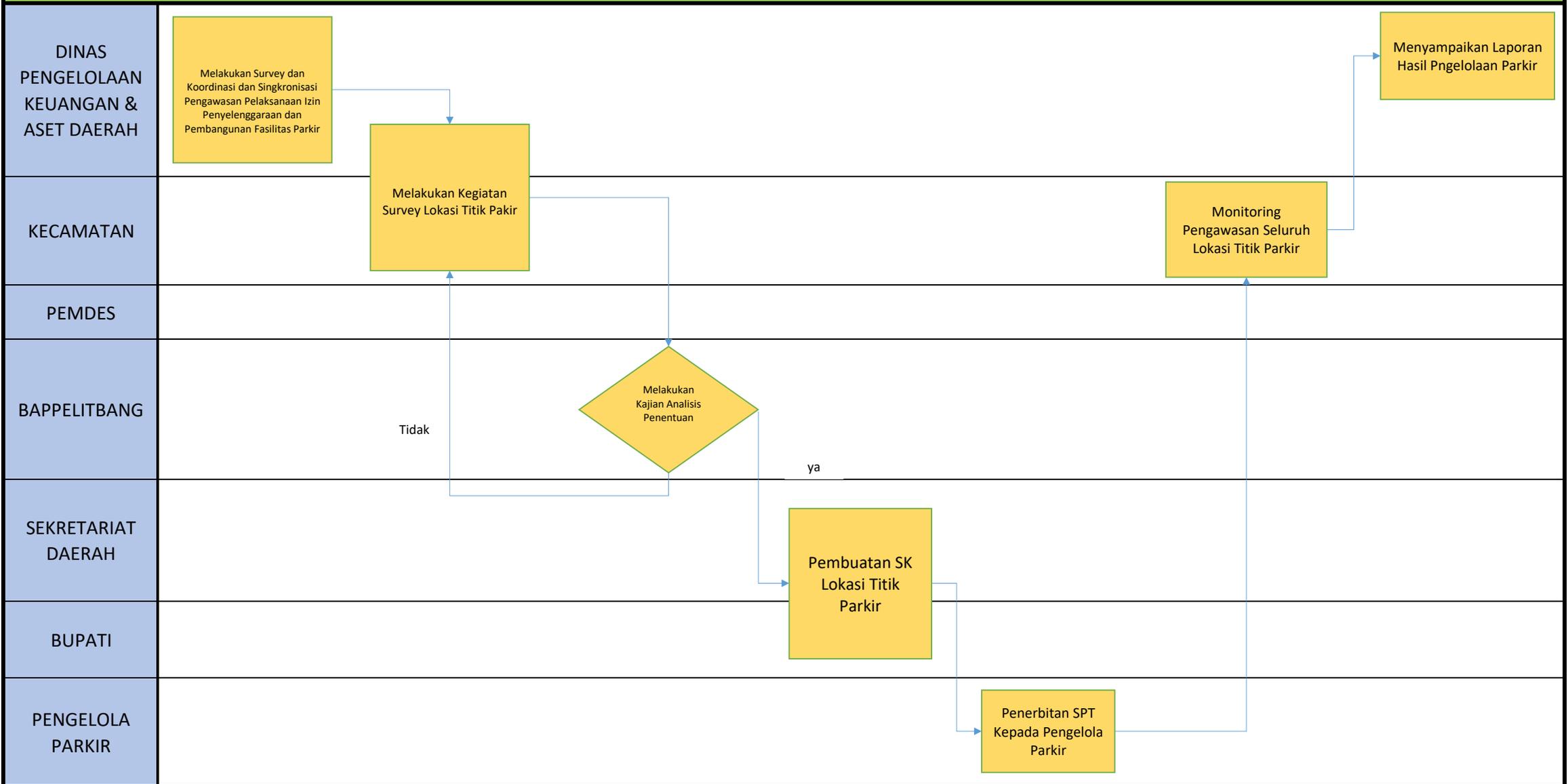
**BLG.01.02.CFM.01 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten / kota**



**BLG.01.02.CFM.02 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**



**DISHUB.01.02.CFM.03 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**



## BLG.01.02.CFM.04 Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas  
Perhubungan

Menerima dan memeriksa  
berkas pengajuan  
pengujian berkala  
kendaraan bermotor

Memeriksa  
secara visual  
teknis dan laik  
jalan dan  
validasi berkas

YA

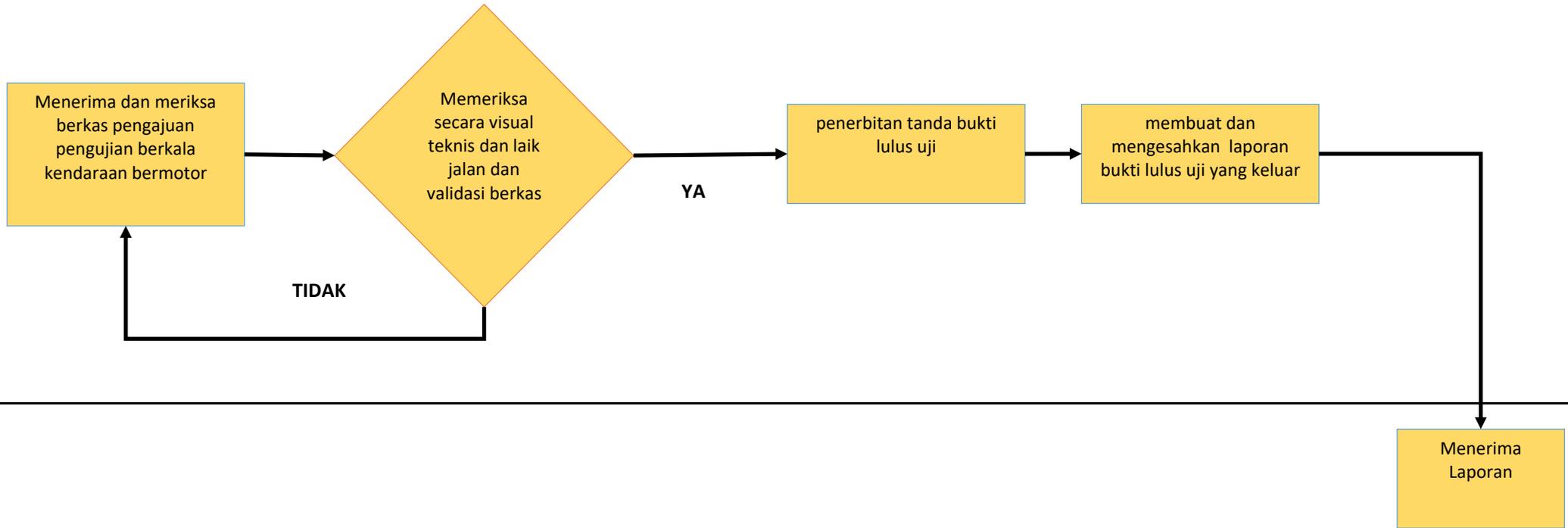
penerbitan tanda bukti  
lulus uji

membuat dan  
mengesahkan laporan  
bukti lulus uji yang keluar

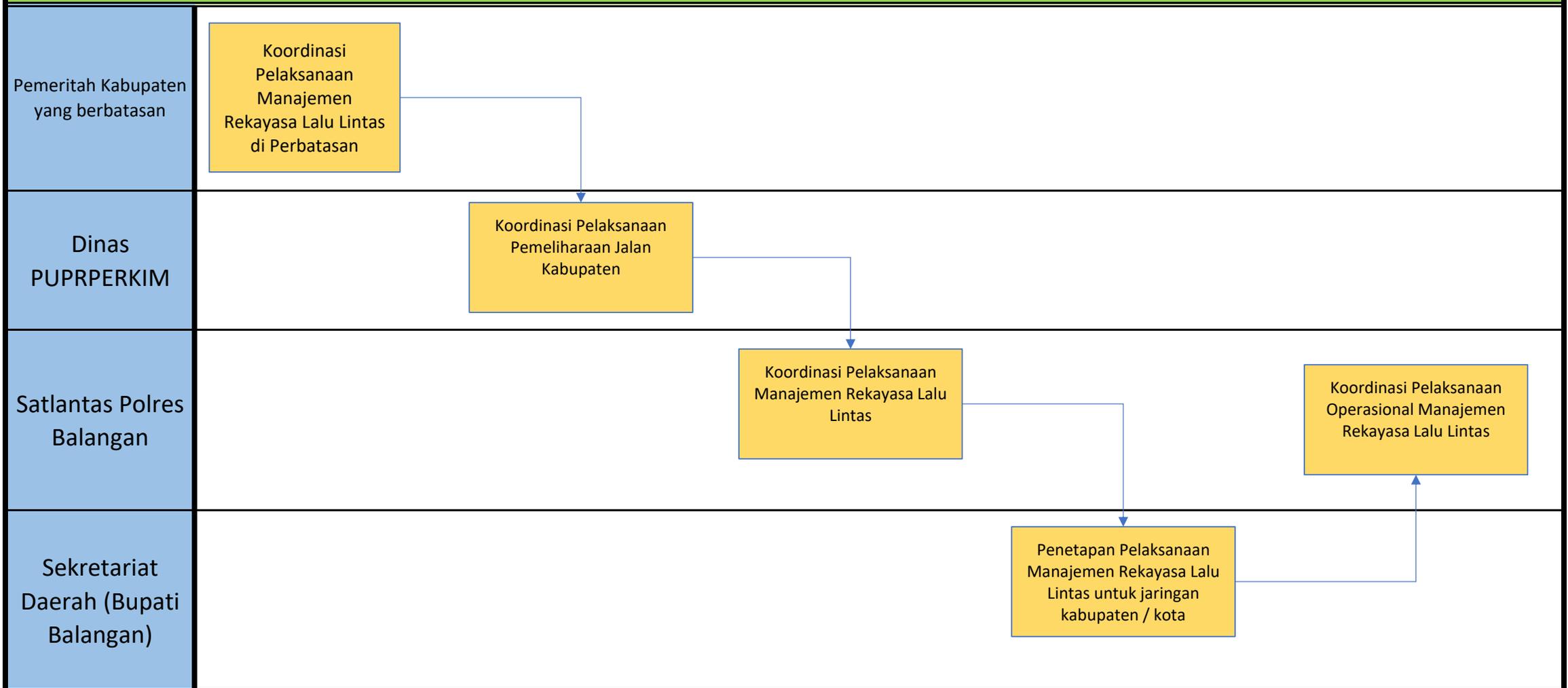
TIDAK

BPTD  
WILL.XV

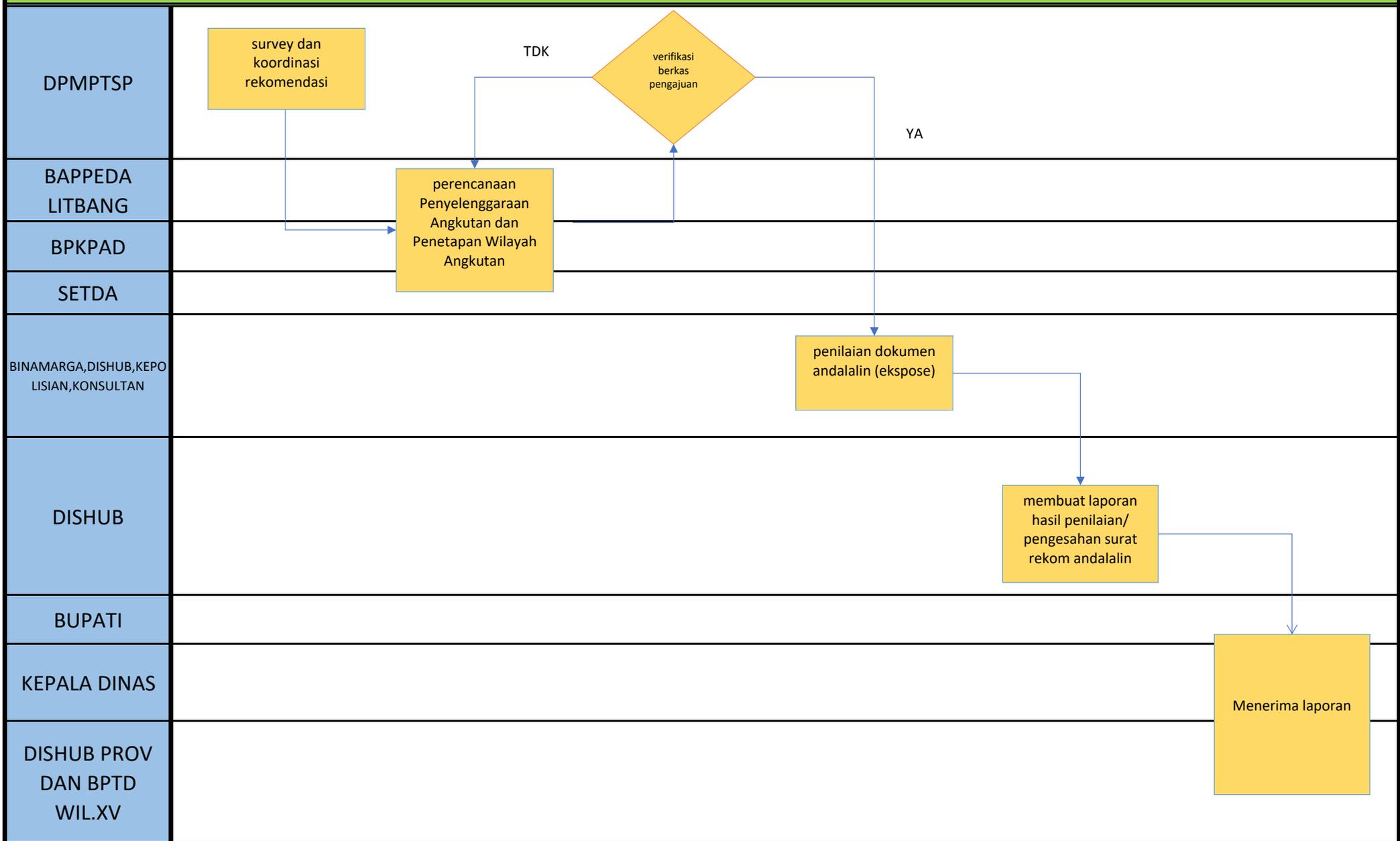
Menerima  
Laporan



**DISHUB.01.02.CFM.05 Pelaksanaan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota**

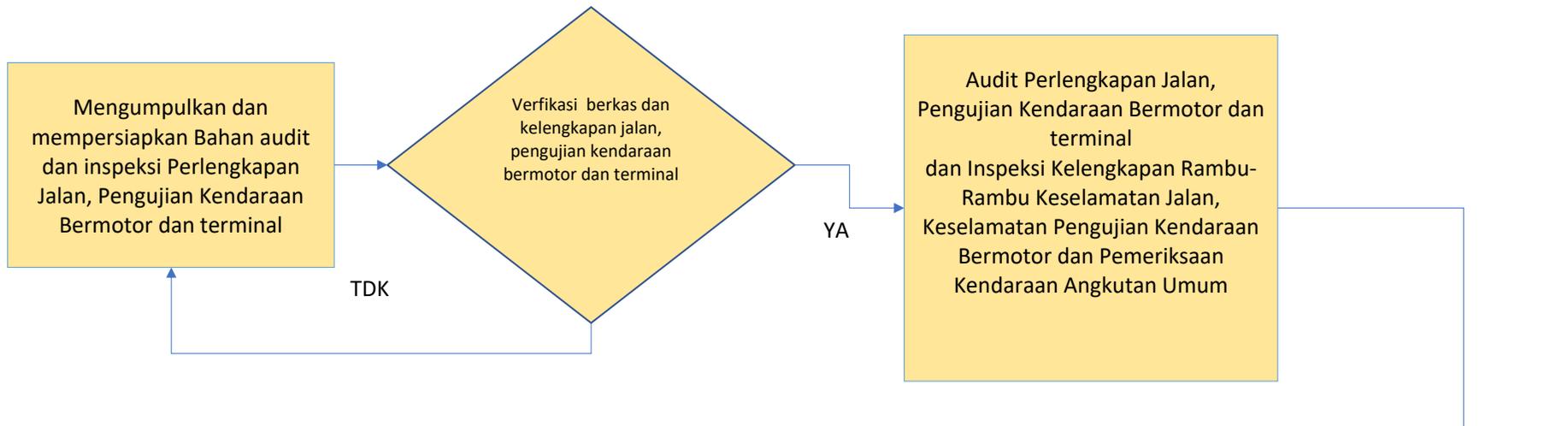


**BLG.01.02.CFM.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**



**DISHUB.01.02.CFM.07 Audit & Inspeksi Kendaraan Bermotor**

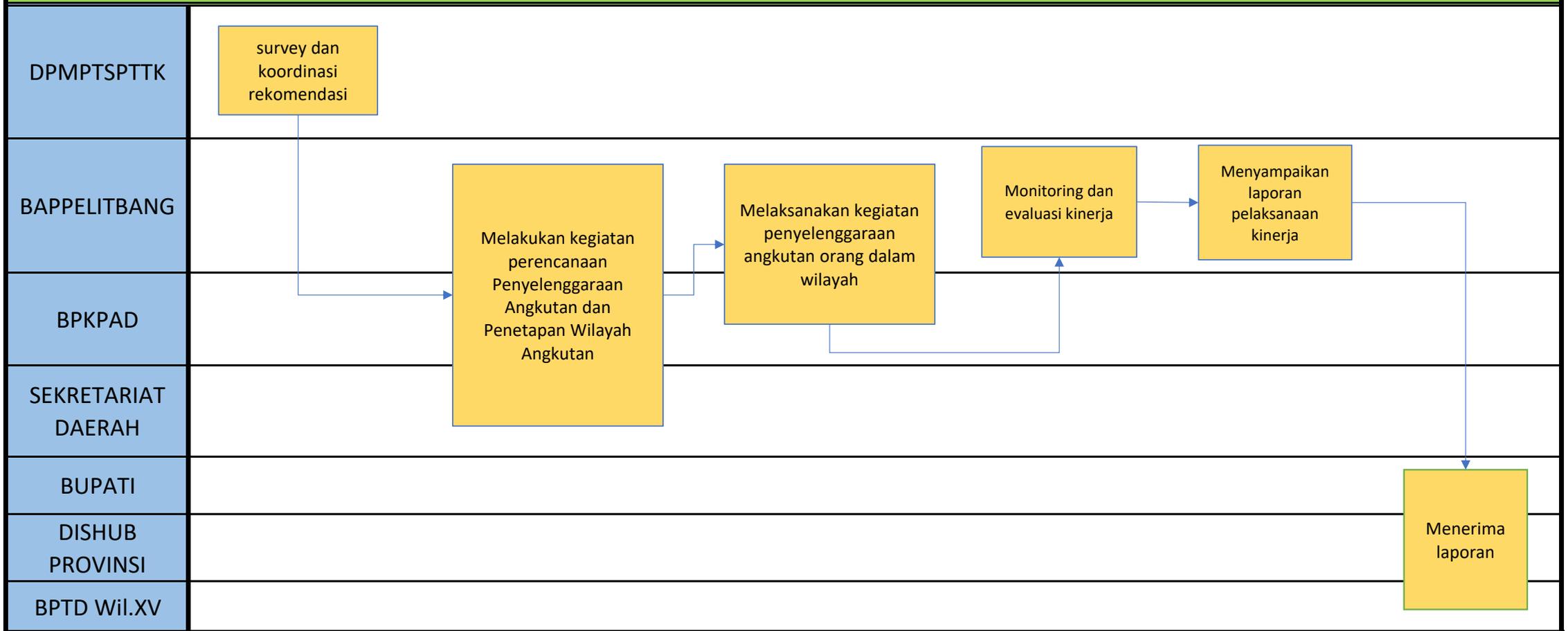
Dishub



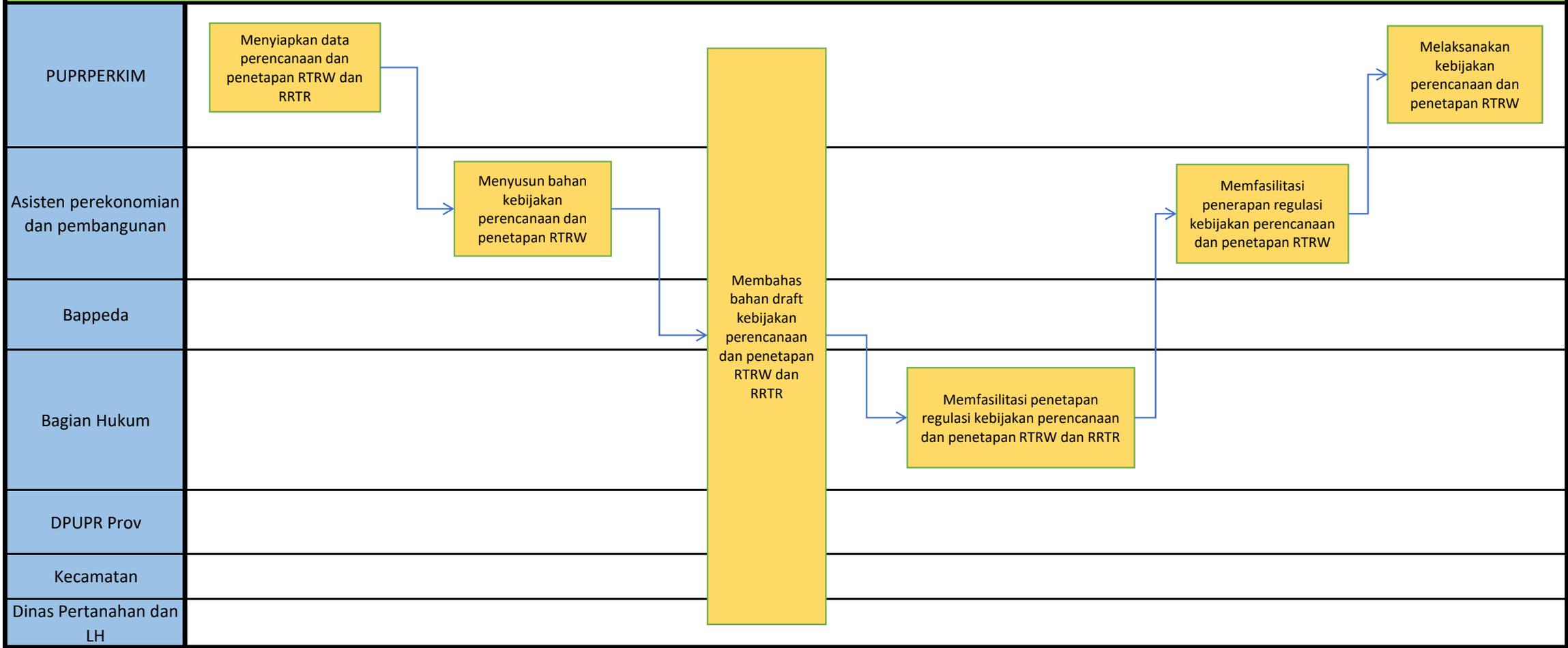
BPTD WIL XV

Pengamatan & Pemantauan

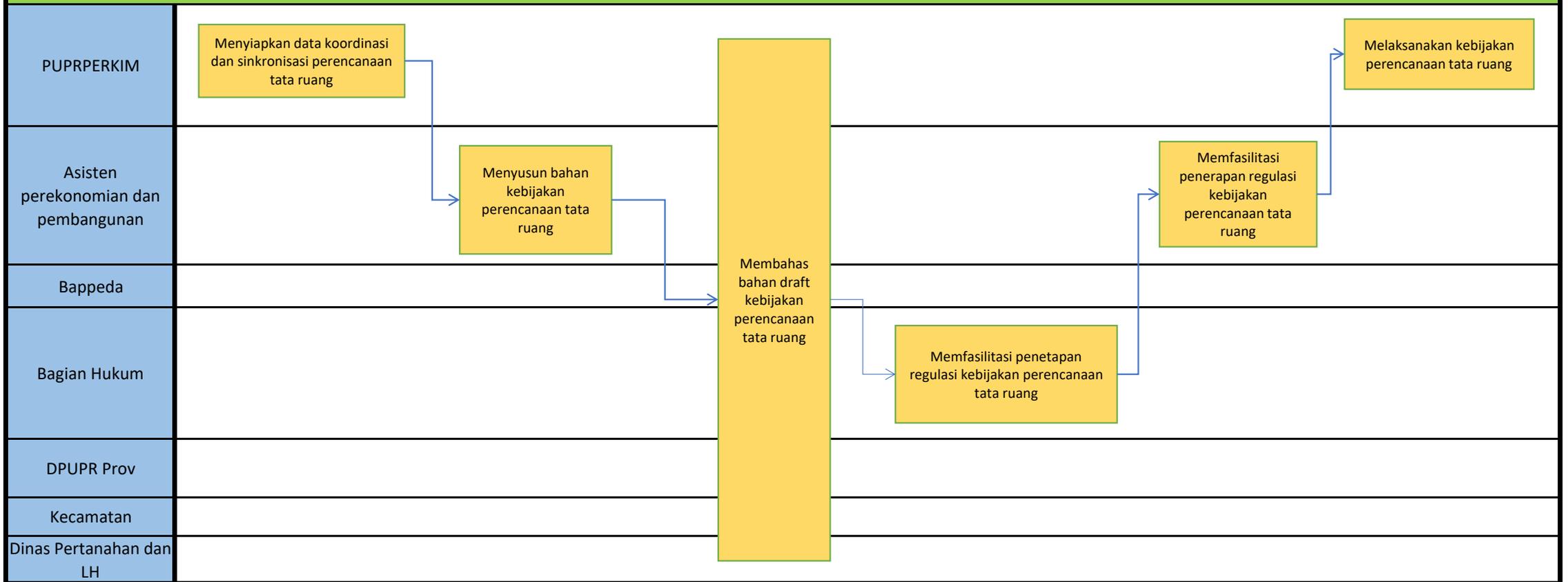
**BLG.01.02.CFM.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**



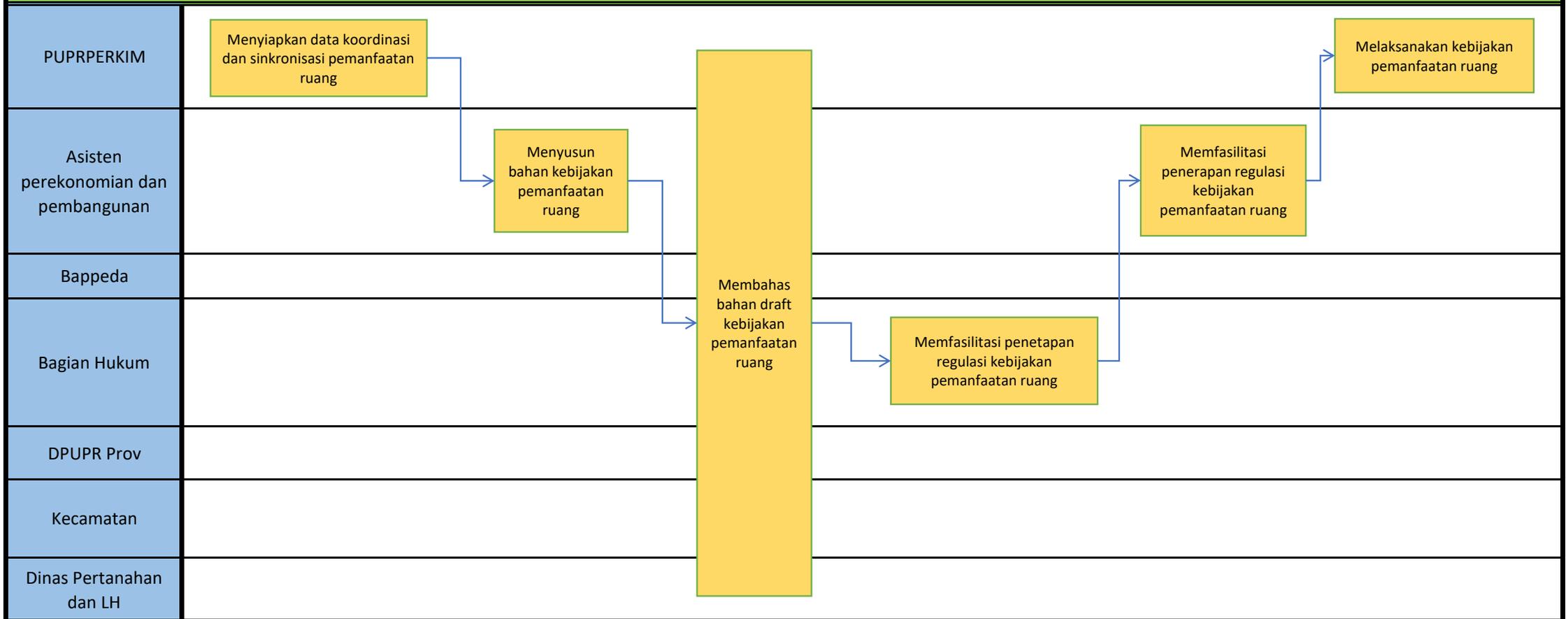
**BLG.01.03.CFM.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**



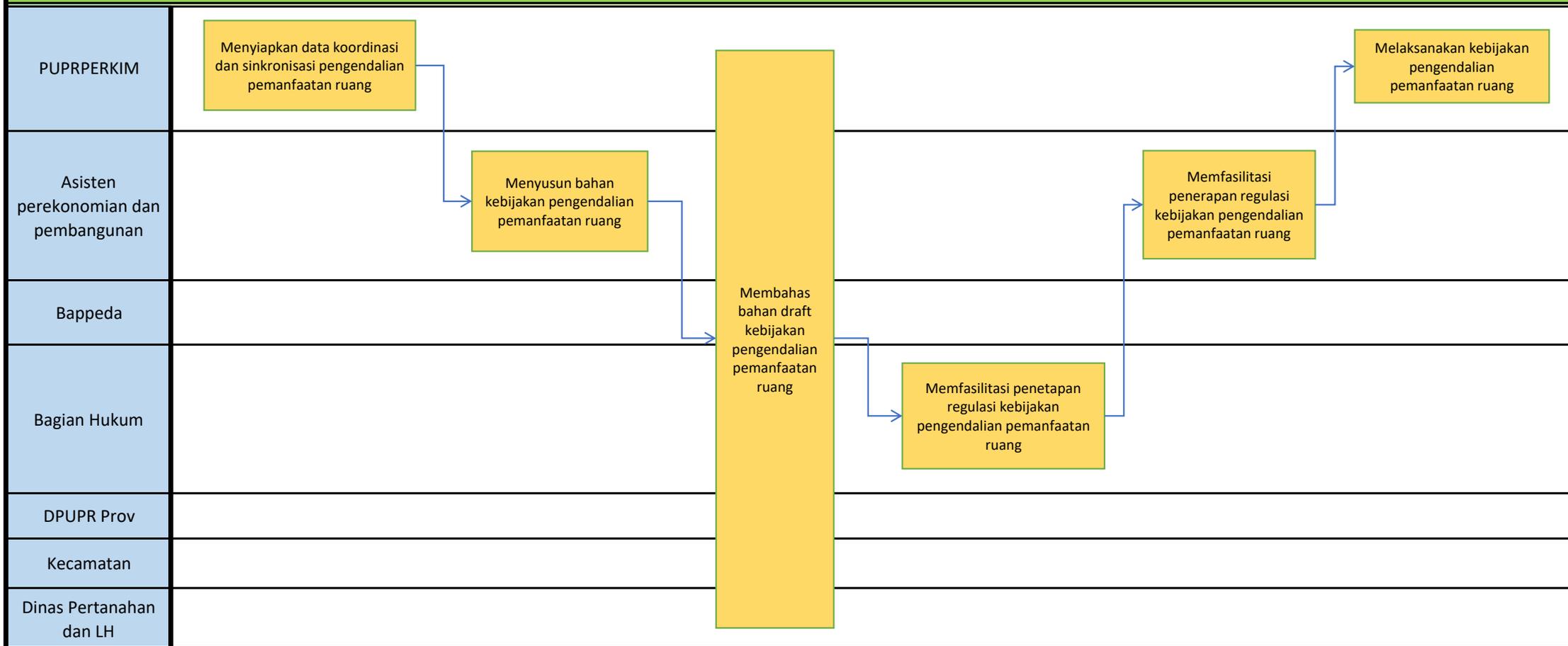
**BLG.01.03.CFM.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**



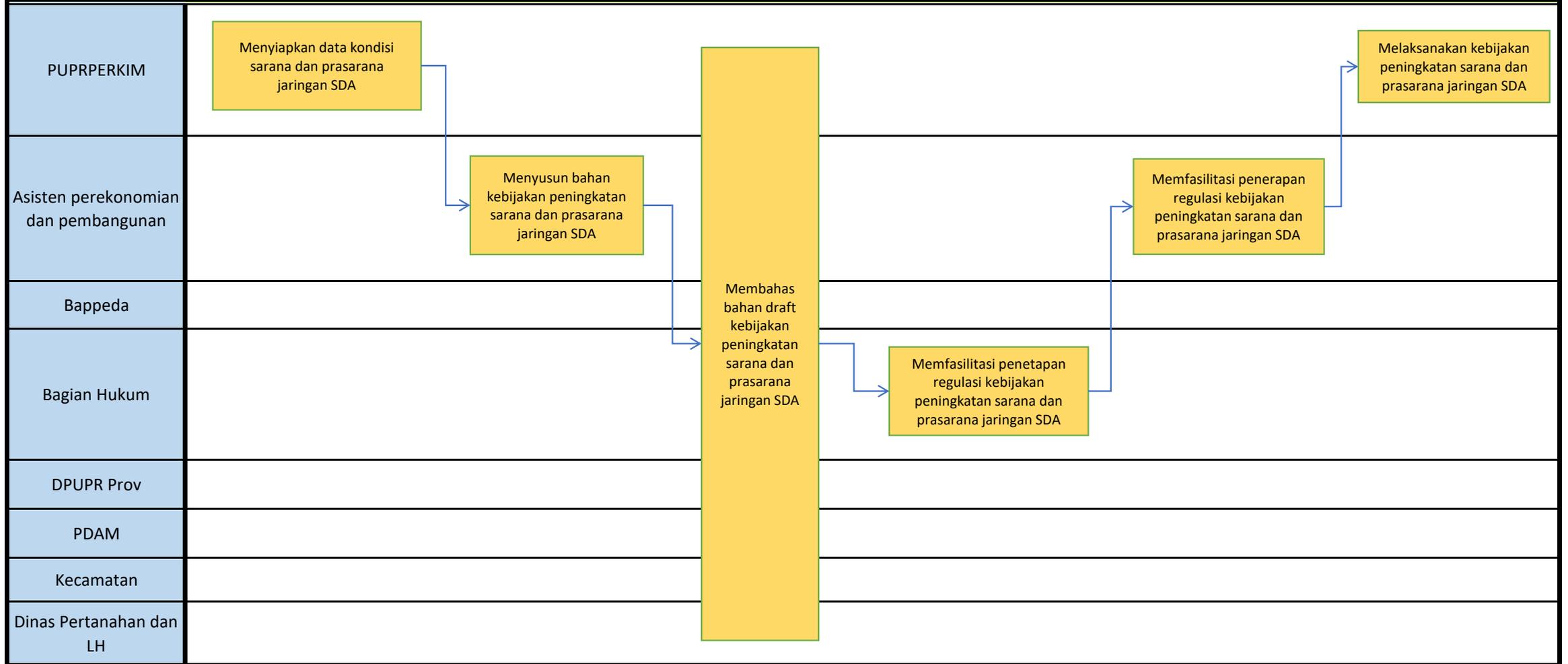
**BLG.01.03.CFM.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**



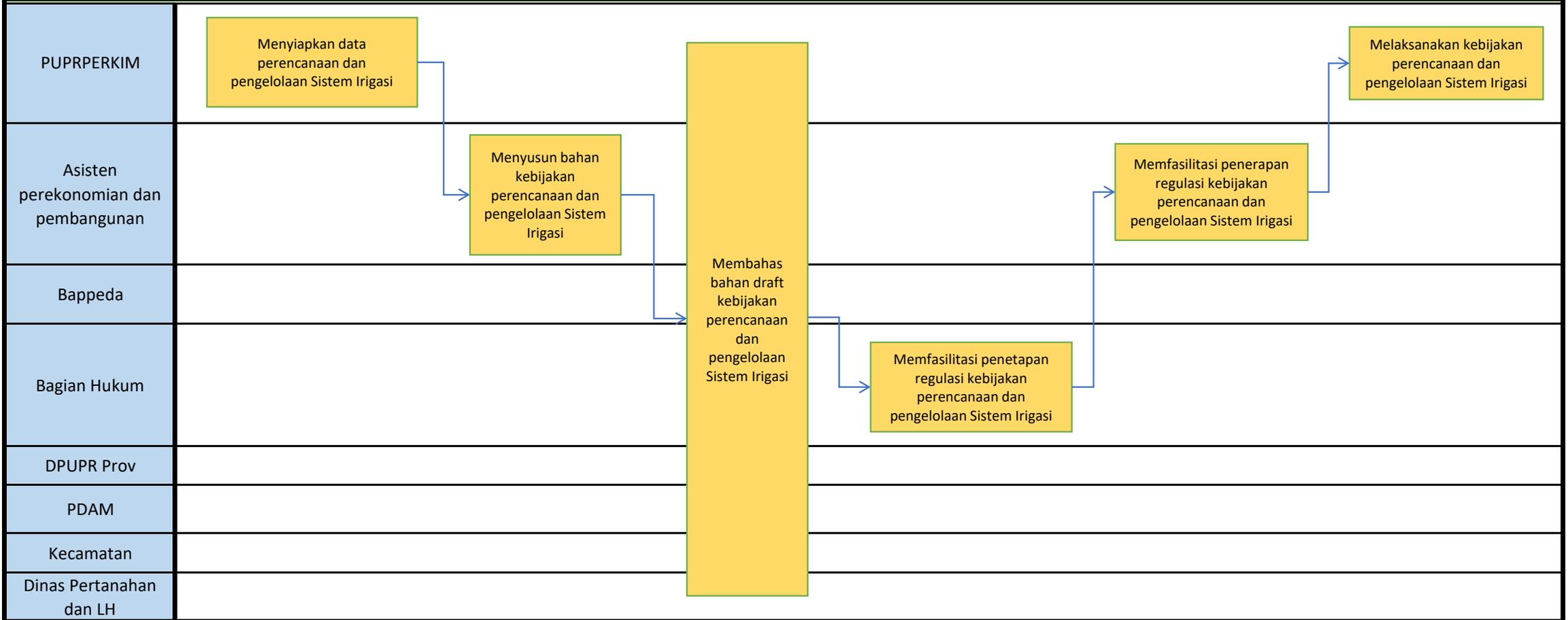
**BLG.01.03.CFM.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**



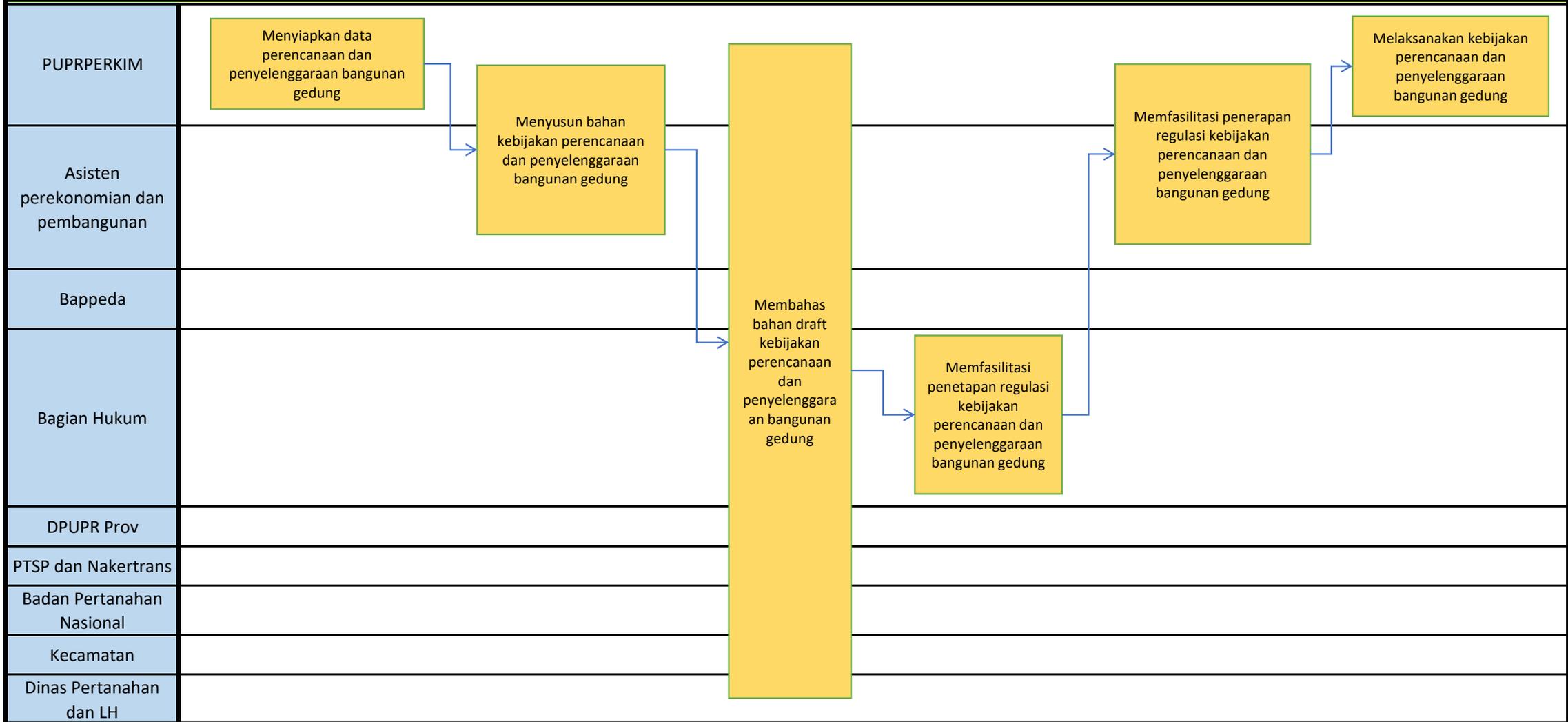
**BLG.01.04.CFM.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**



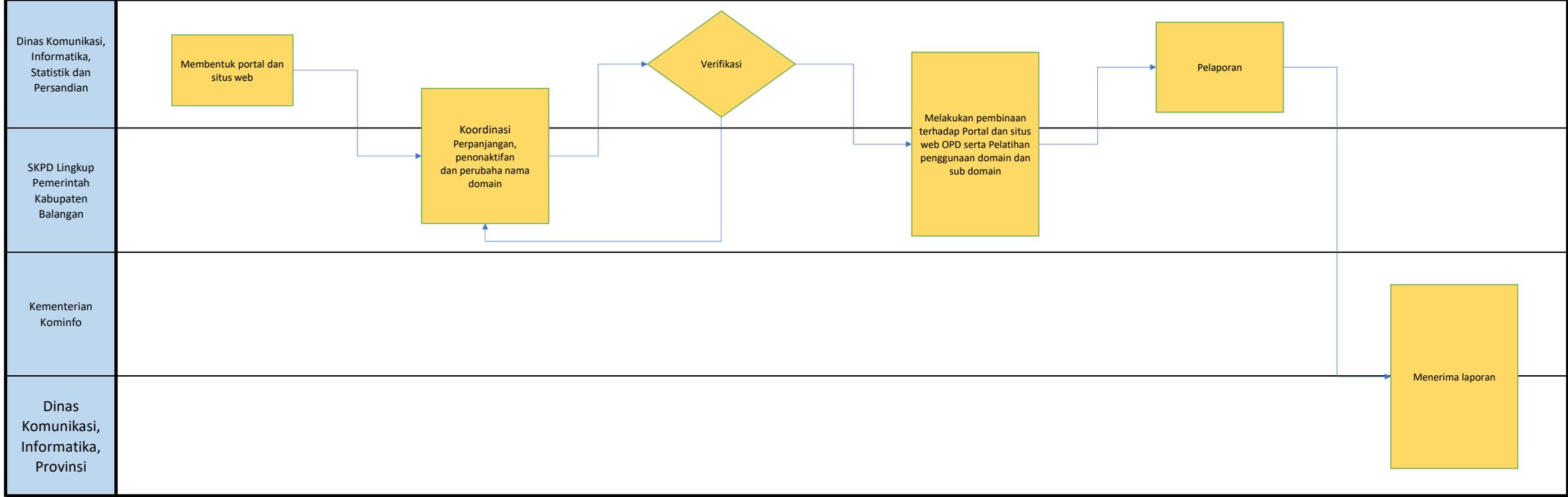
**BLG.01.04.CFM.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**



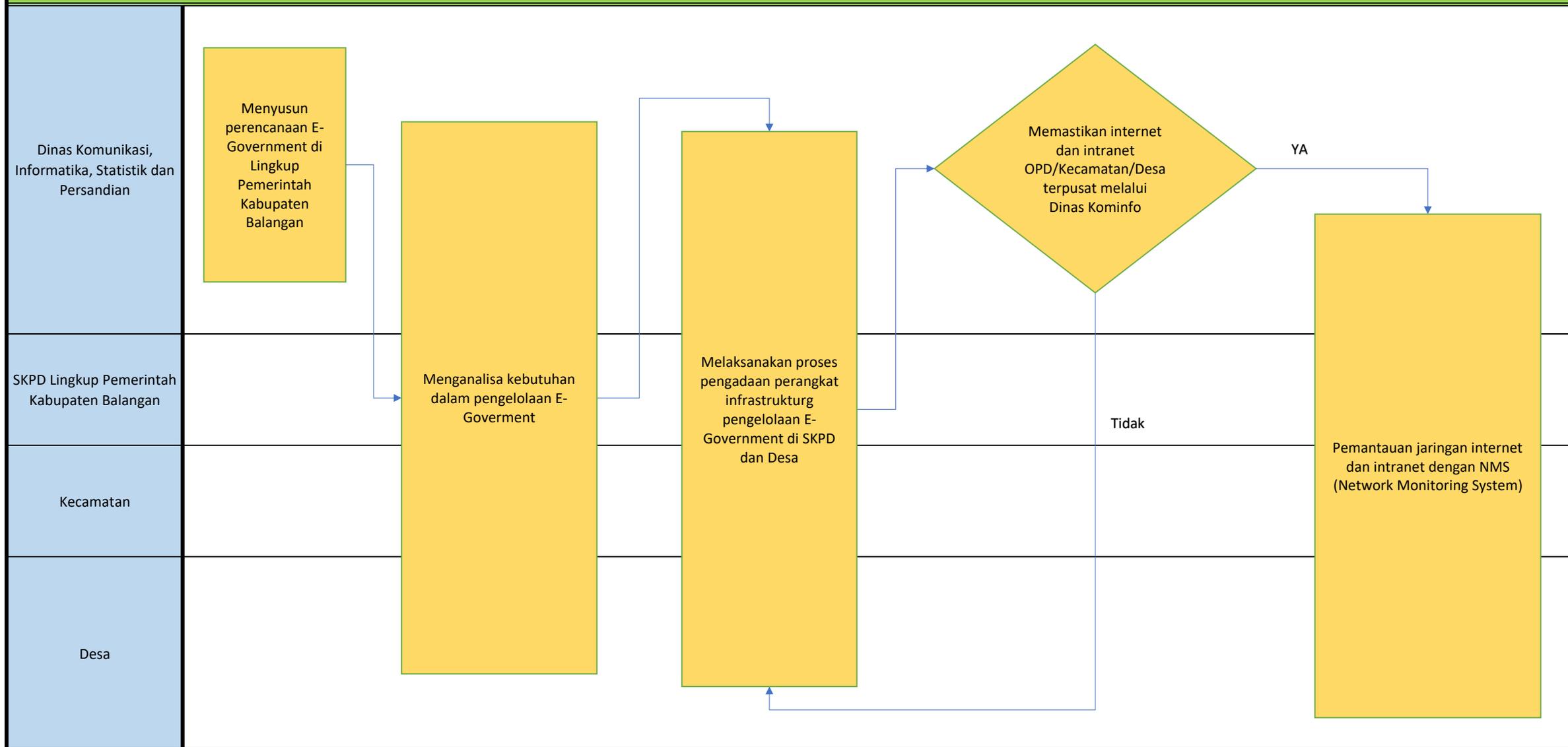
**BLG.01.05.CFM.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**



**BLG.01.06.CFM.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**



**BLG.01.07.CFM.02 Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**



## PETA RELASI BLG-01 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Penyelenggaraan Jalan

- 1) PUPRPERKIM
- 2) Asisten perekonomian dan pembangunan Setda
- 3) Pemerintah Kecamatan
- 4) UPPBJ-LPSE

### 02. Peningkatan Penyelenggaraan lalu lintas

- 1) Dishub
- 2) Bappedalitbang
- 2) Pemerintah Kecamatan
- 3) UPPBJ-LPSE
- 4) Bag. Hukum Setda
- 5) BKPSDM
- 6) BPKPAD
- 7) BPTD Wil XV
- 8) Unit PKB
- 9) Pemerintah Kabupaten yang berbatasan
- 10) Satlantas Polres Balangan
- 11) DPMPTSP

### 03. Peningkatan Penataan Ruang

- 1) PUPRPERKIM
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- 3) Bappedalitbang
- 4) Bag. Hukum Setda
- 5) Pemerintah Kecamatan
- 6) Dinas LH & Pertanahan

### 04. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- 1) PUPRPERKIM
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- 3) Bappedalitbang
- 4) Bag. Hukum Setda
- 5) PDAM
- 6) Pemerintah Kecamatan
- 7) Dinas LH & Pertanahan

### 05. Peningkatan Penataan Bangunan Gedung

- 1) PUPRPERKIM
- 2) Asisten perekonomian dan pembangunan Setda
- 3) Bappedalitbang
- 4) Bag. Hukum Setda
- 5) DPMPTSP
- 6) Pemerintah Kecamatan
- 7) Dinas LH & Pertanahan
- 8) Badan Pertanahan Nasional

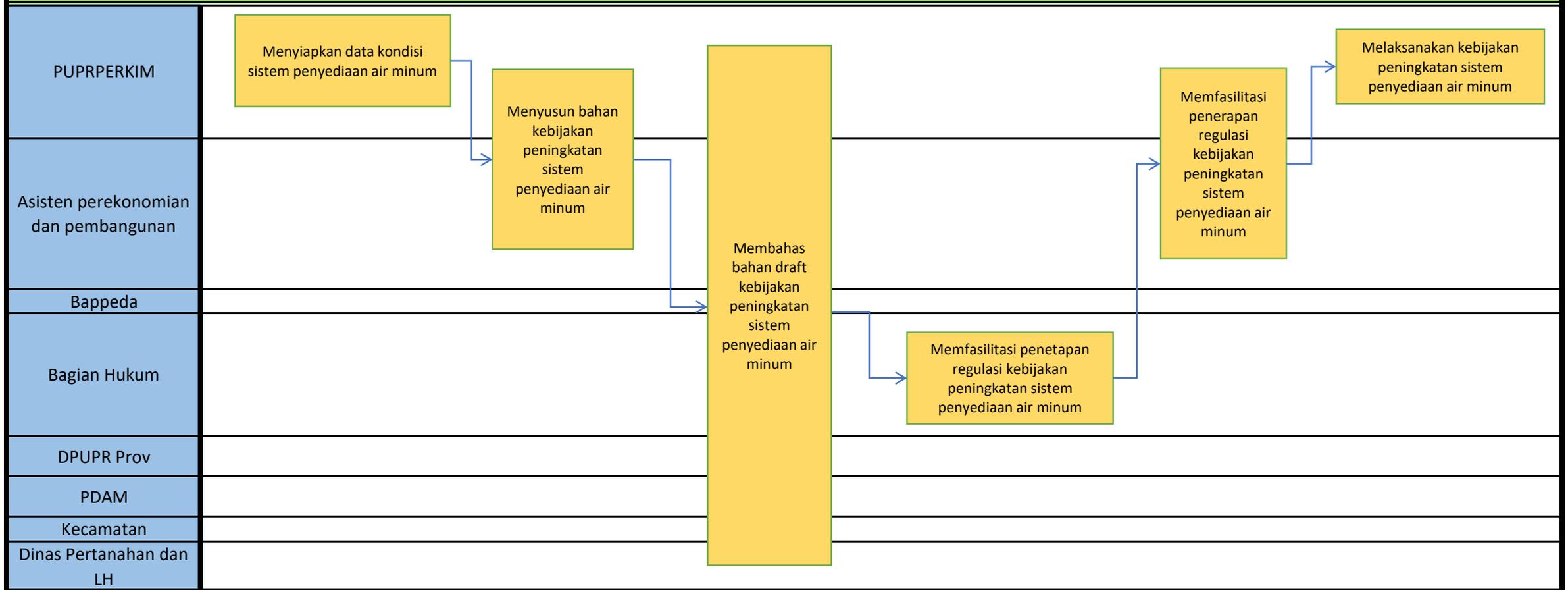
### 06. Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika

- 1) Diskominfo
- 2) SKPD
- 3) Lembaga
- 4) Pemerintah Kecamatan dan Desa

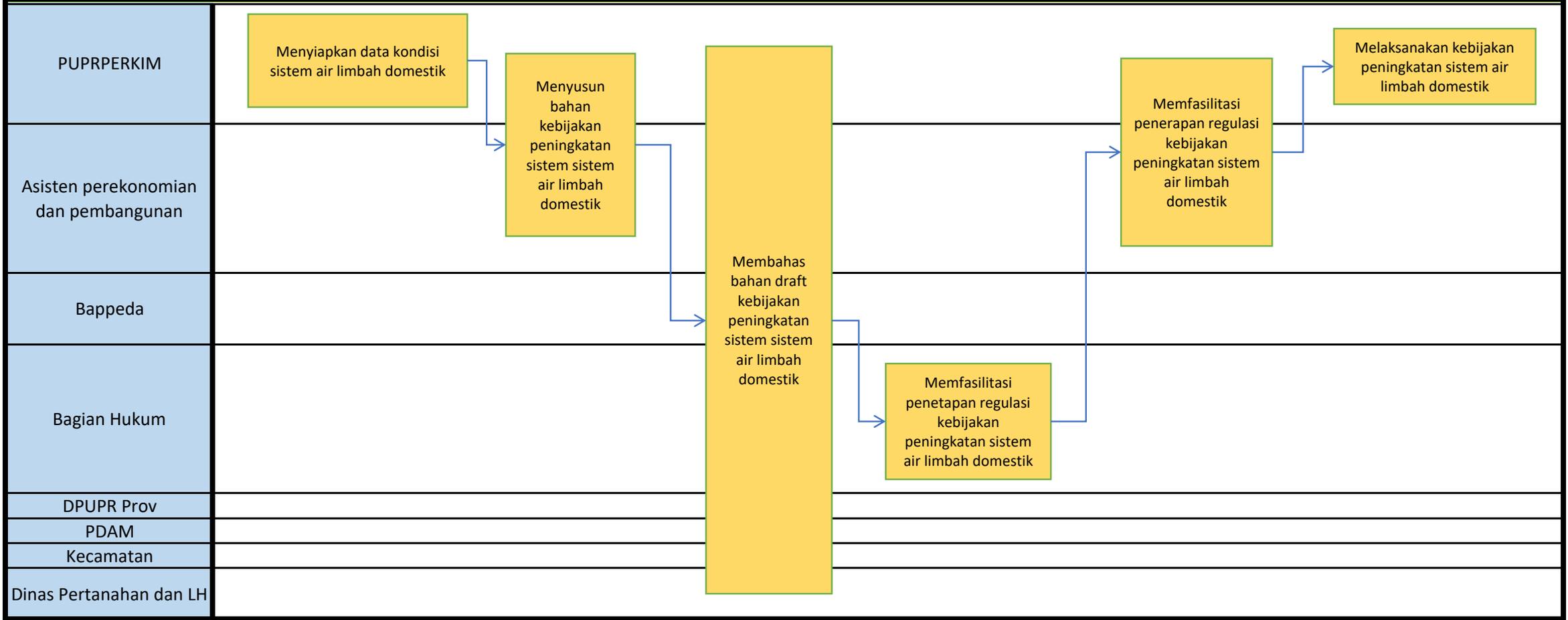
# PETA SUB PROSES



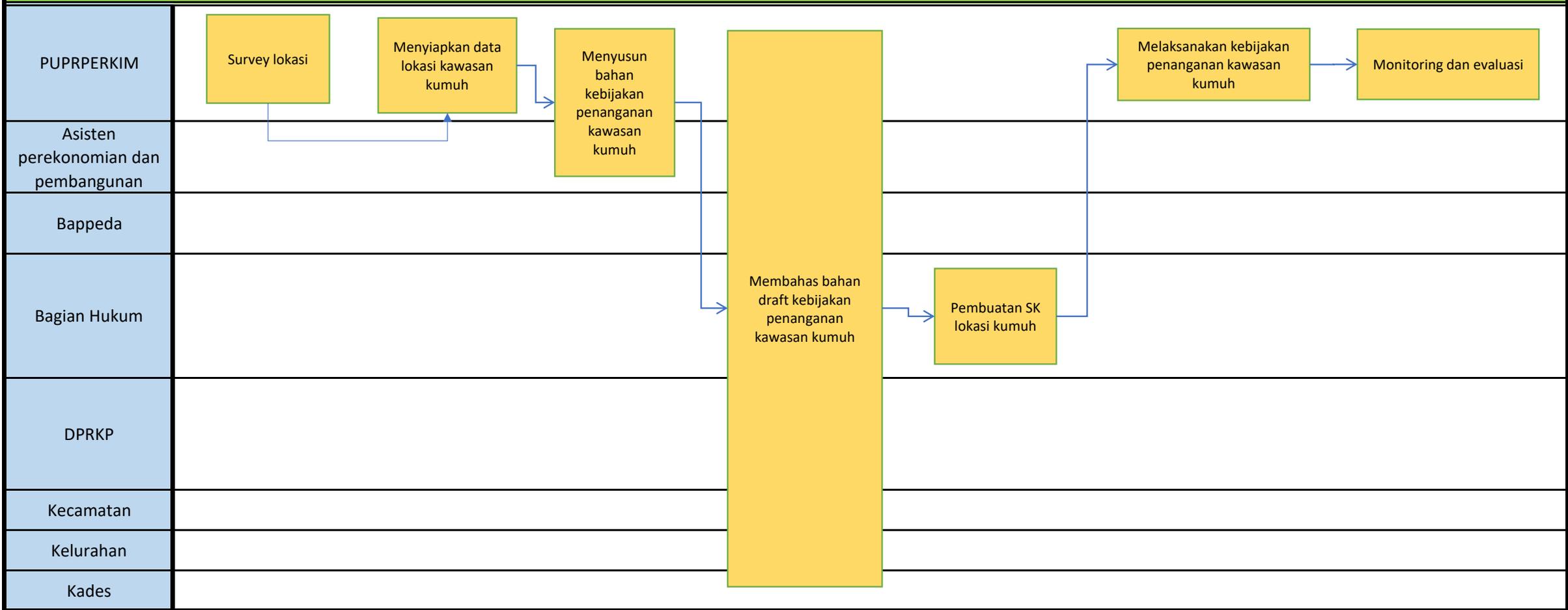
**BLG.02.01.CFM.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**



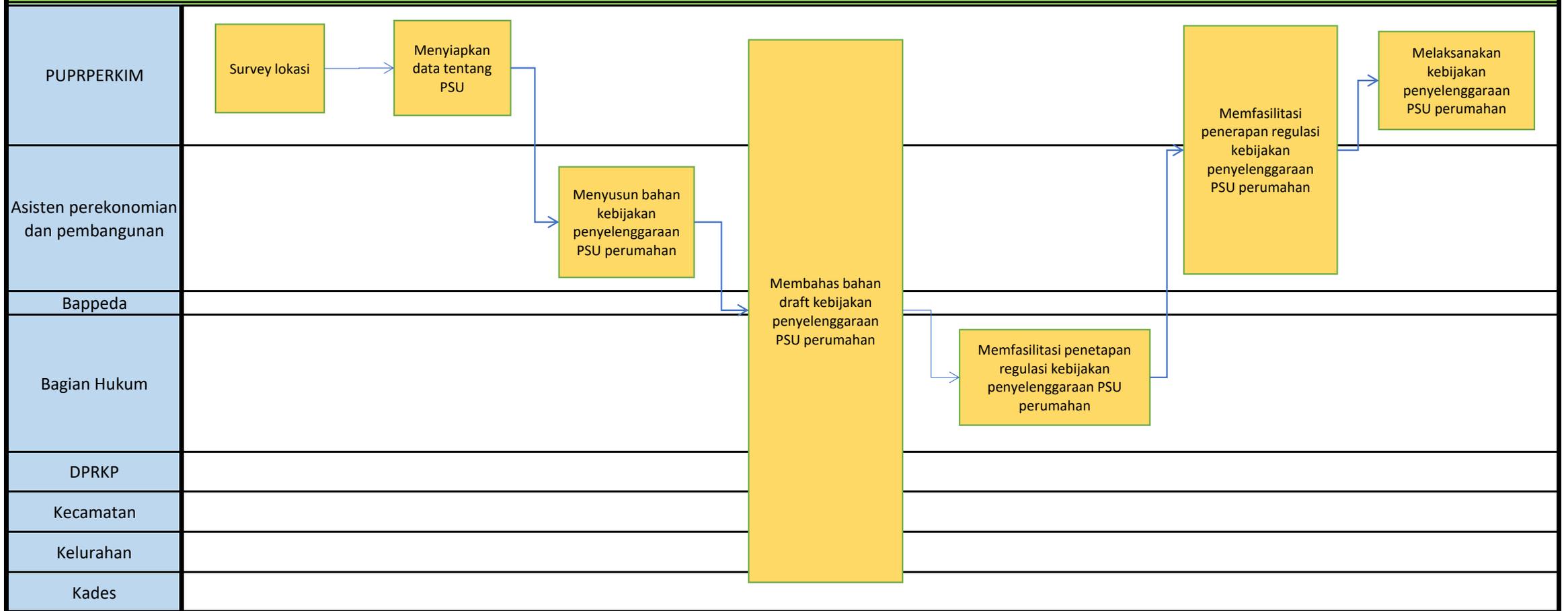
**BLG.02.02.CFM.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**



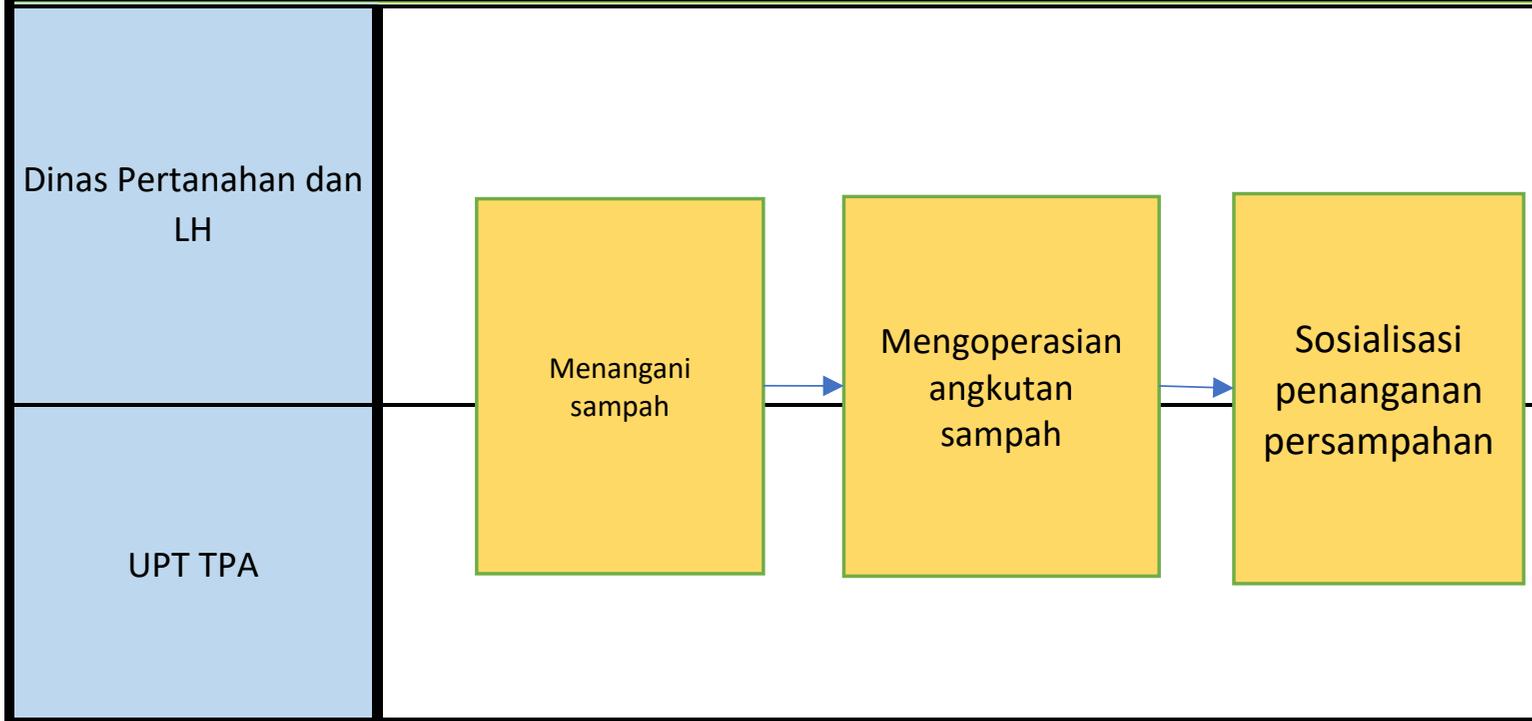
**BLG.02.03.CFM.01 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**



**BLG.02.04.CFM.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**



## BLG.02.01.CFM.06 Pengelolaan Sampah



## PETA RELASI (BLG-02) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan system Penyediaan Air Minum

- 1) PUPRPerkim
- 2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
- 3) Bappedalitbang
- 4) Bagi. Hukum Setda
- 5) PDAM
- 6) Pemerintah Kecamatan
- 7) Dinas LH & Pertanahan

### 02. Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan system Air limbah

- 1) PUPRPerkim
- 2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
- 3) Bappedalitbang
- 4) Bagi. Hukum Setda
- 5) PDAM
- 6) Pemerintah Kecamatan
- 7) Dinas LH & Pertanahan

### 03. Peningkatan Kawasan Pemukiman

- 1) PUPRPerkim
- 2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
- 3) Bappedalitbang
- 4) Bag. Hukum Setda
- 5) Pemerintah Kecamatan & Kelurahan

### 04. Peningkatan Prasarana, sarana Utilitas Umum (PSU)

- 1) PUPRPerkim
- 2) Asisten Perekonomian & Pembangunan
- 3) Bappedalitbang
- 4) Bag. Hukum Setda
- 5) Pemerintah Kecamatan & Kelurahan

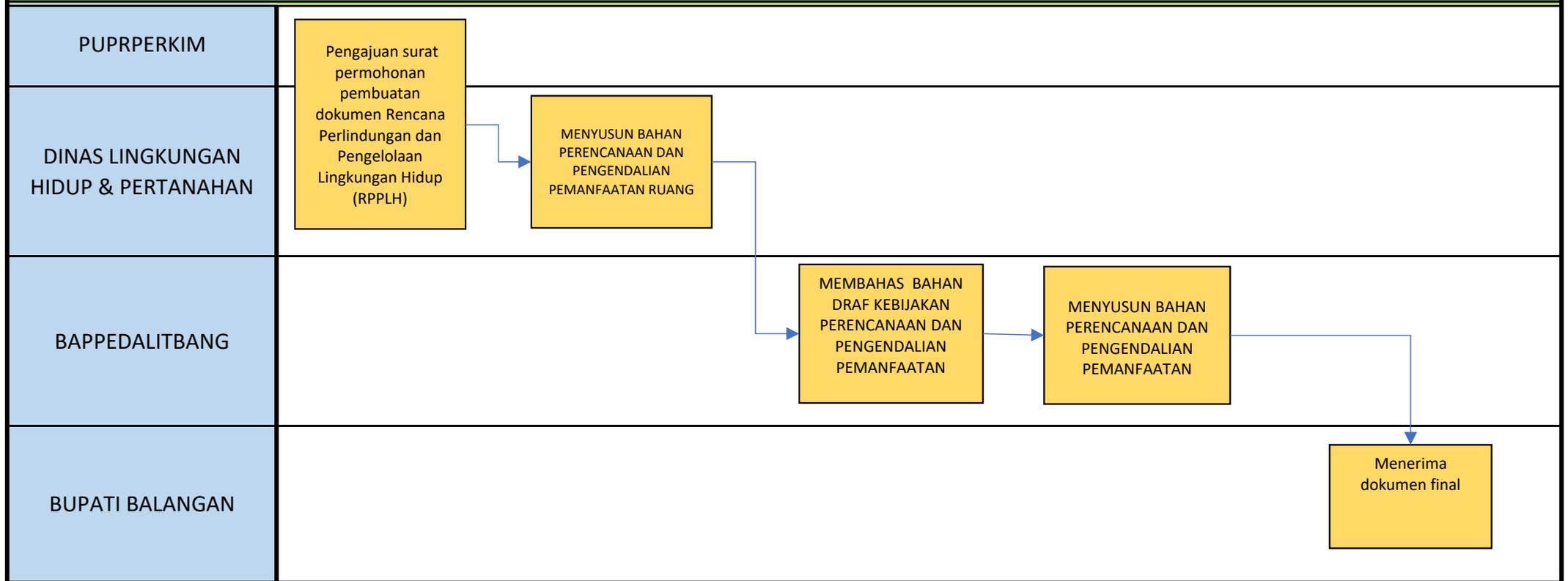
### 05. Peningkatan Pengelolaan Persampahan

- 1) Dinas LH dan Pertanahan
- 2) UPT TPA

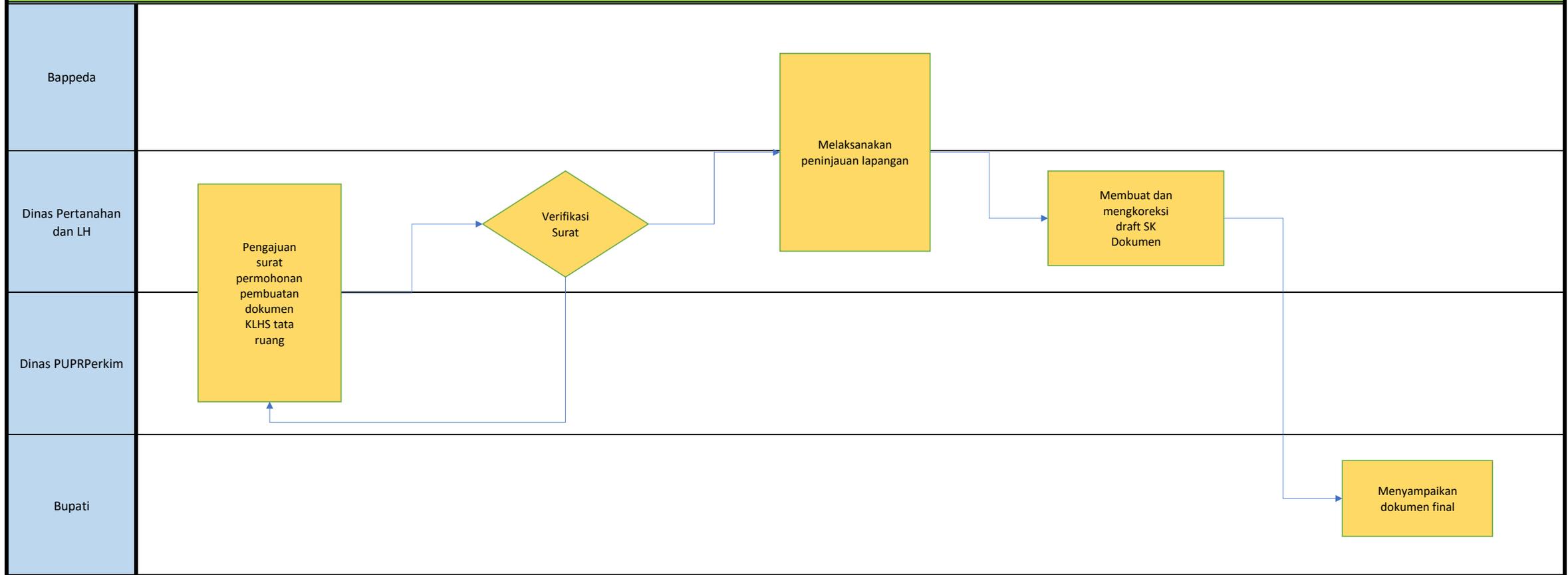
# PETA SUB PROSES



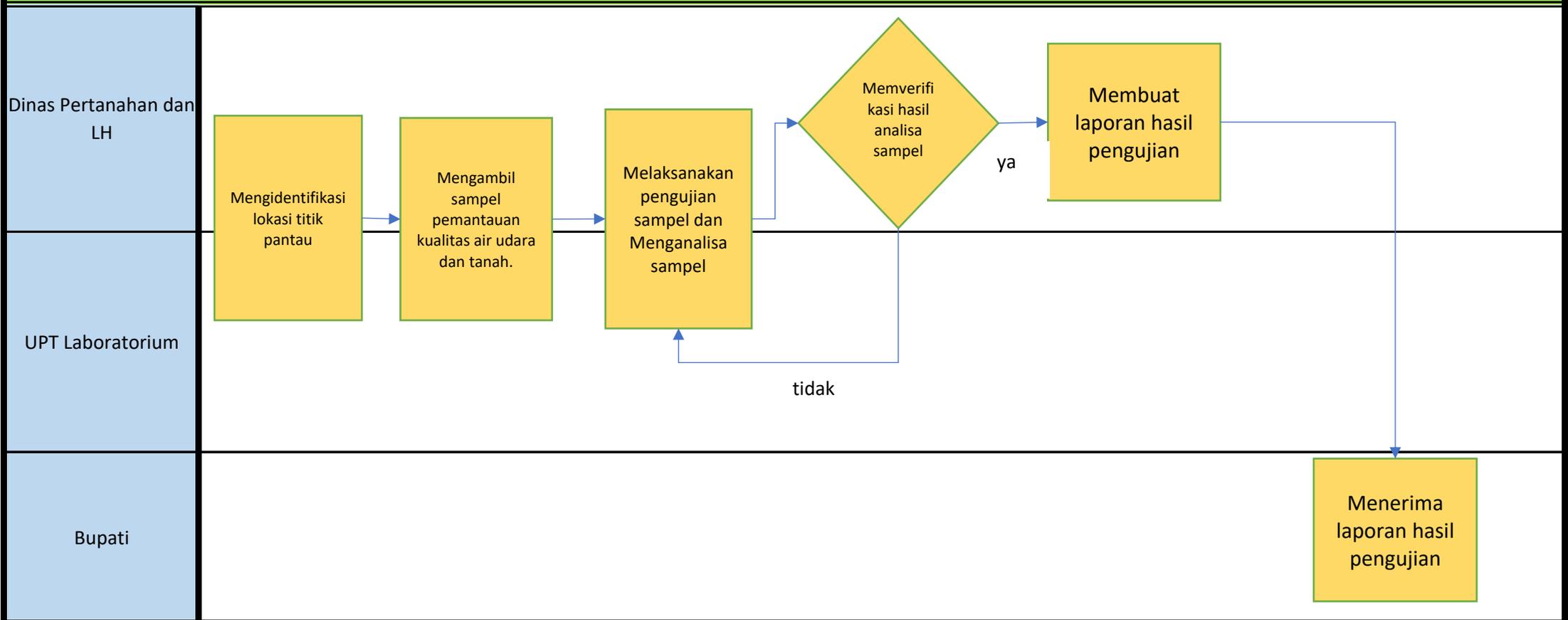
**BLG.03.01.CFM.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN**



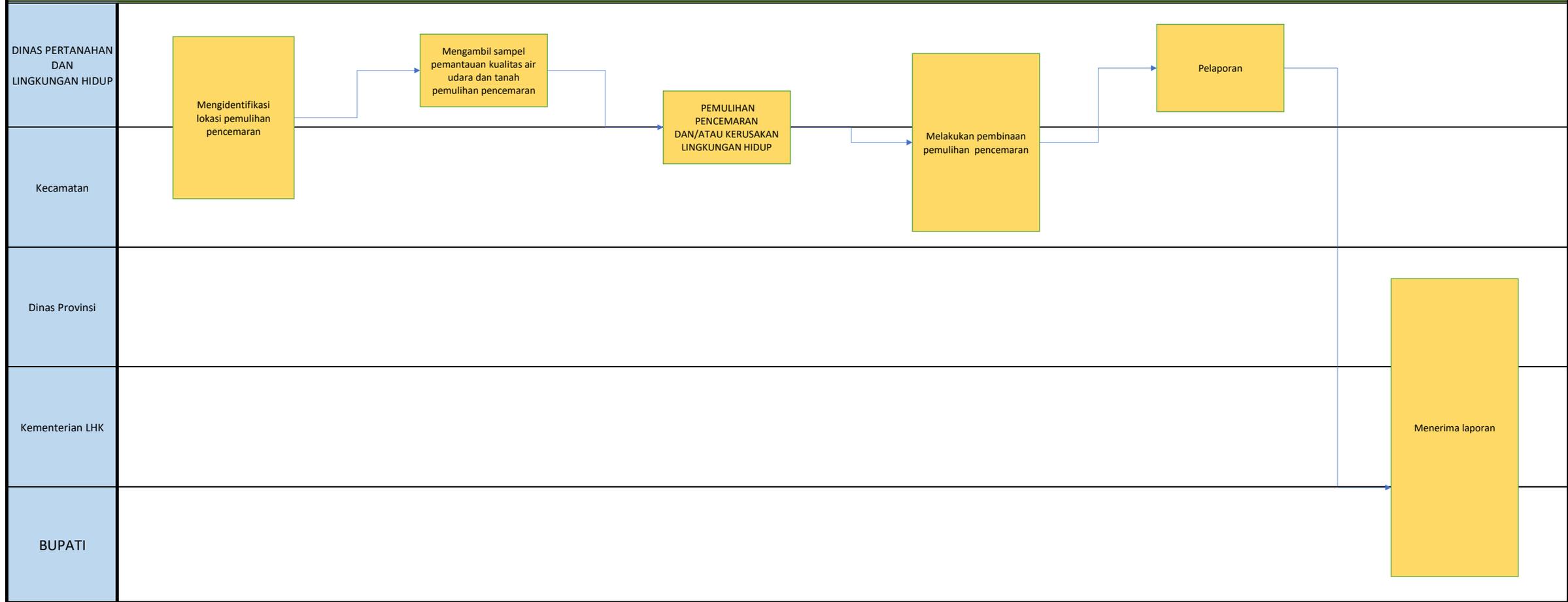
**BLG.03.01.CFM.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**



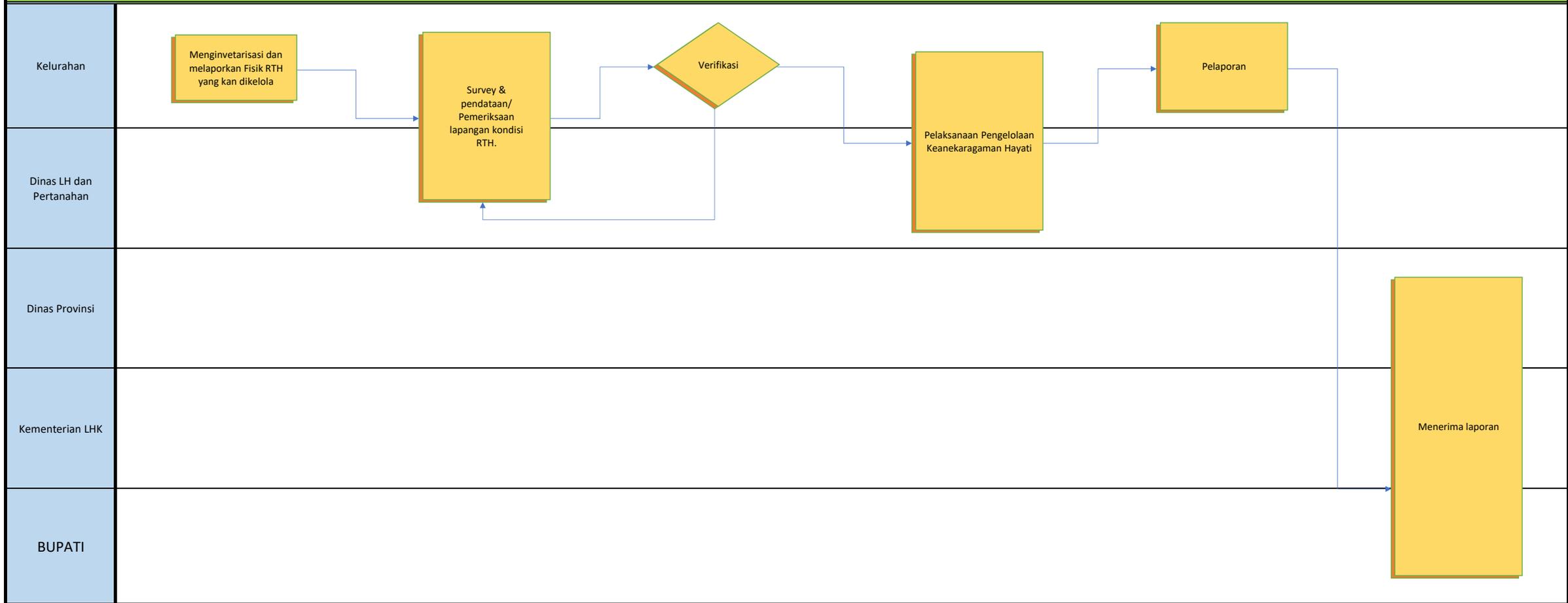
## BLG.03.02.CFM.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota



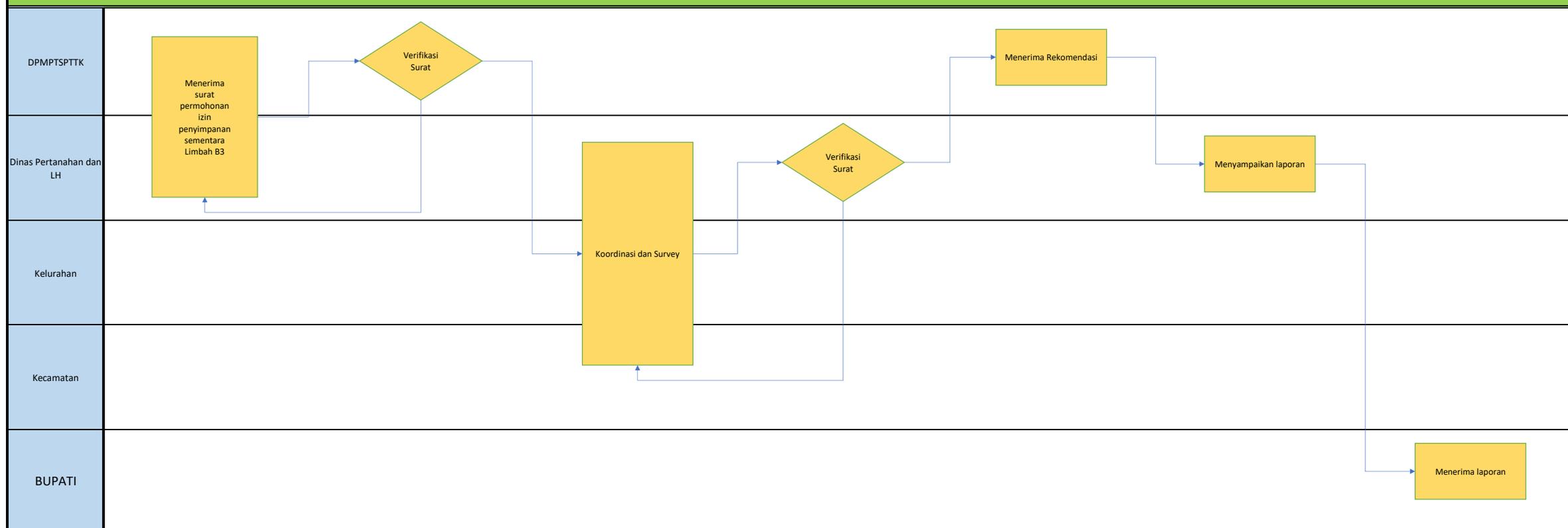
**BLG.03.02.CFM.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA**



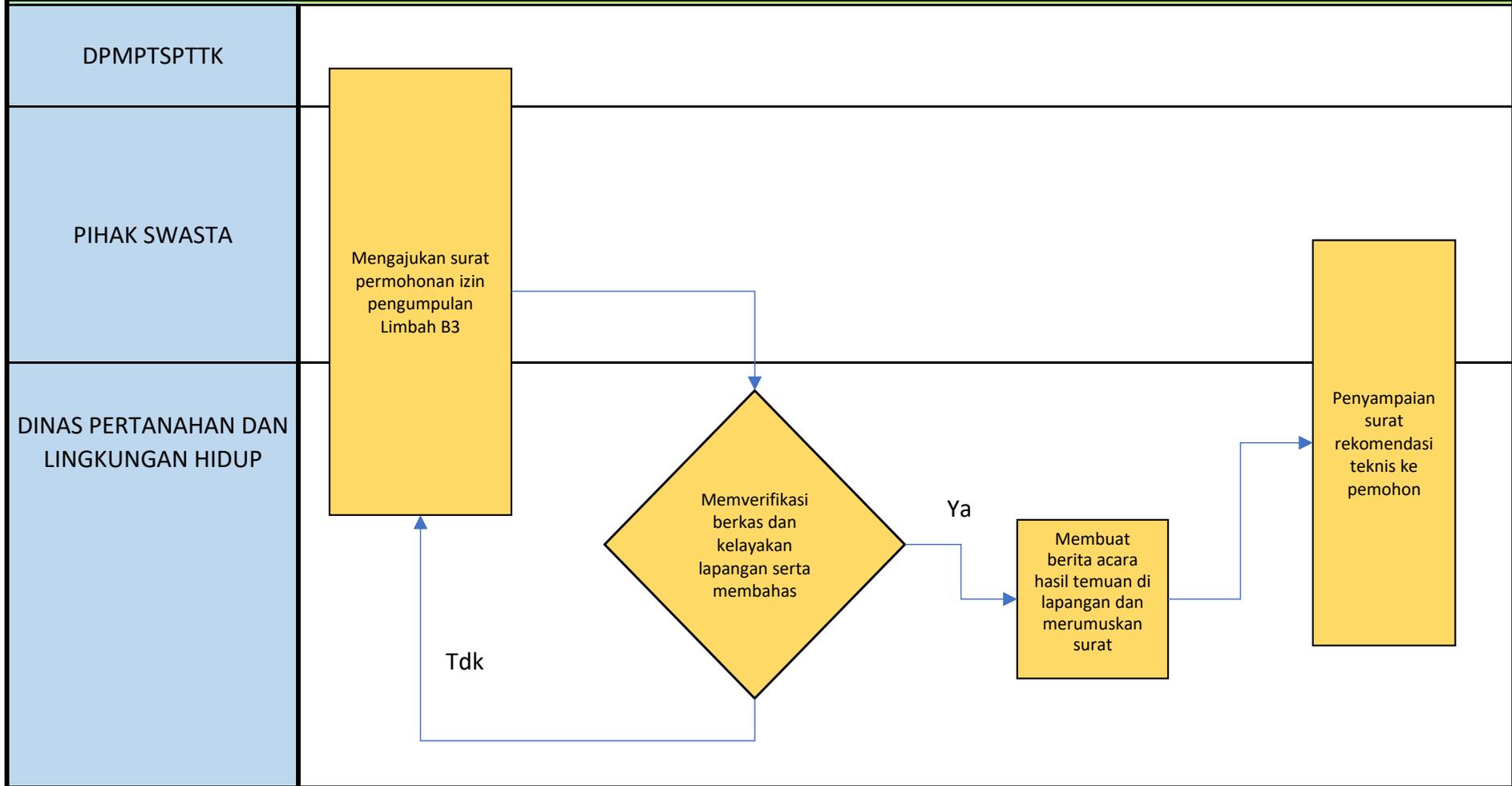
**BLG.03.03.CFM.01 : PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA**



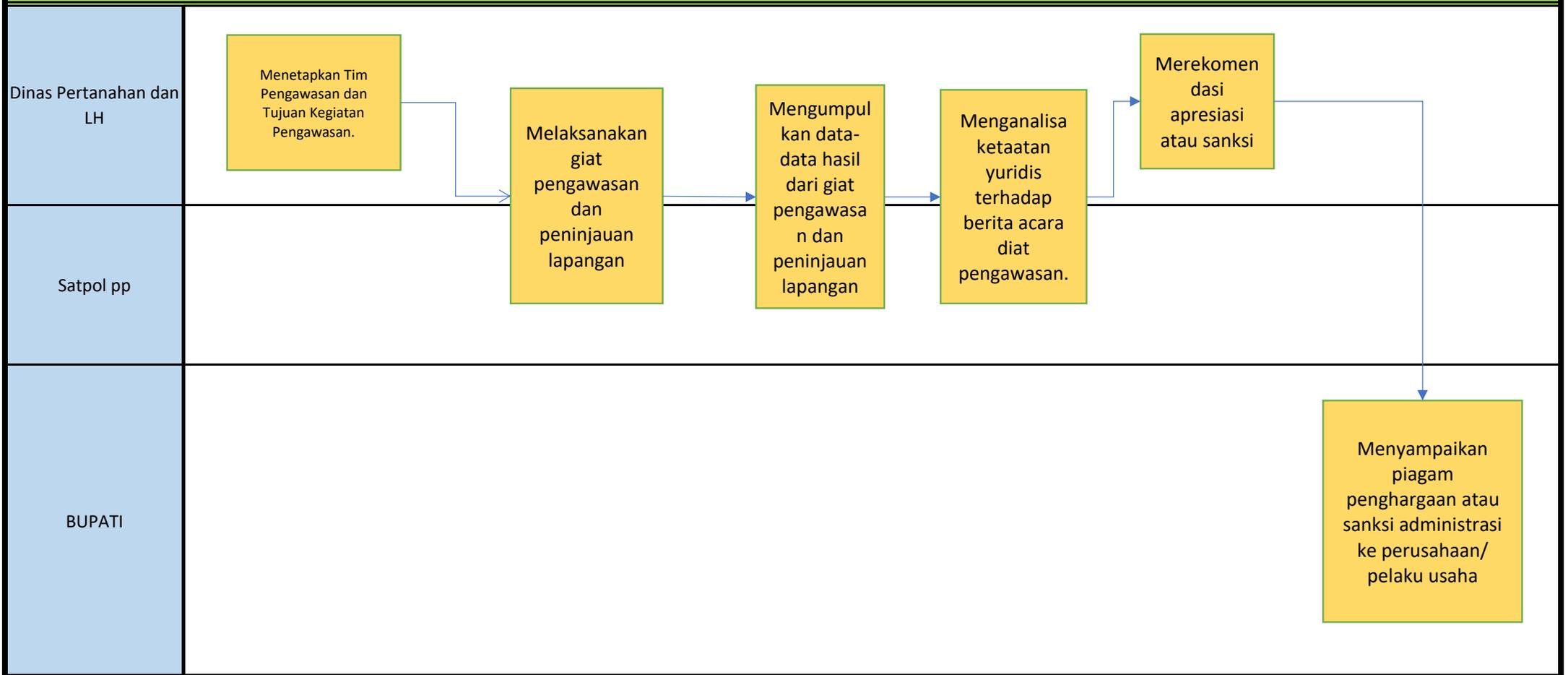
**BLG.03.04.CFM.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3**



**BLG.03.04.CFM.02 PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**



**BLG.03.05.CFM.02 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**



## PETA RELASI BLG-03 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Perencanaan Lingkungan hidup

- 1) Dinas LH dan Pertanahan
- 2) Dinas PUPRPerkim
- 3) Bappedalitbang

### 02. Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup

- 1) Dinas LH dan Pertanahan
- 2) UPT Laboratorium

### 03. Peningkatan Pengelolaan Keaneka Ragaman hayati (kehati)

- 1) Dinas LH dan Pertanahan
- 2) Pemerintah Kecamatan
- 3) Pemerintahan Kelurahan/Desa

### 04. Peningkatan Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun (B-3) dan limbah bahan

- 1) Dinas LH dan Pertanahan
- 2) DPMPTSP

### 05. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ijin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- 1) Dinas LH dan Pertanahan
- 2) Satpol PP

# PETA SUB PROSES

## INPUT

Kebijakan/regulasi tentang pertumbuhan ekonomi

### Pemerintah

Permintaan informasi, konsultasi, informasi publik

### Perangkat Daerah

Permintaan informasi, konsultasi dan layanan

## BLG-04

### Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

<b>BLG-04.01</b> Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	<b>BLG-04.02</b> Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	<b>BLG-04.03</b> Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
<b>BLG-04.04</b> Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	<b>BLG-04.05</b> Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	<b>BLG-04.06</b> Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
<b>BLG-04.07</b> Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	<b>BLG-04.08</b> Peningkatan Penyuluhan Pertanian	<b>BLG-04.09</b> Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
<b>BLG-04.10</b> Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	<b>BLG-04.11</b> Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	<b>BLG-04.12</b> Peningkatan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
<b>BLG-04.13</b> Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	<b>BLG-04.14</b> Peningkatan Pengembangan UMKM	<b>BLG-04.15</b> Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri
<b>BLG-04.16</b> Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri	<b>BLG-04.17</b> Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	<b>BLG-04.18</b> Peningkatan Pengembangan Ekspor
<b>BLG-04.19</b> Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	<b>BLG-04.20</b> Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	<b>BLG-04.21</b> Peningkatan Daya Tarik Wisata
<b>BLG-04.22</b> Peningkatan Pemasaran Pariwisata	<b>BLG-04.23</b> Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	<b>BLG-04.24</b> Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
<b>BLG-04.25</b> Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>BLG-04.26</b> Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	<b>BLG-04.27</b> Peningkatan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

## OUTPUT

Akuntabilitas/Laporan

### Pemerintah

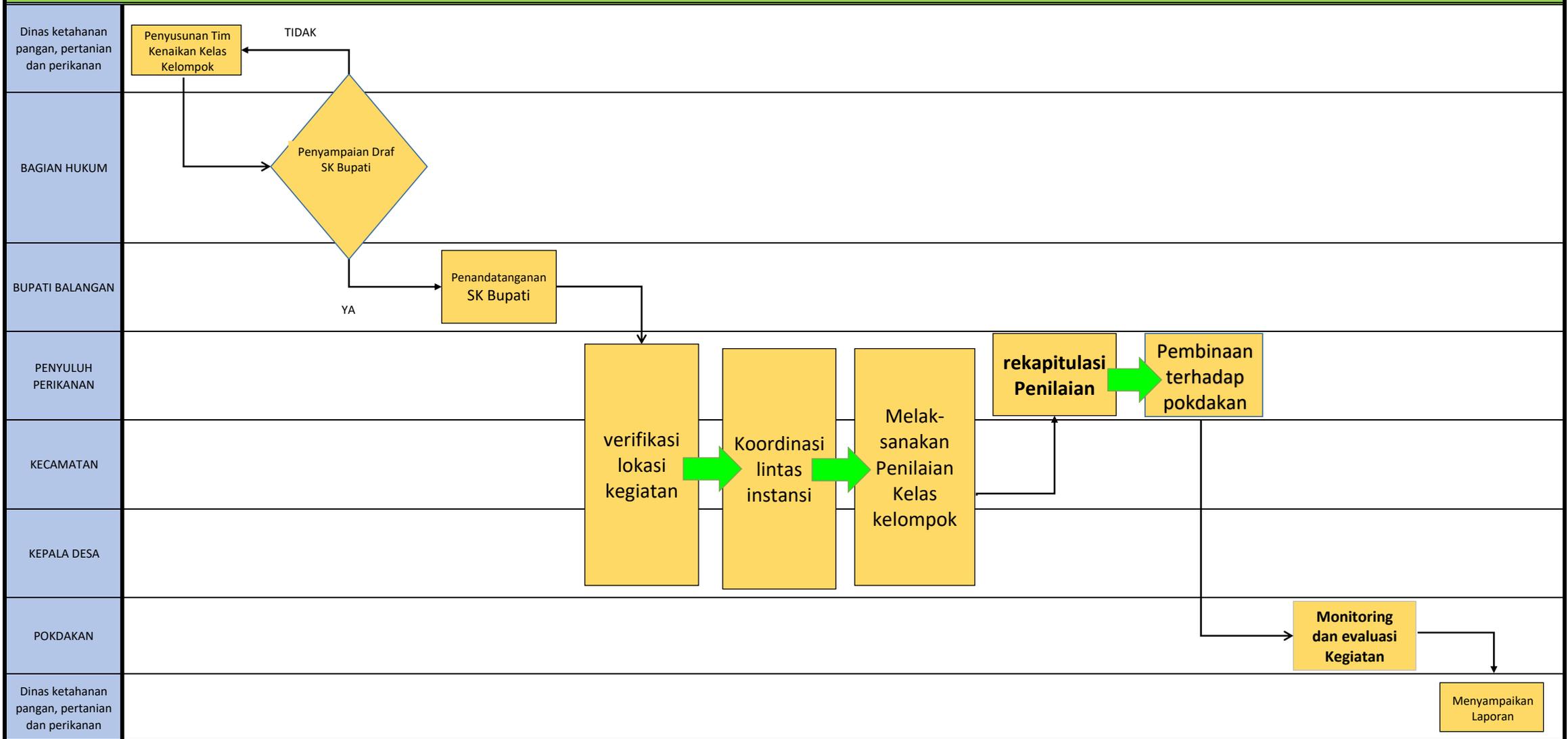
Perumusan kebijakan strategis pertumbuhan ekonomi

Pengembangan teknologi informasi

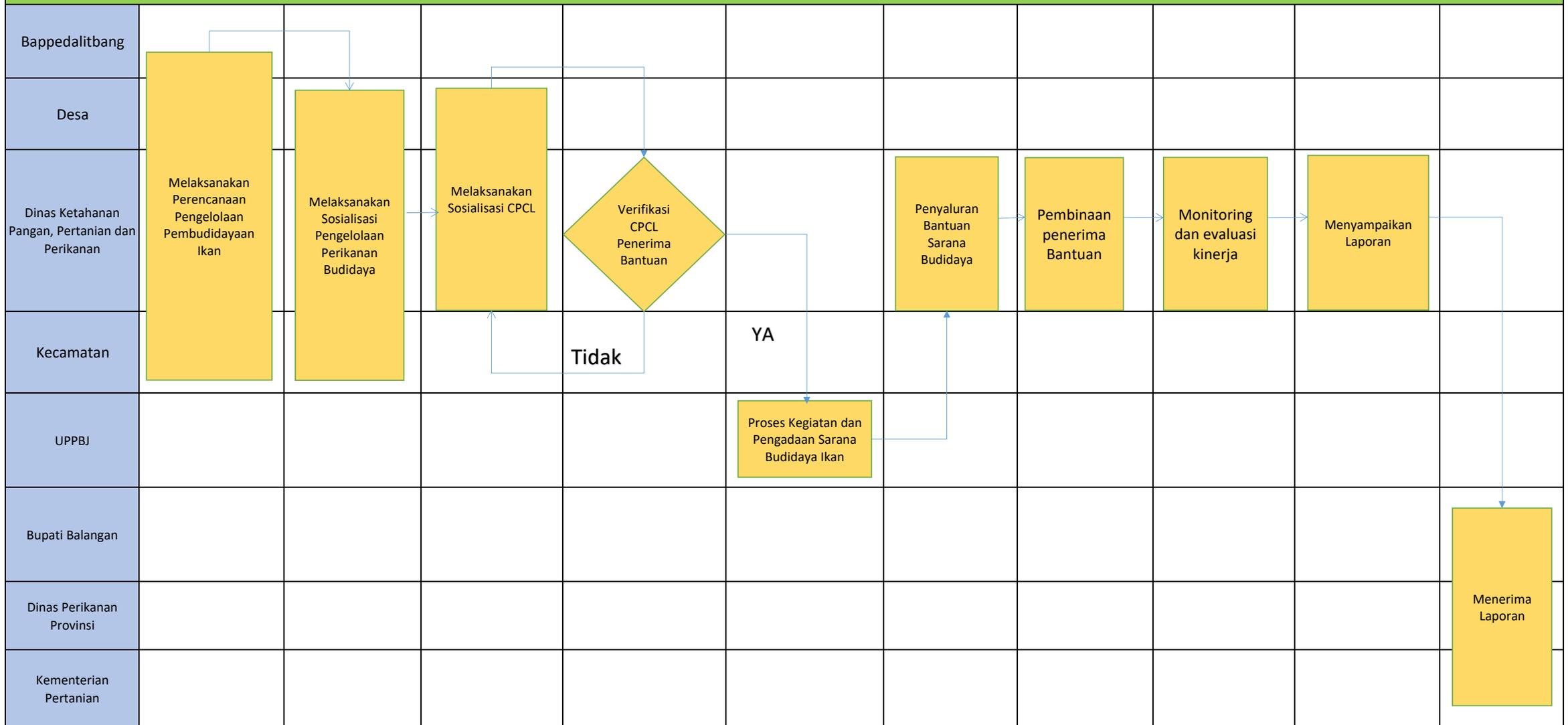
### Perangkat Daerah

1. Perikanan yang memadai
2. Pertanian yang memadai
3. Ketahanan pangan yang memadai
4. Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang memadai
5. Koperasi yang memadai
6. Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yang memadai
7. Perindustrian yang memadai
8. Perdagangan yang memadai
9. Perizinan dan pendaftaran perusahaan yang memadai
10. Pariwisata yang memadai
11. Pengembangan dan penanaman modal yang memadai

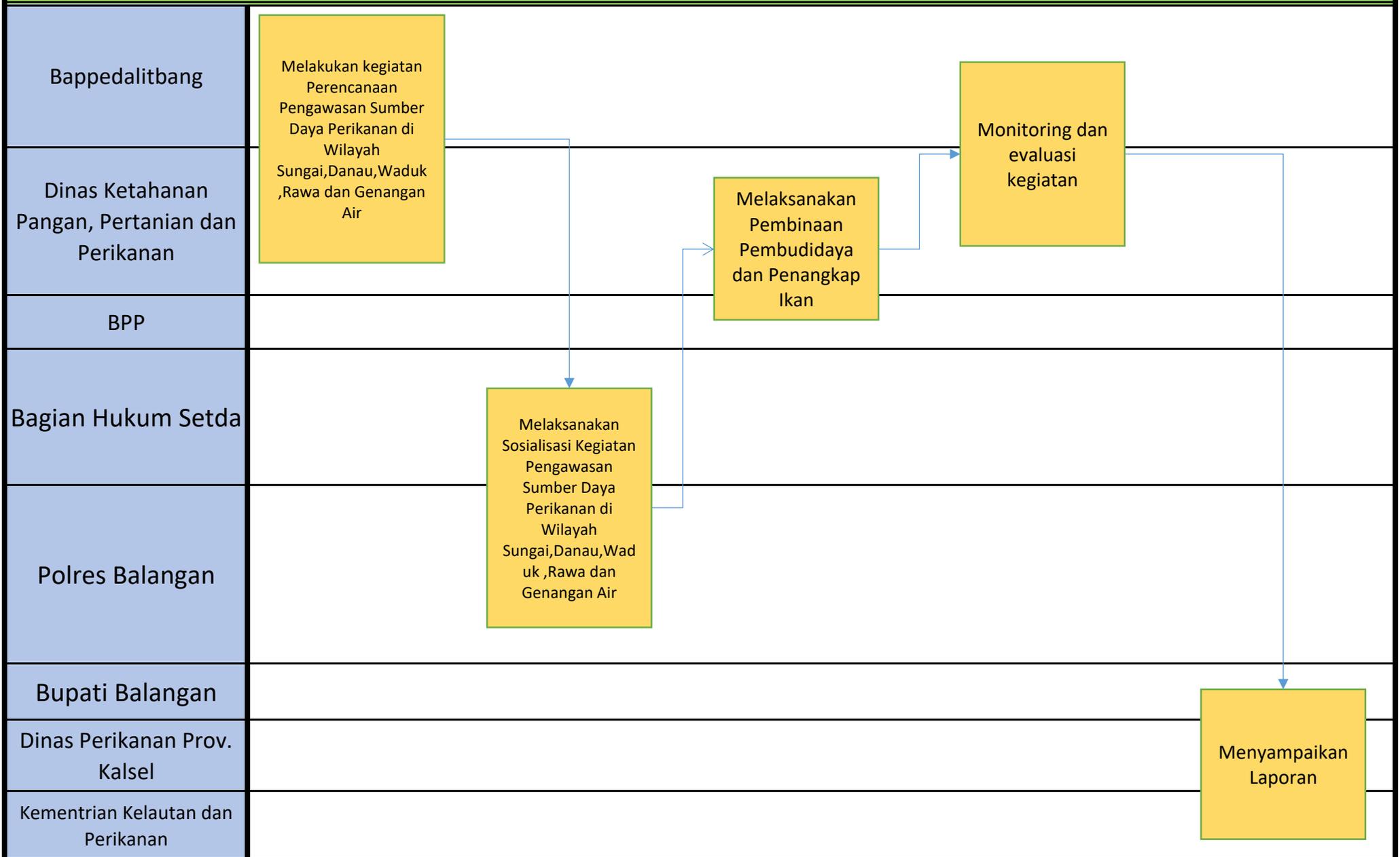
**BLG.04.01.CFM.01 Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil**



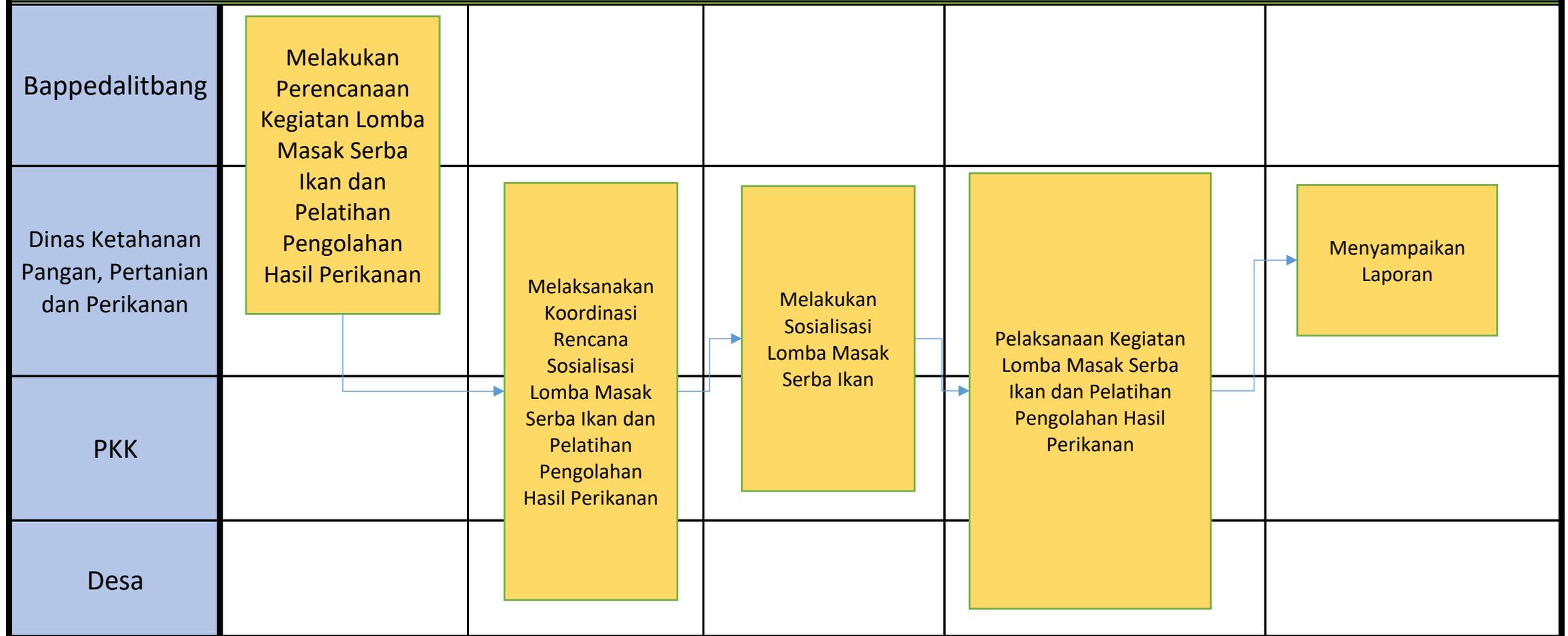
**BLG.04.01.CFM.02 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**



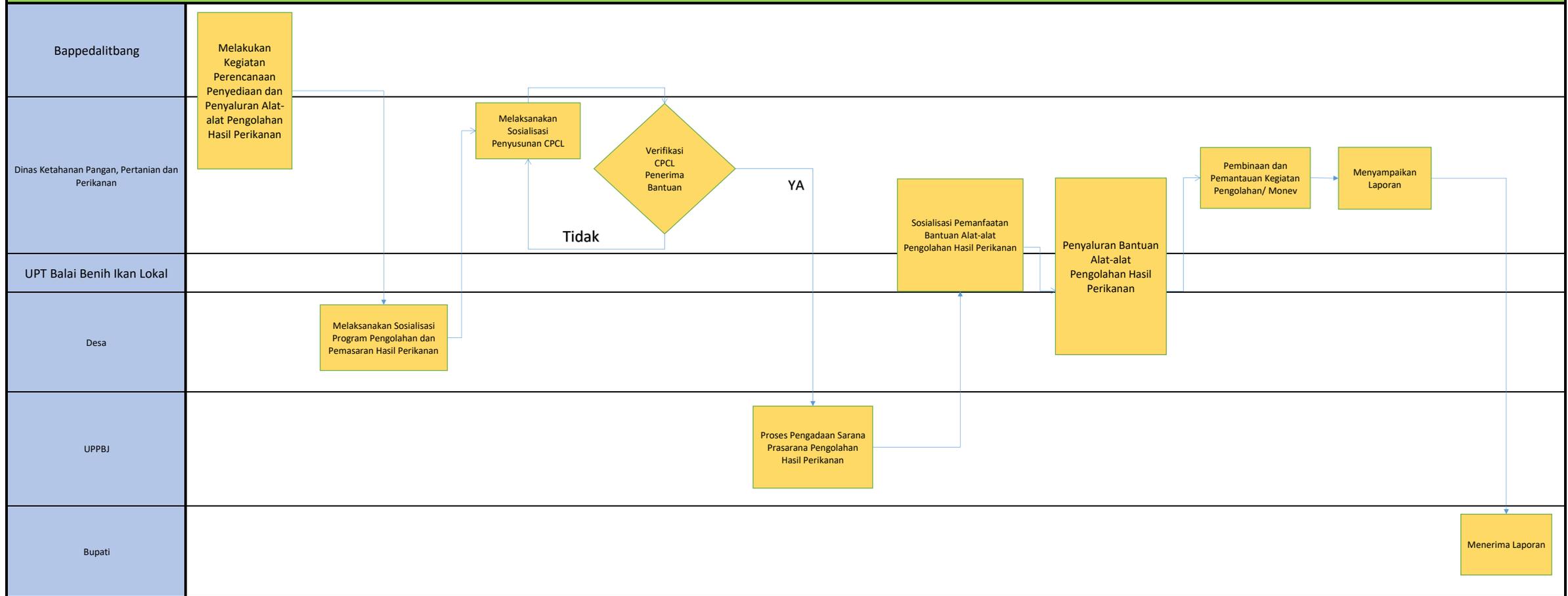
**BLG.04.02.CFM.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota**



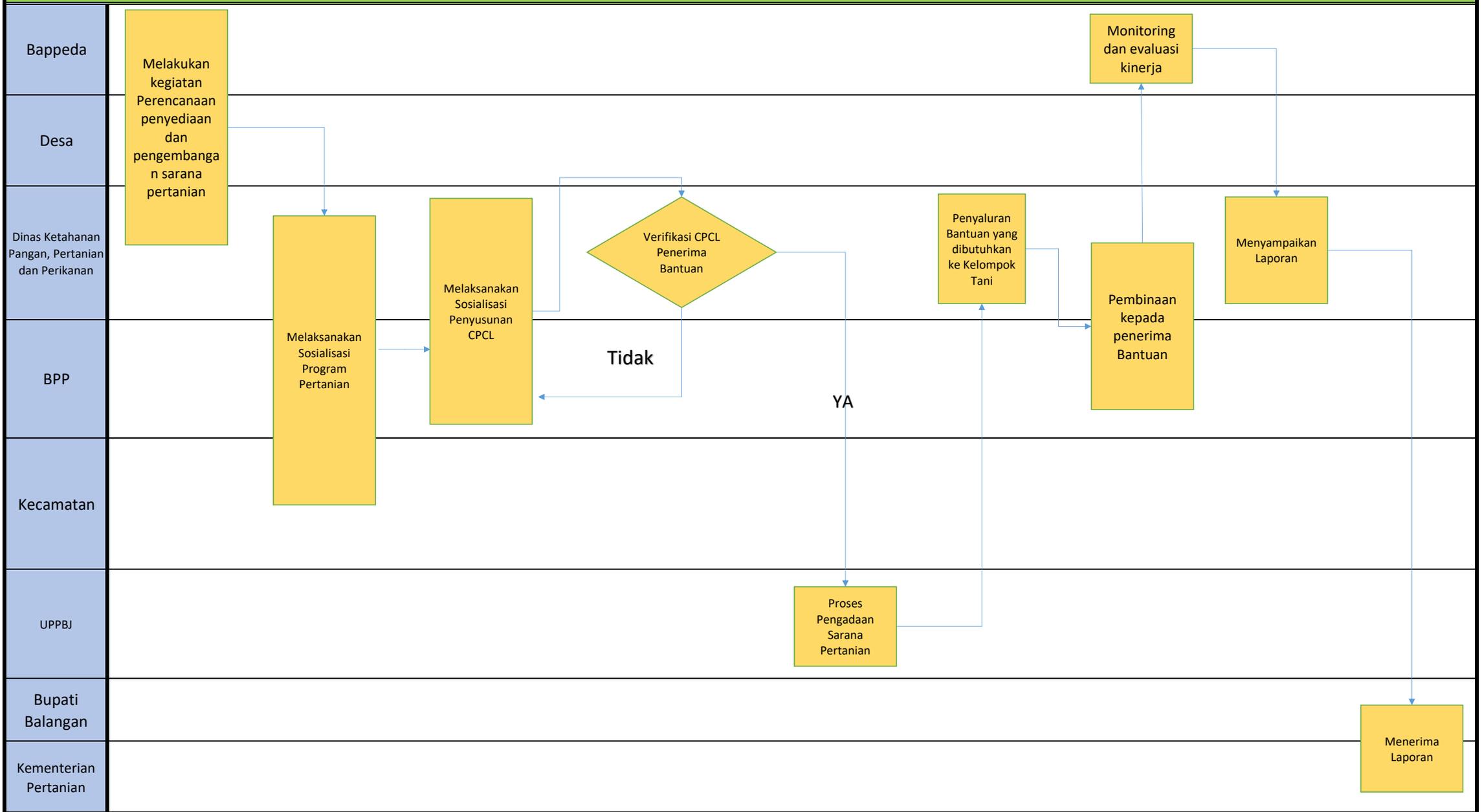
**BLG.04.03.CFM.01 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**



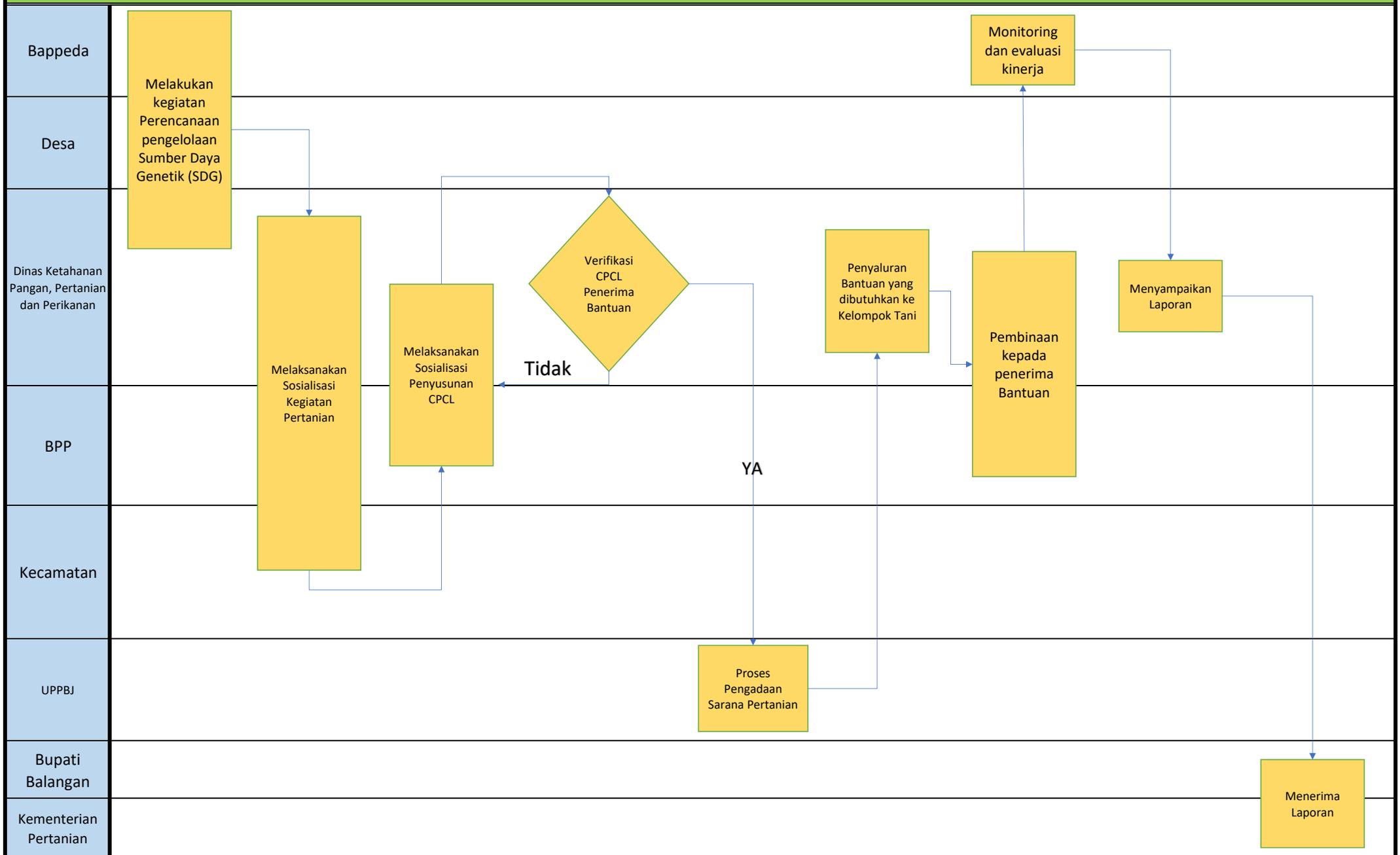
**BLG.04.03.CFM.02 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 ( Satu) Daerah Kabupaten / Kota**



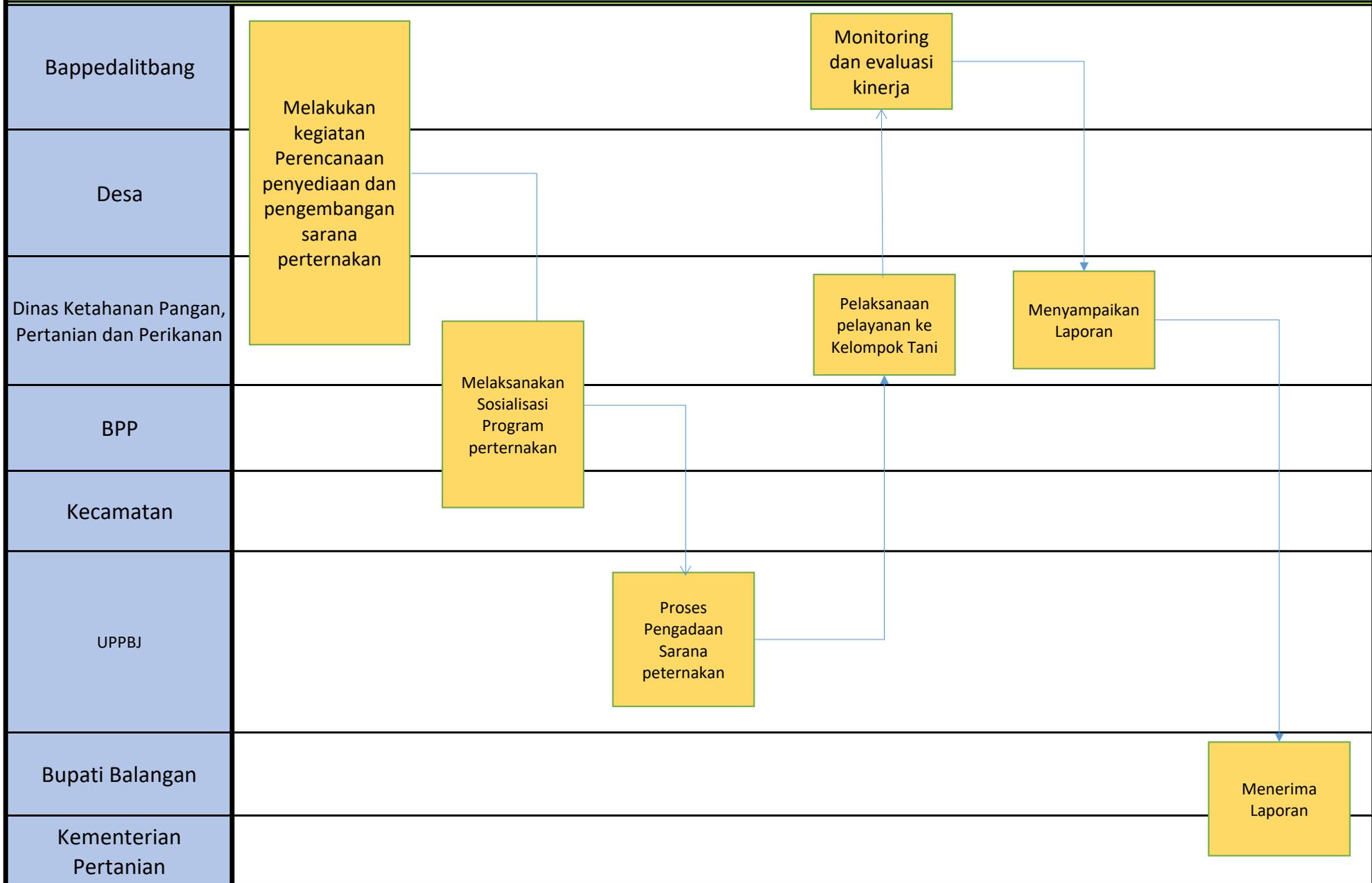
**BLG.04.04.CFM.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**



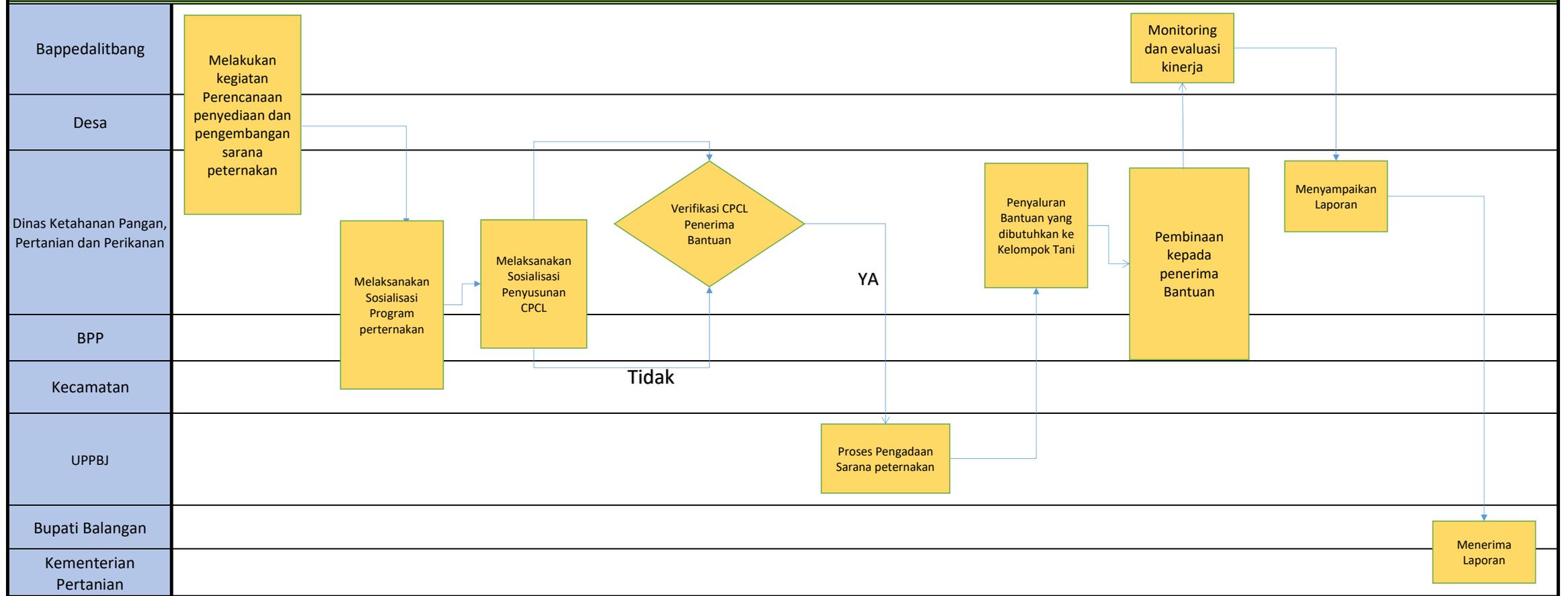
**BLG.04.04.CFM.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**



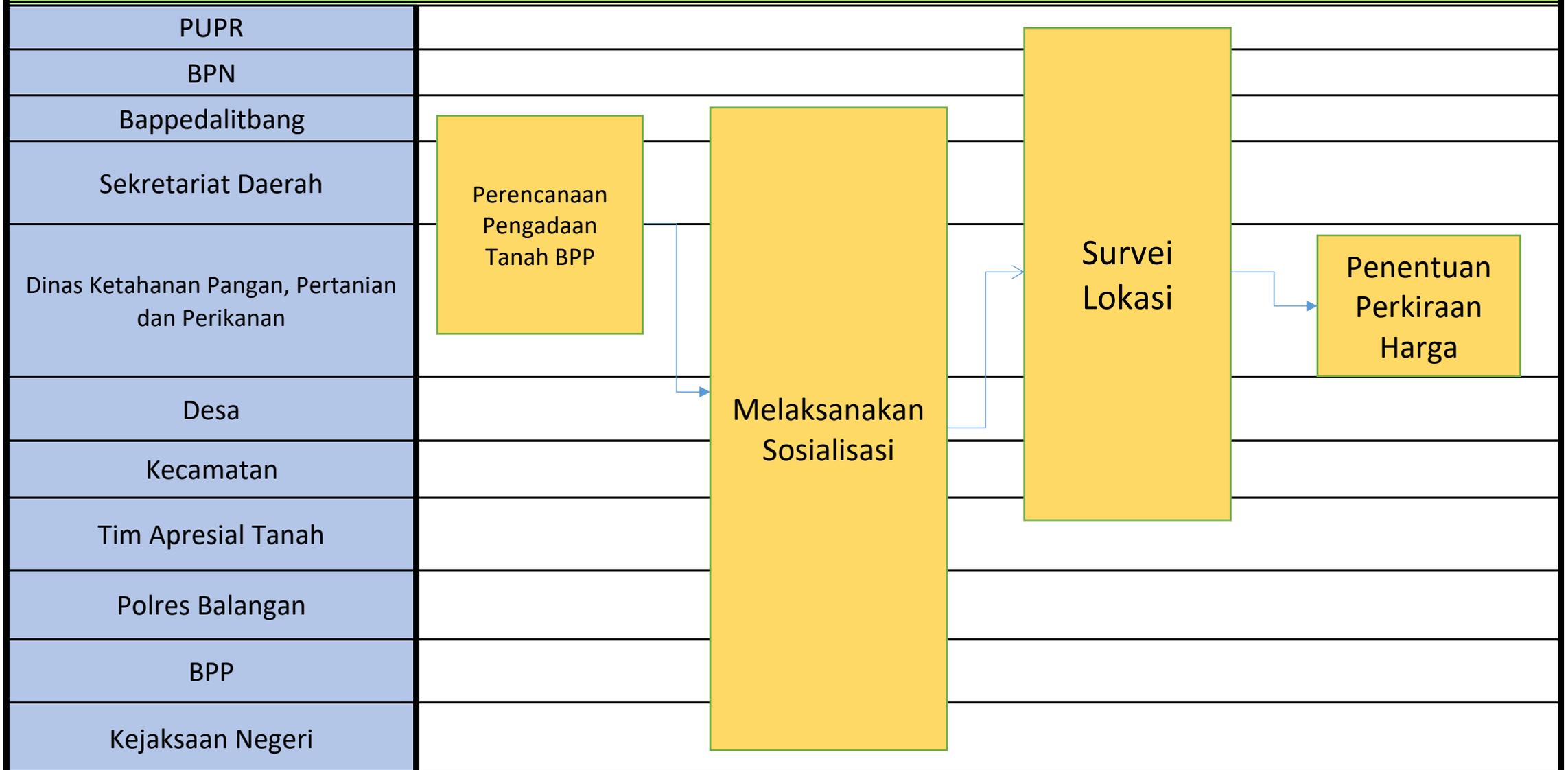
**BLG.04.04.CFM.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**



**BLG.04.04.CFM.04 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**

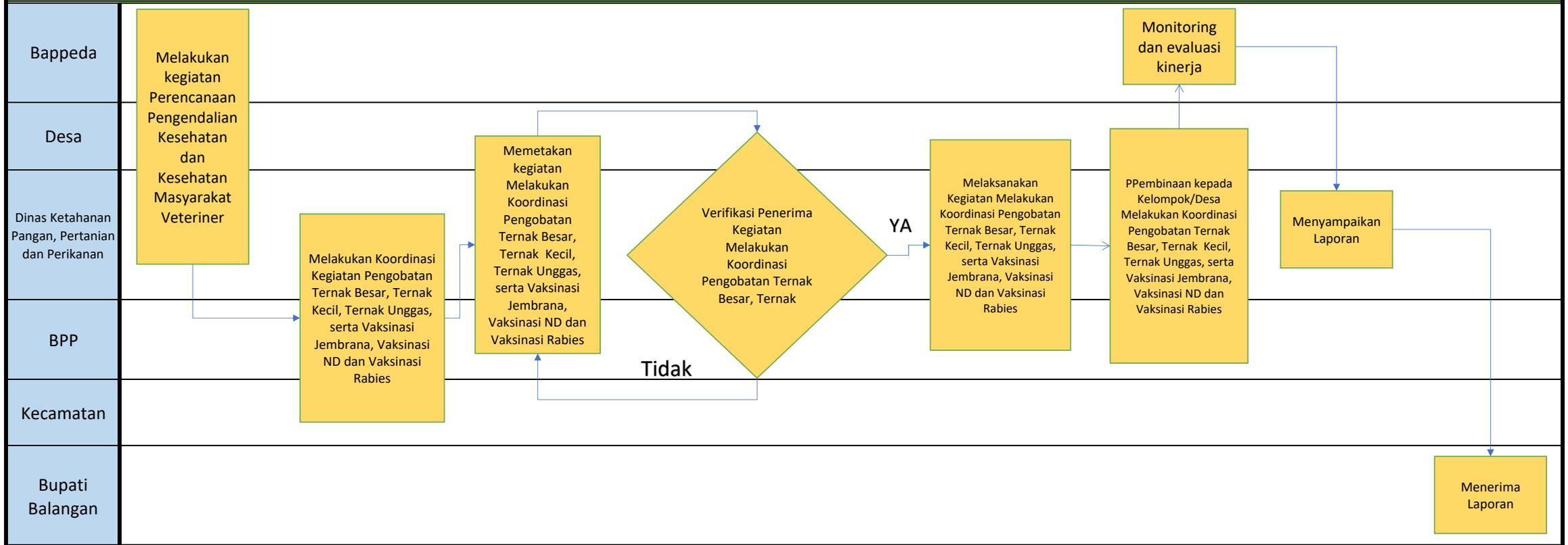


## BLG.04.05.CFM.01 Pembangunan Prasarana Pertanian

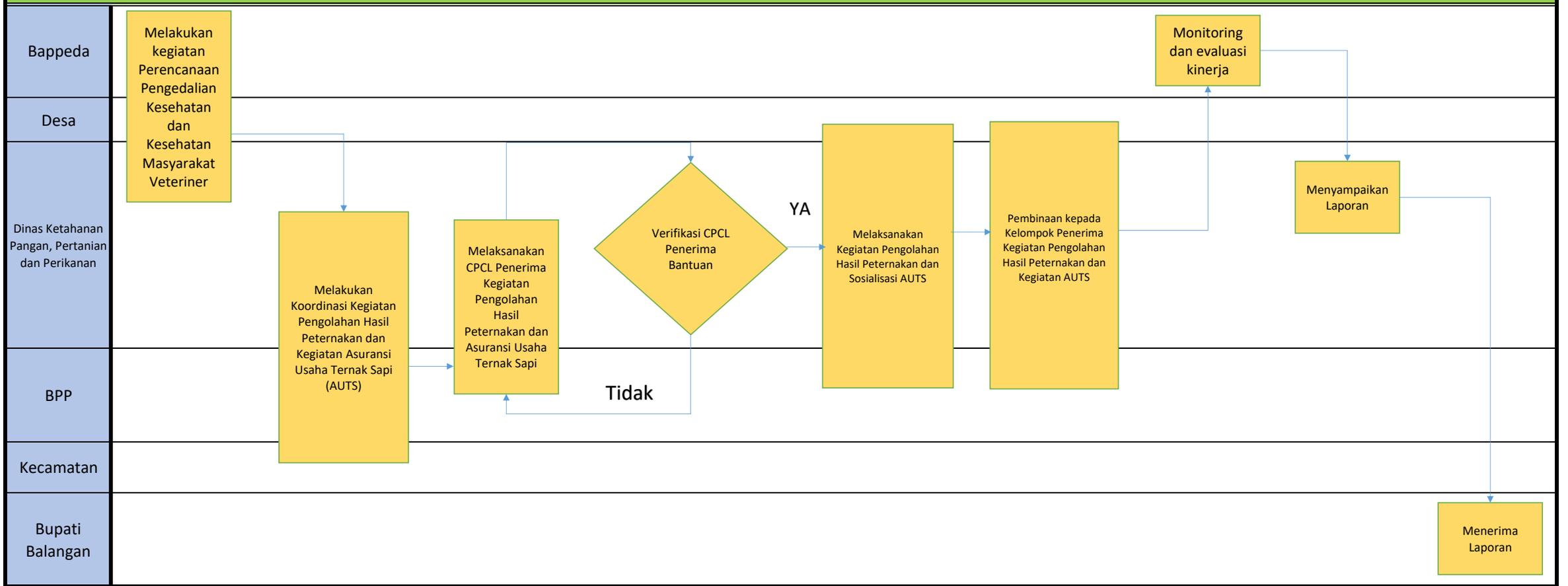




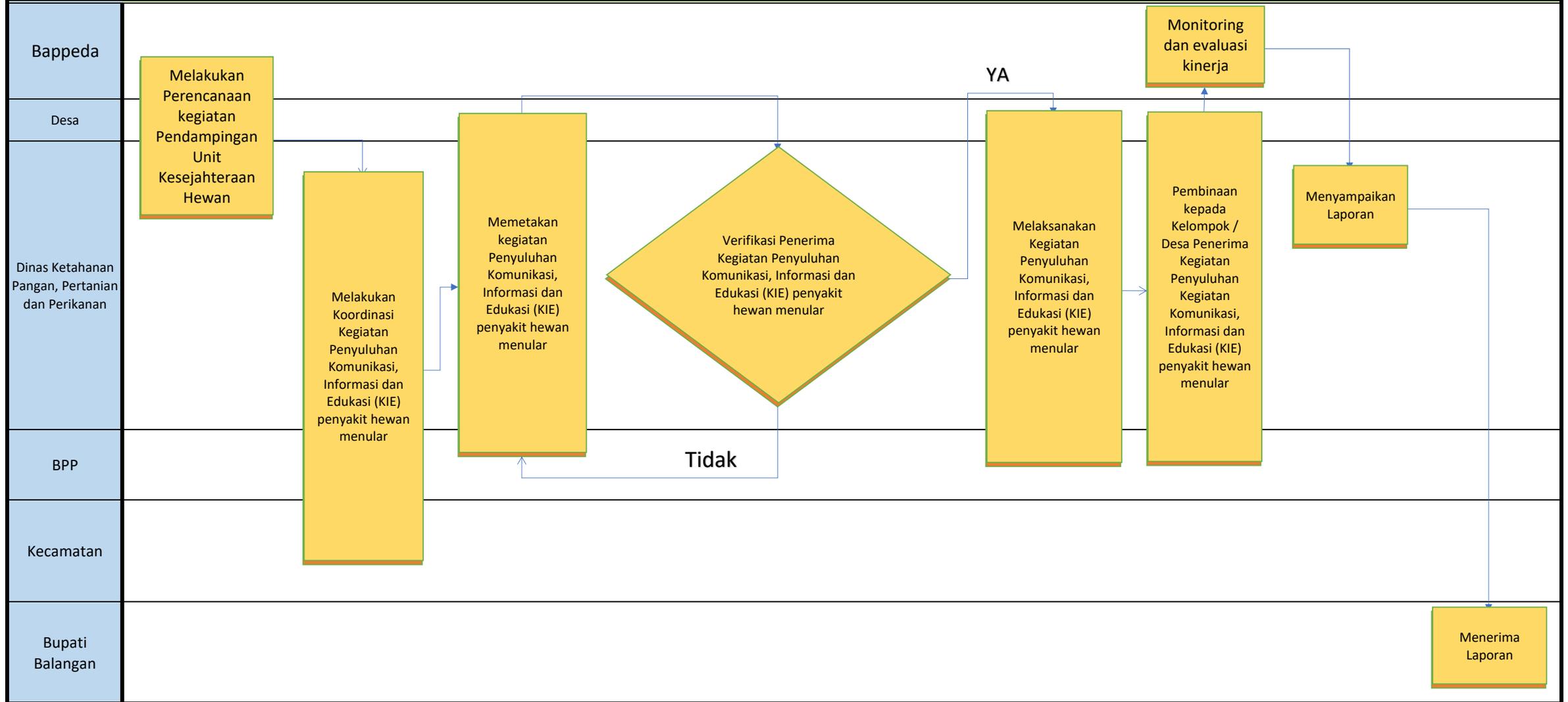
**BLG.04.07.CFM.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**



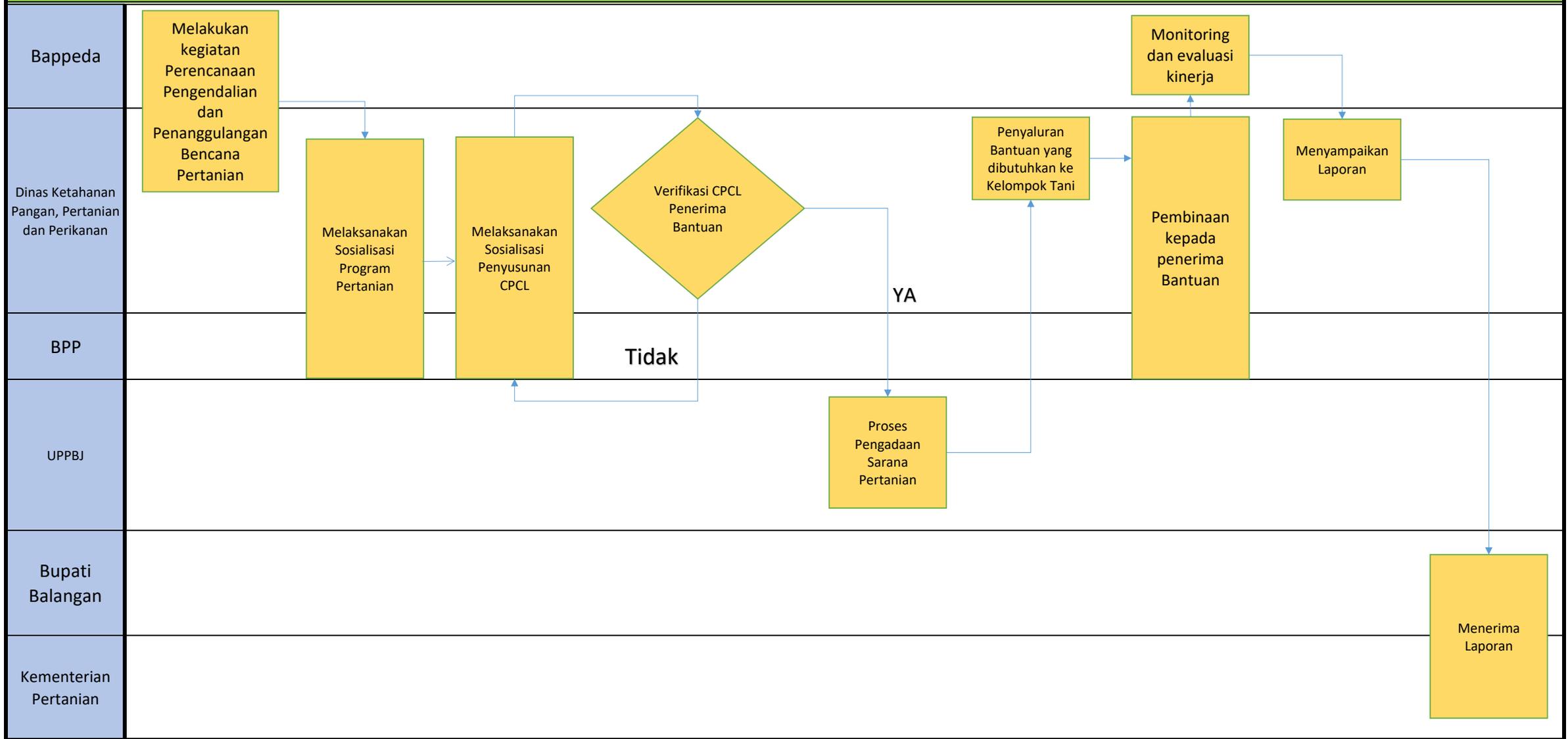
**BLG.04.06.CFM.02 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**



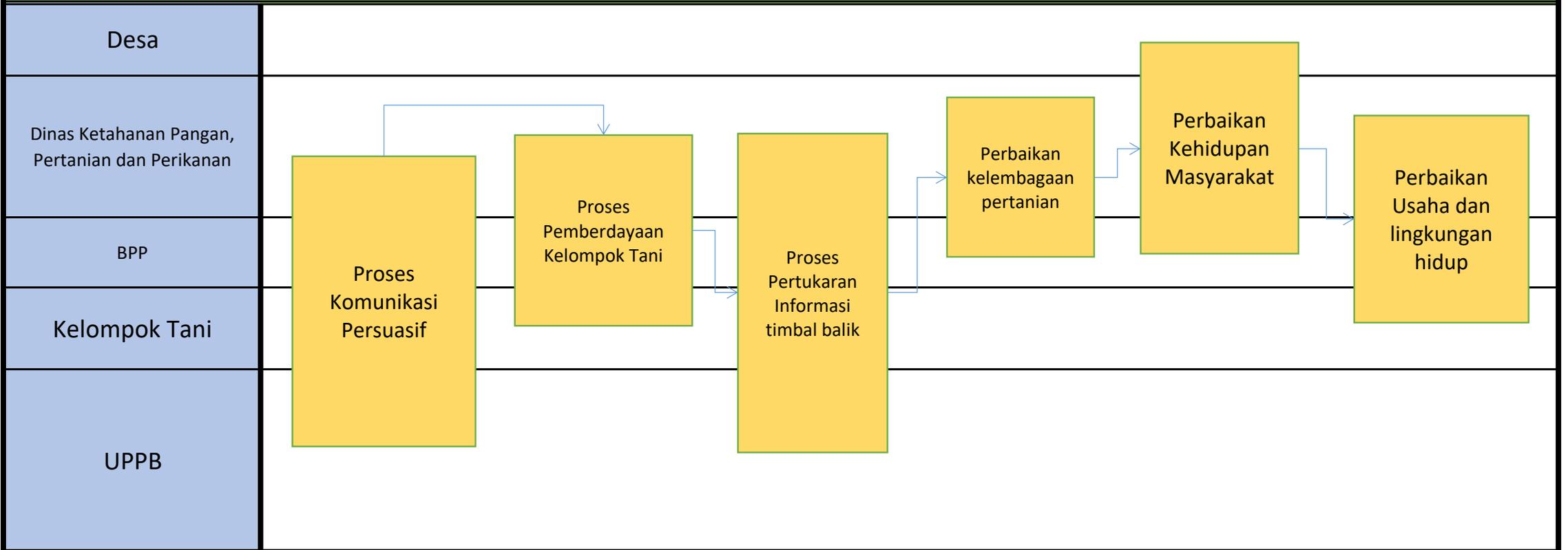
**BLG.04.06.CFM.03 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**



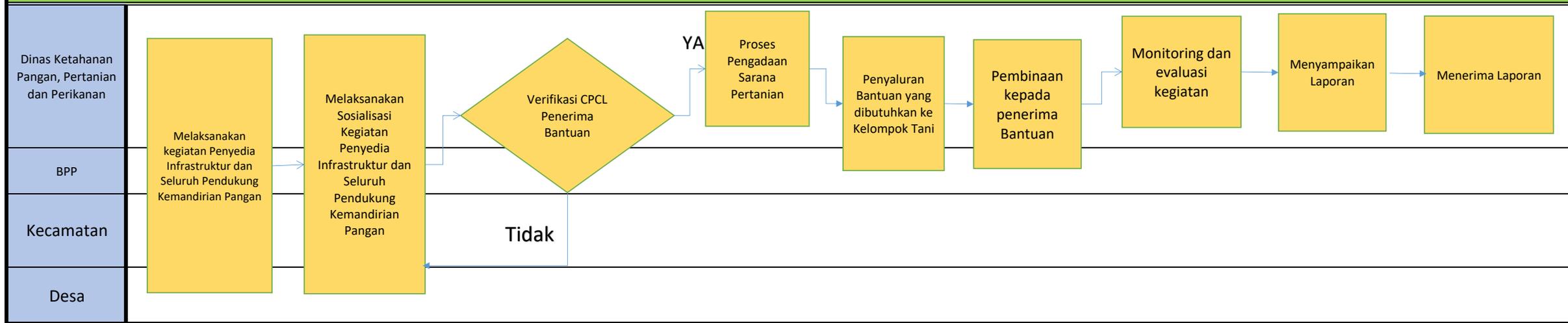
**BLG.04.07.CFM.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**



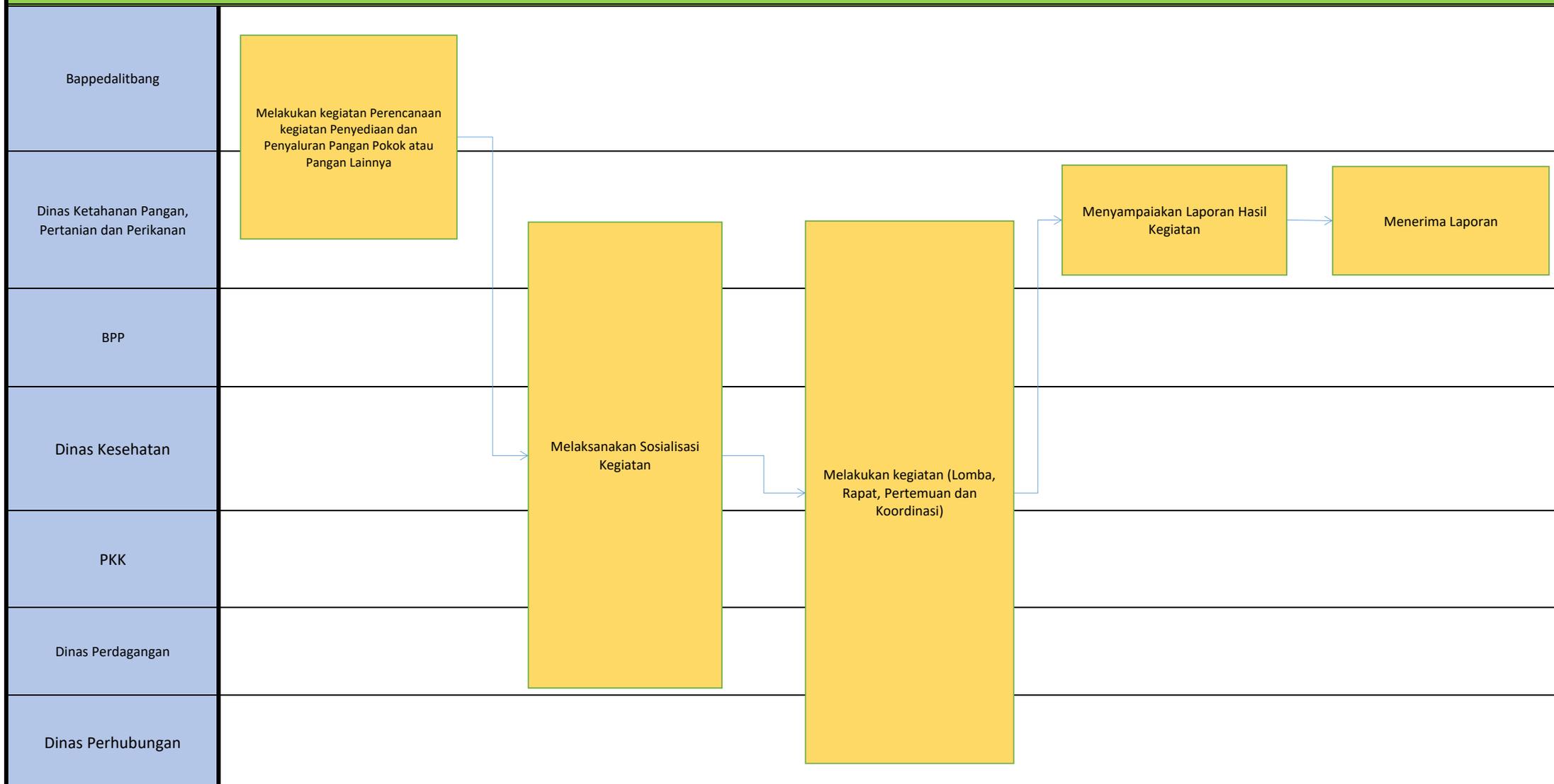
## BLG.04.08.CFM.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian



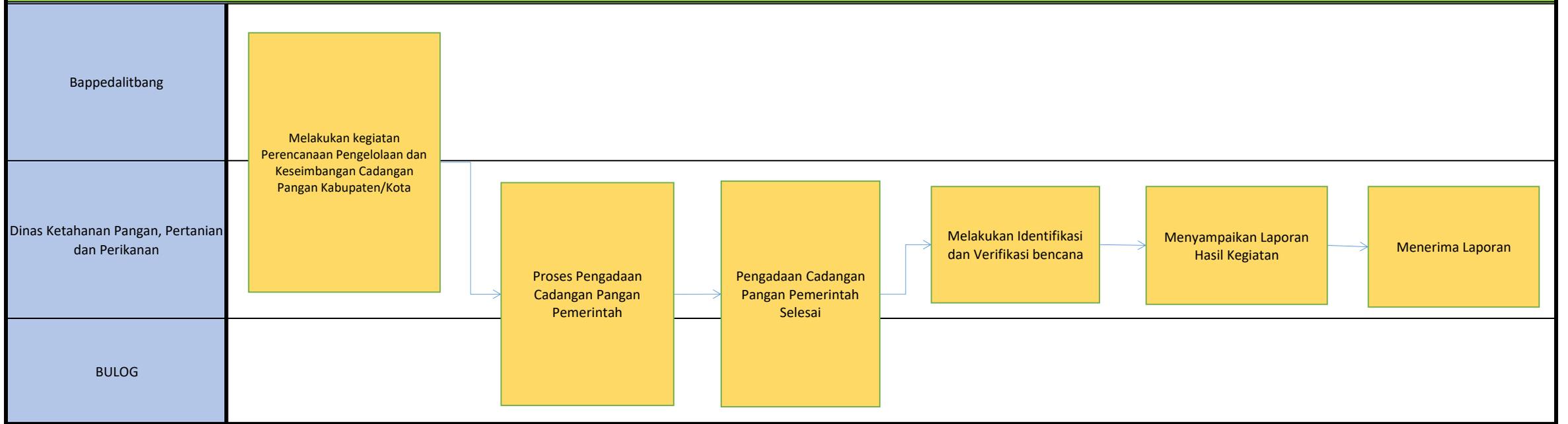
**BLG.04.09.CFM.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**



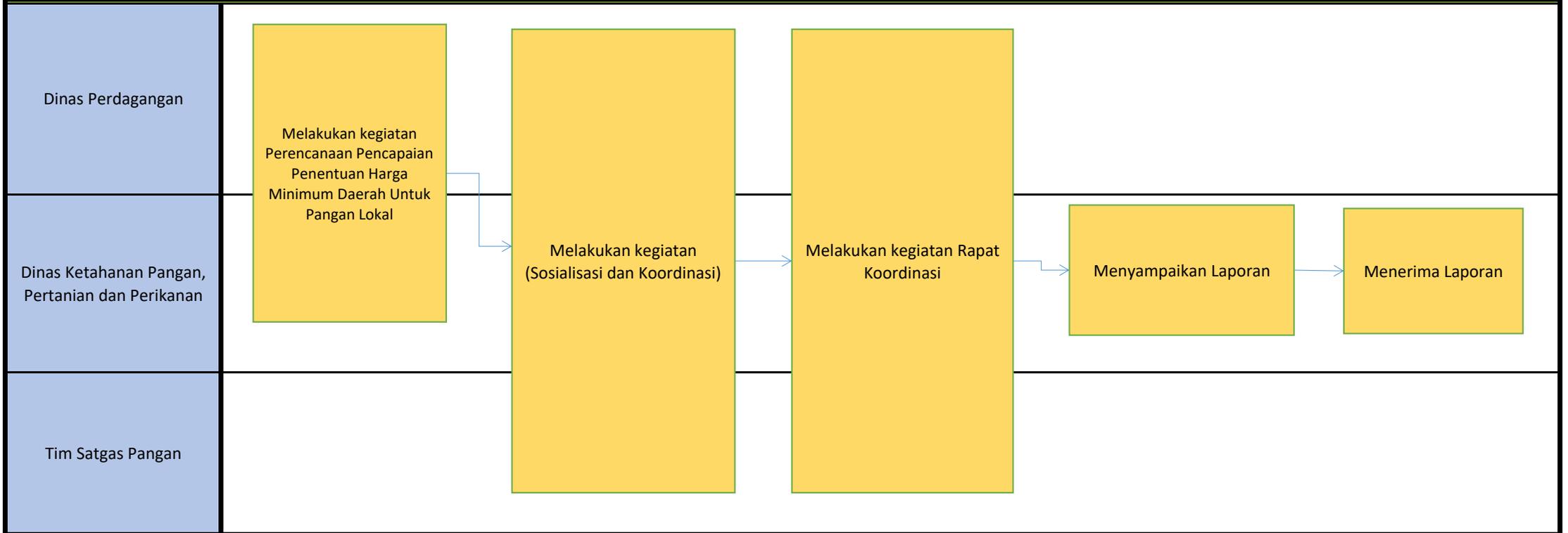
**BLG.04.10.CFM.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**



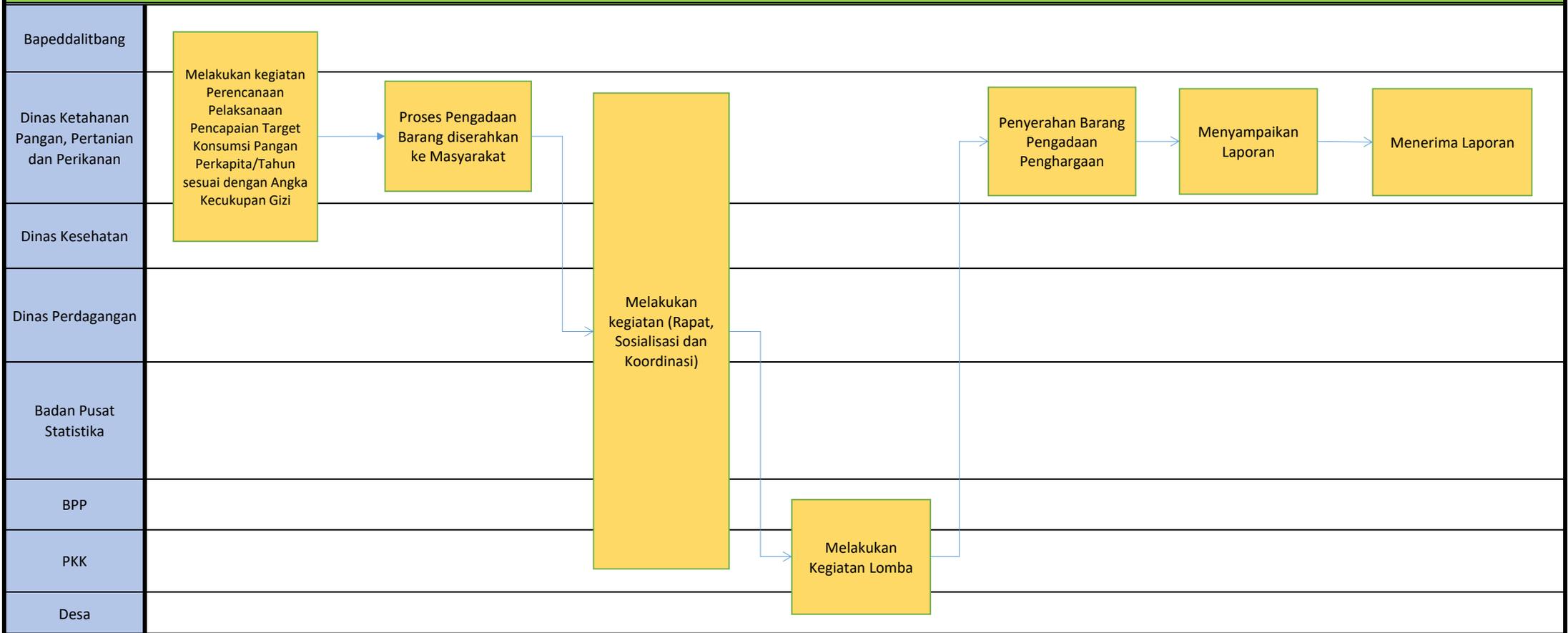
**BLG.04.10.CFM.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**



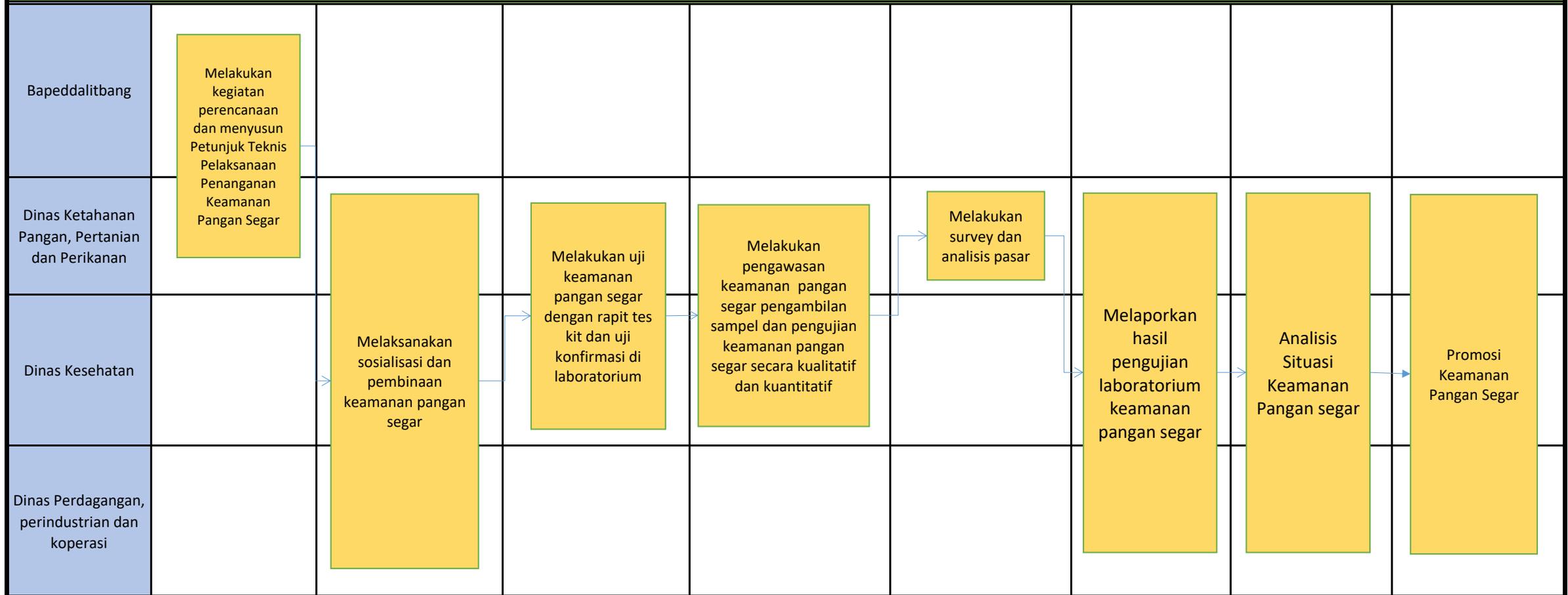
**BLG.04.10.CFM.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi**



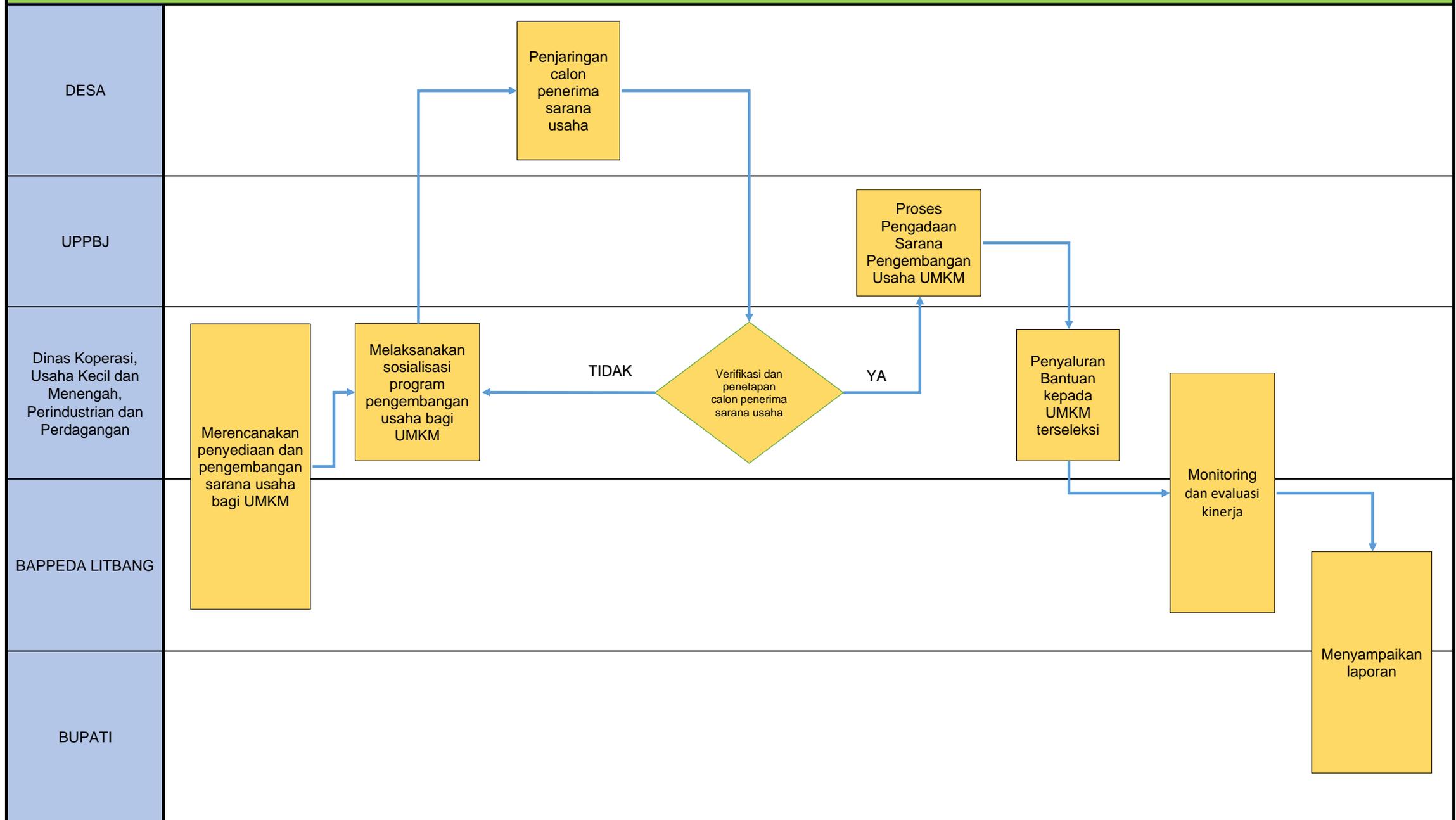
**BLG.04.10.CFM.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**



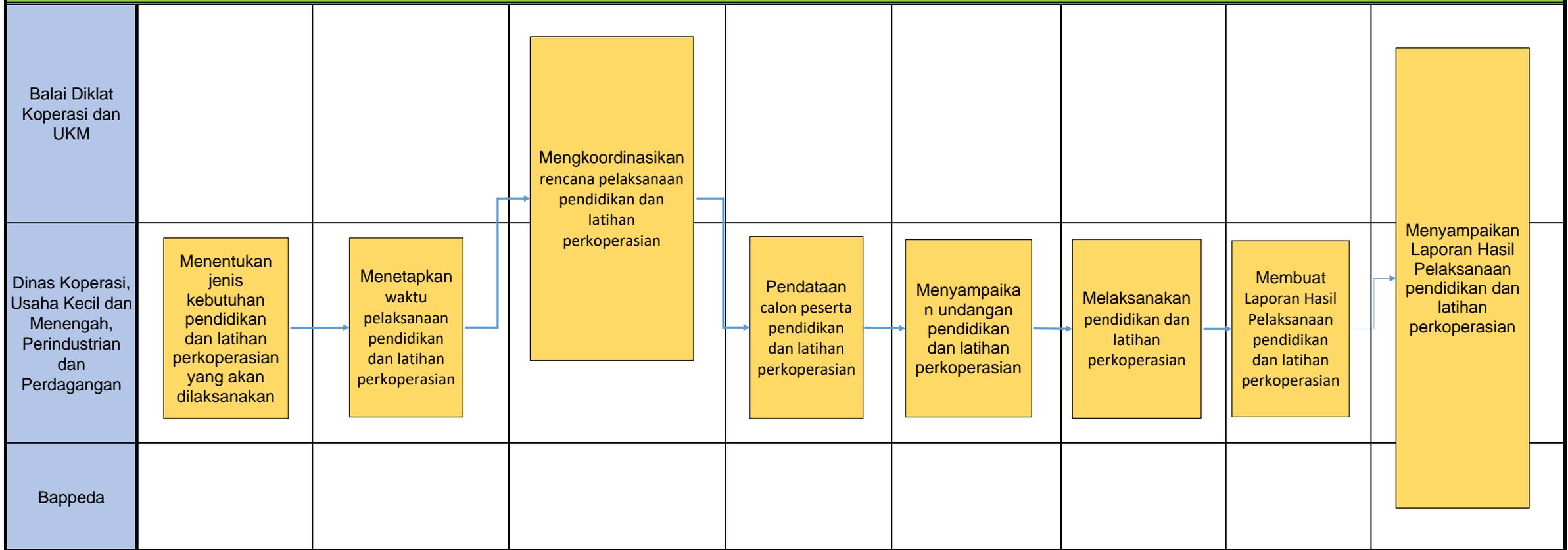
**BLG.04.11.CFM.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**



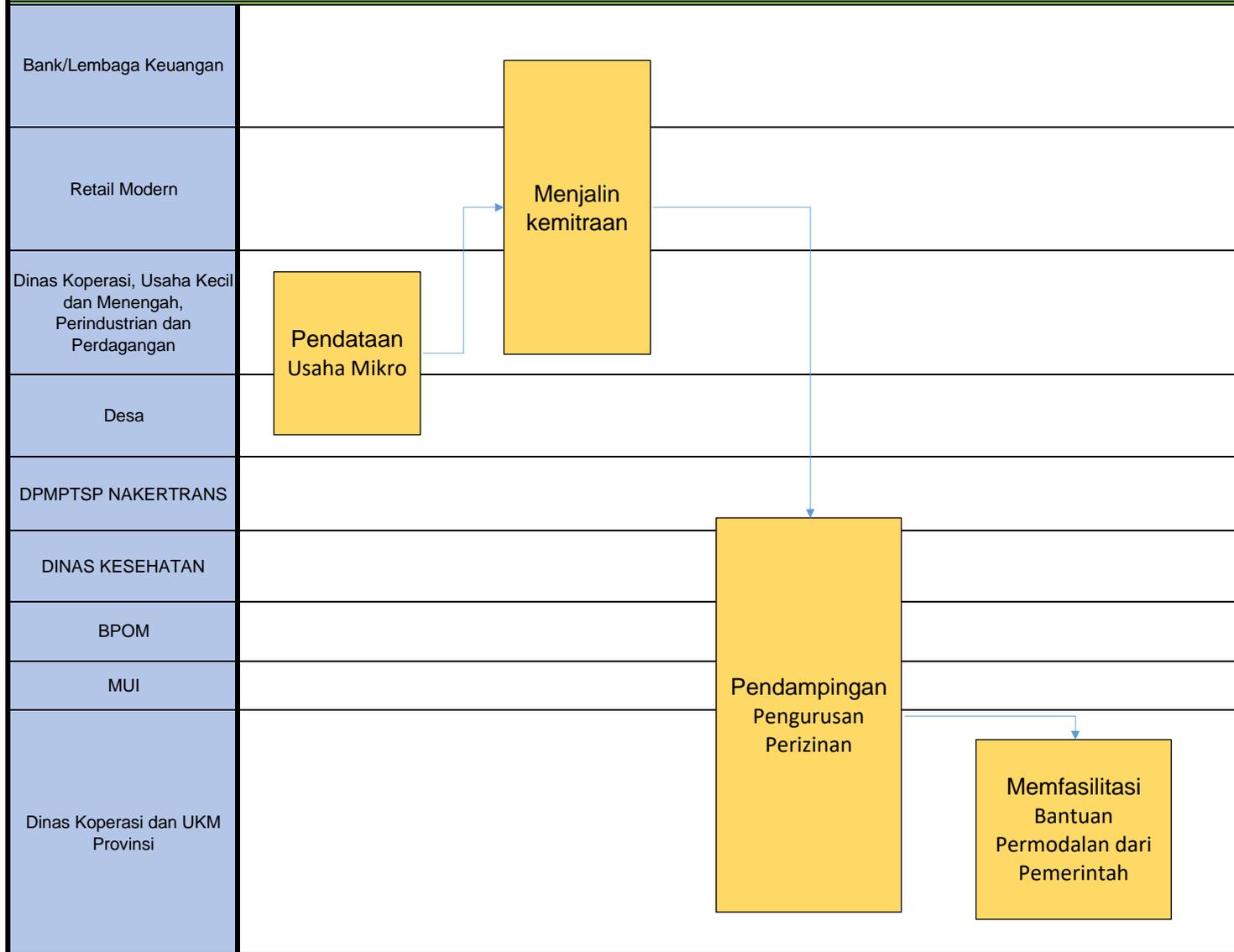
**BLG.04.12.CFM.01 Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil**



**BLG.04.13.CFM.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

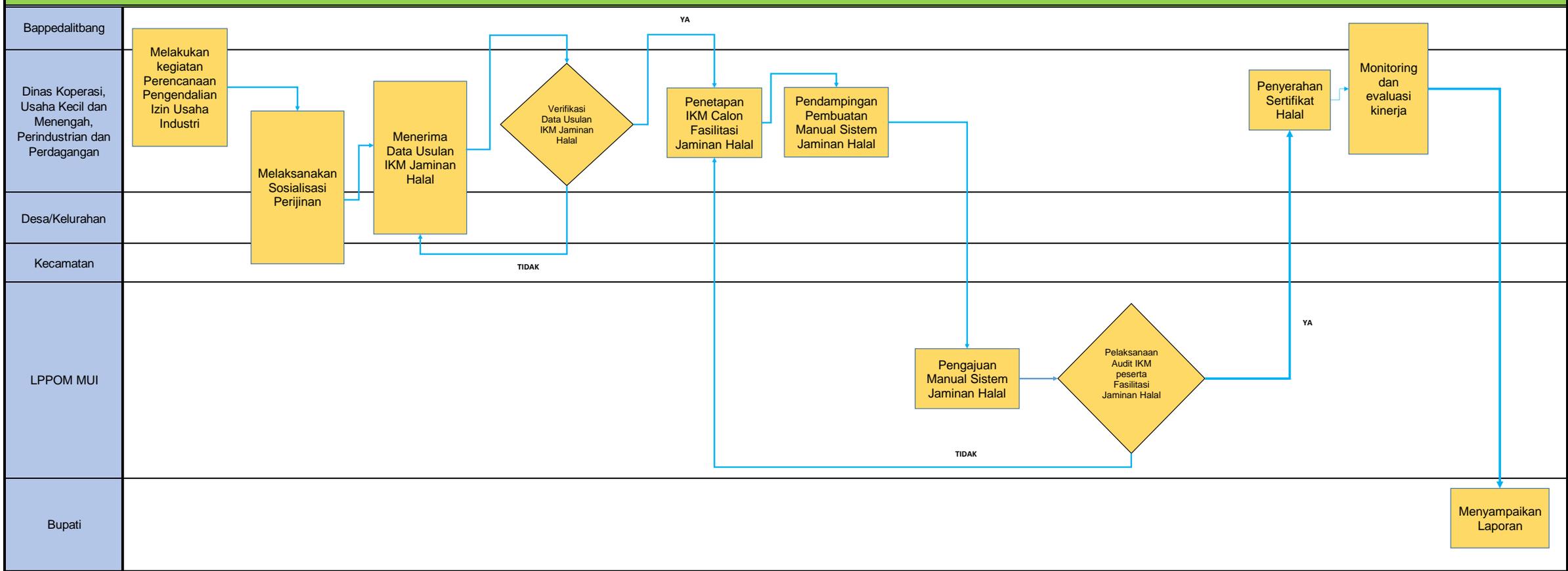


**BLG.04.14.CFM.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**

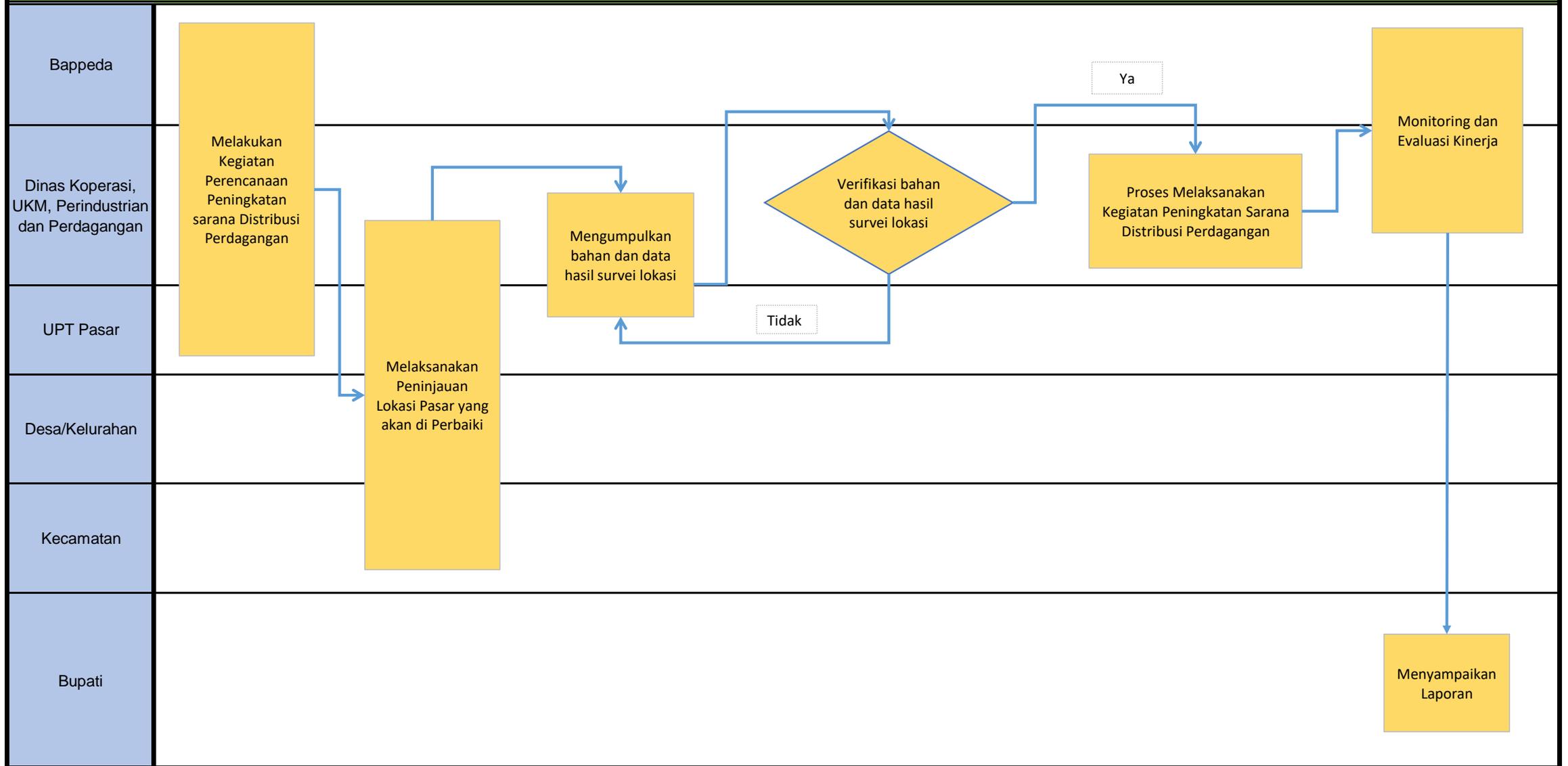




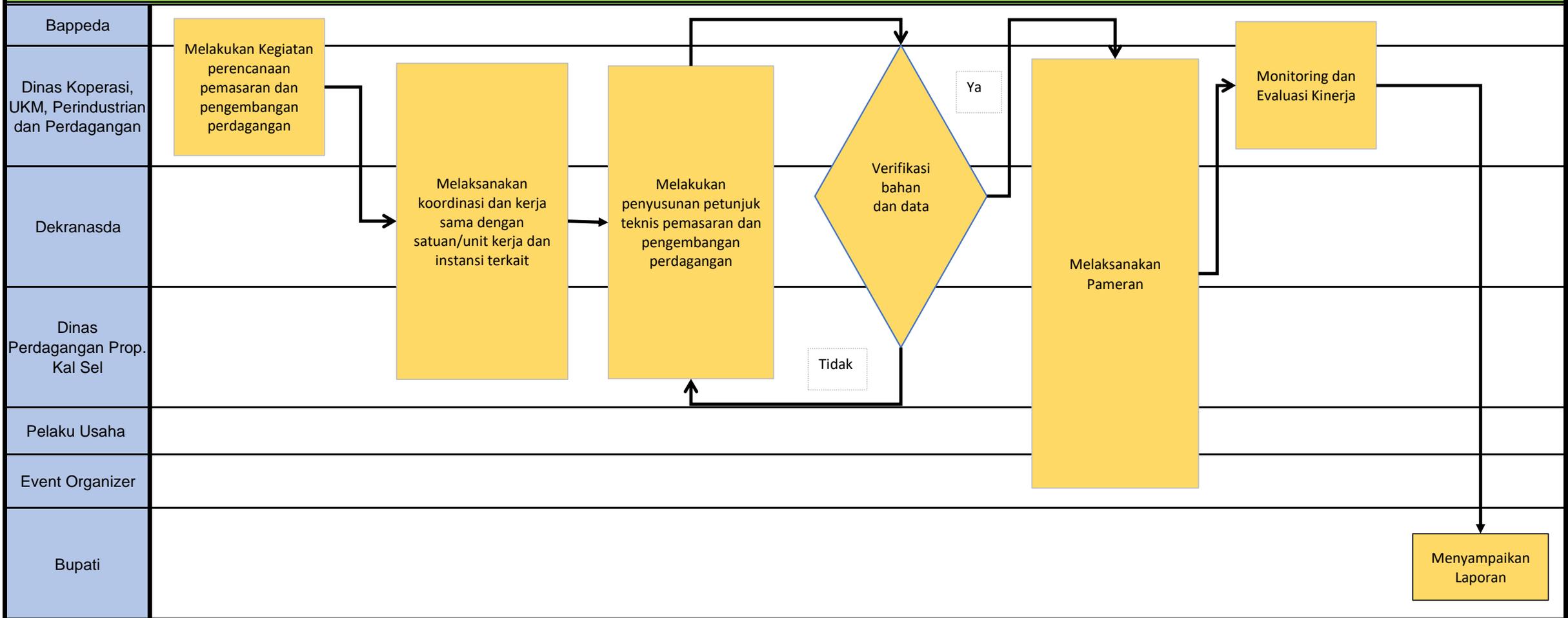
**BLG.04.06.CFM.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**



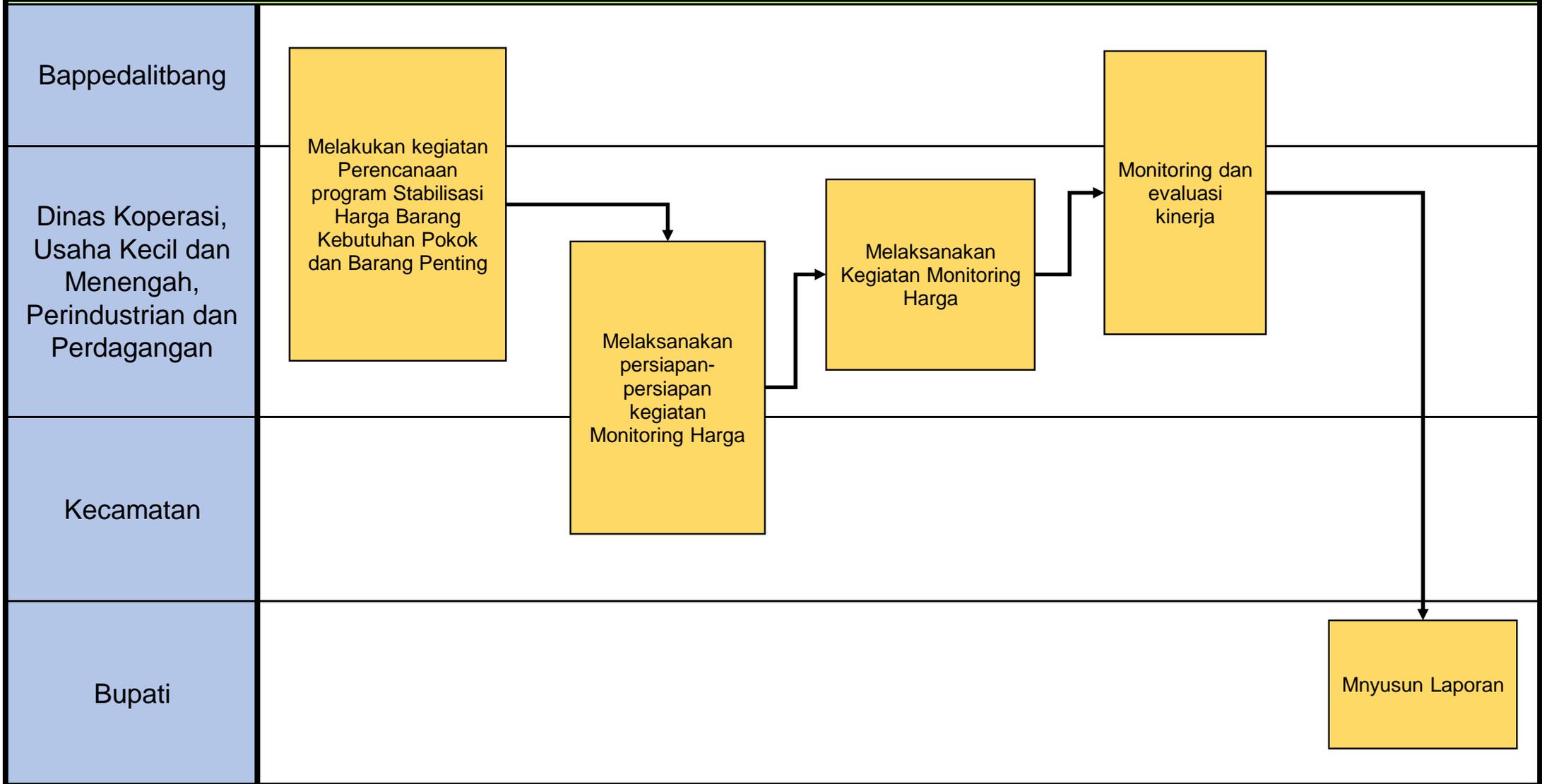
**BLG.04.17.CFM.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**



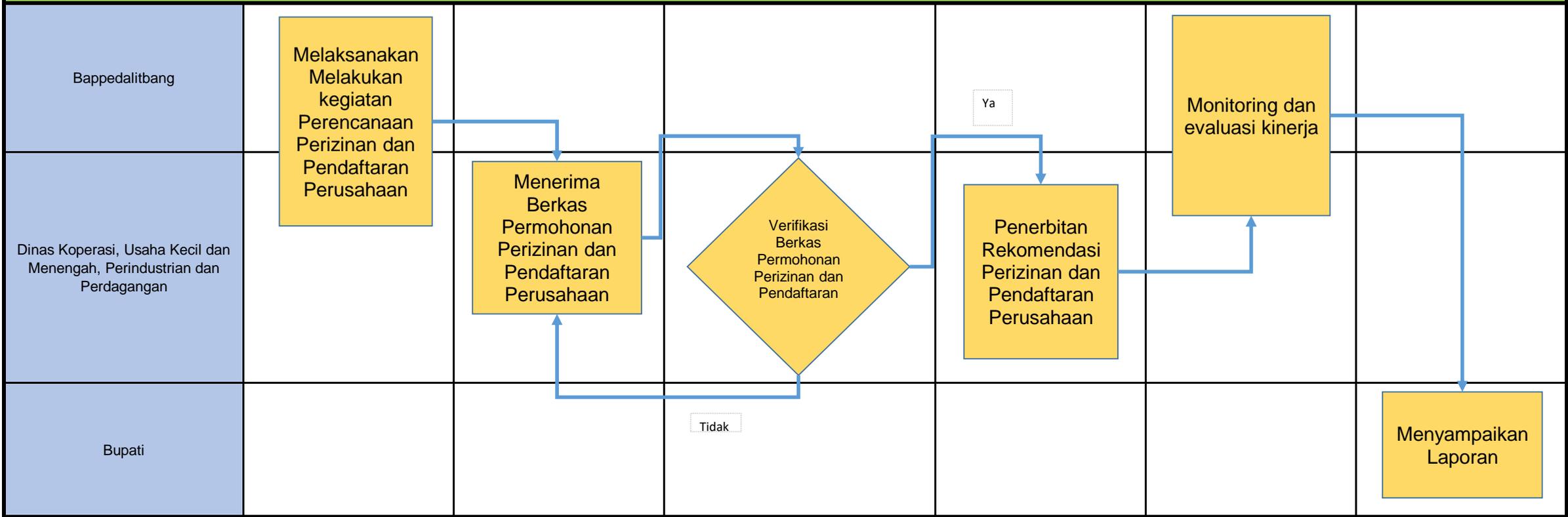
**BLG.04.18.CFM.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**



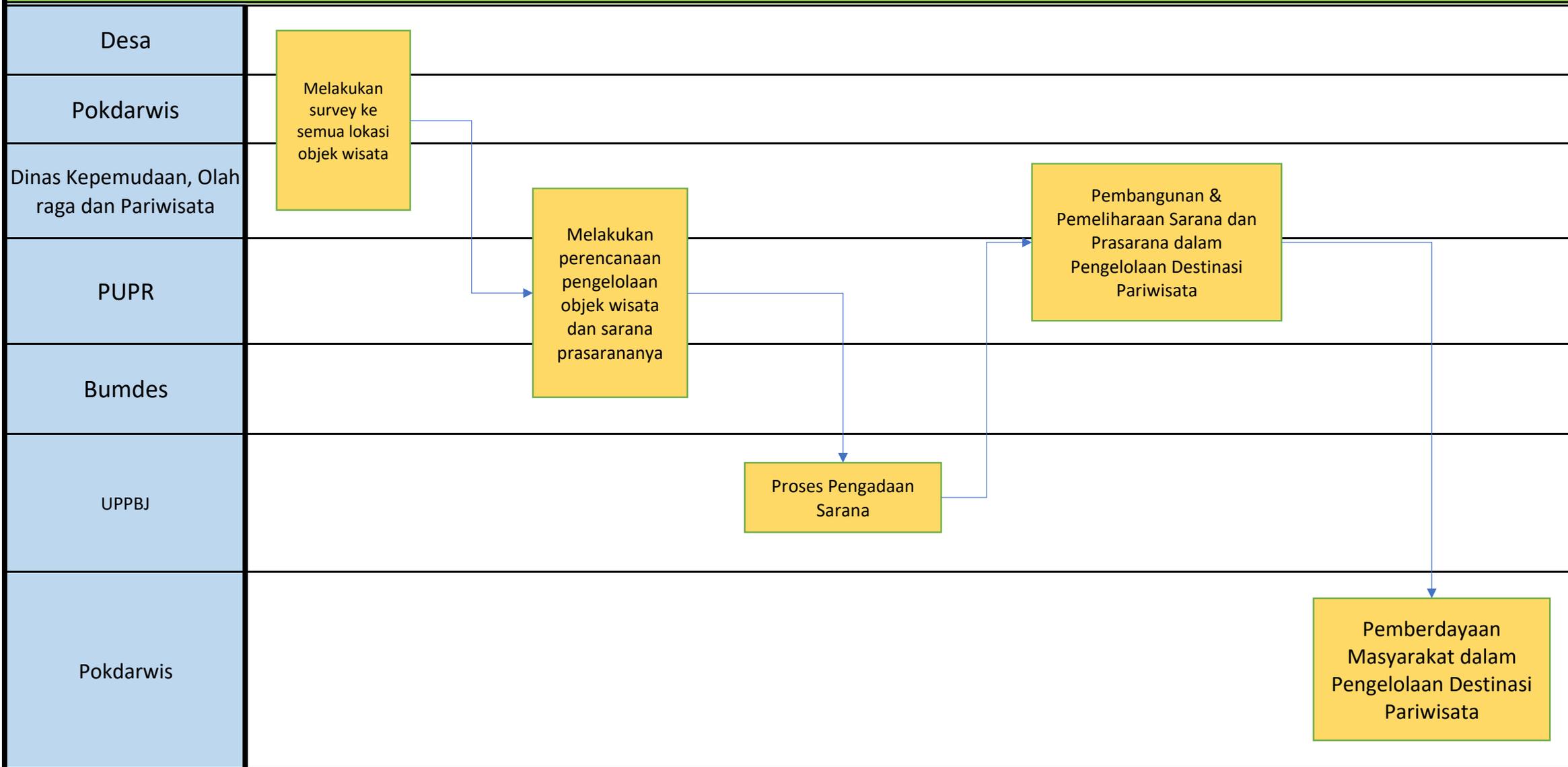
**BLG.04.19.CFM.01 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota**



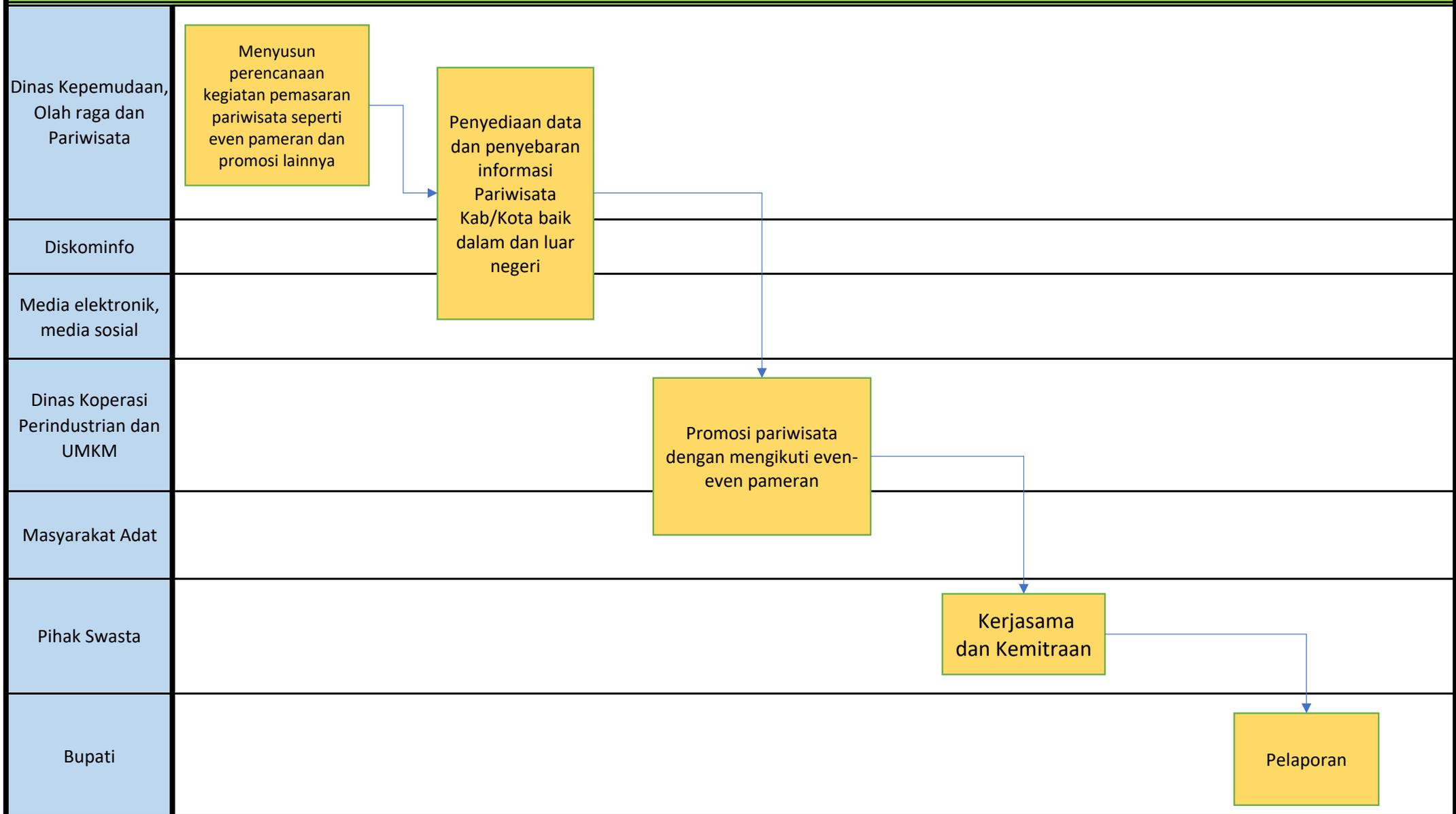
**BLG.04.12.CFM.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**



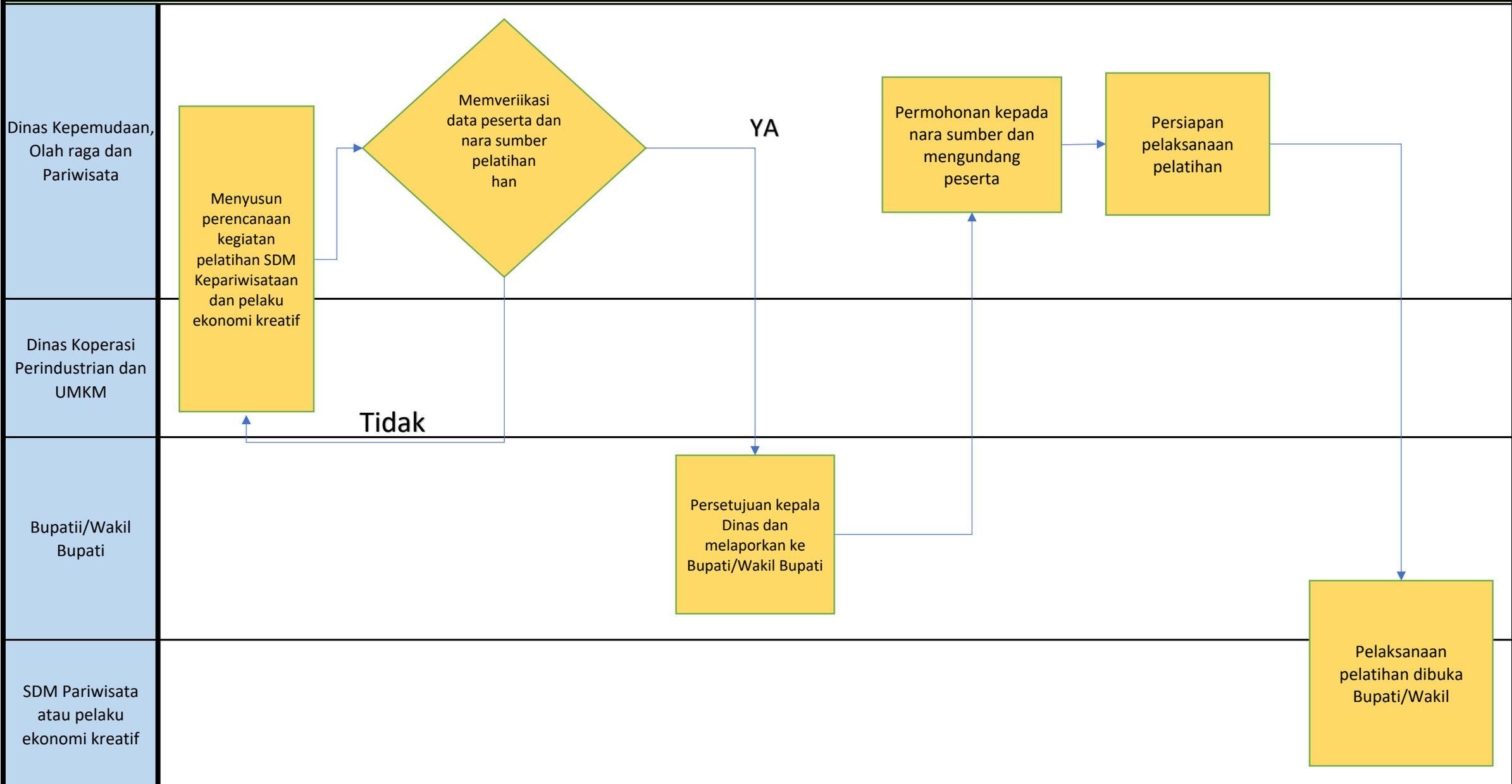
## BLG.04.21.CFM.01 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota



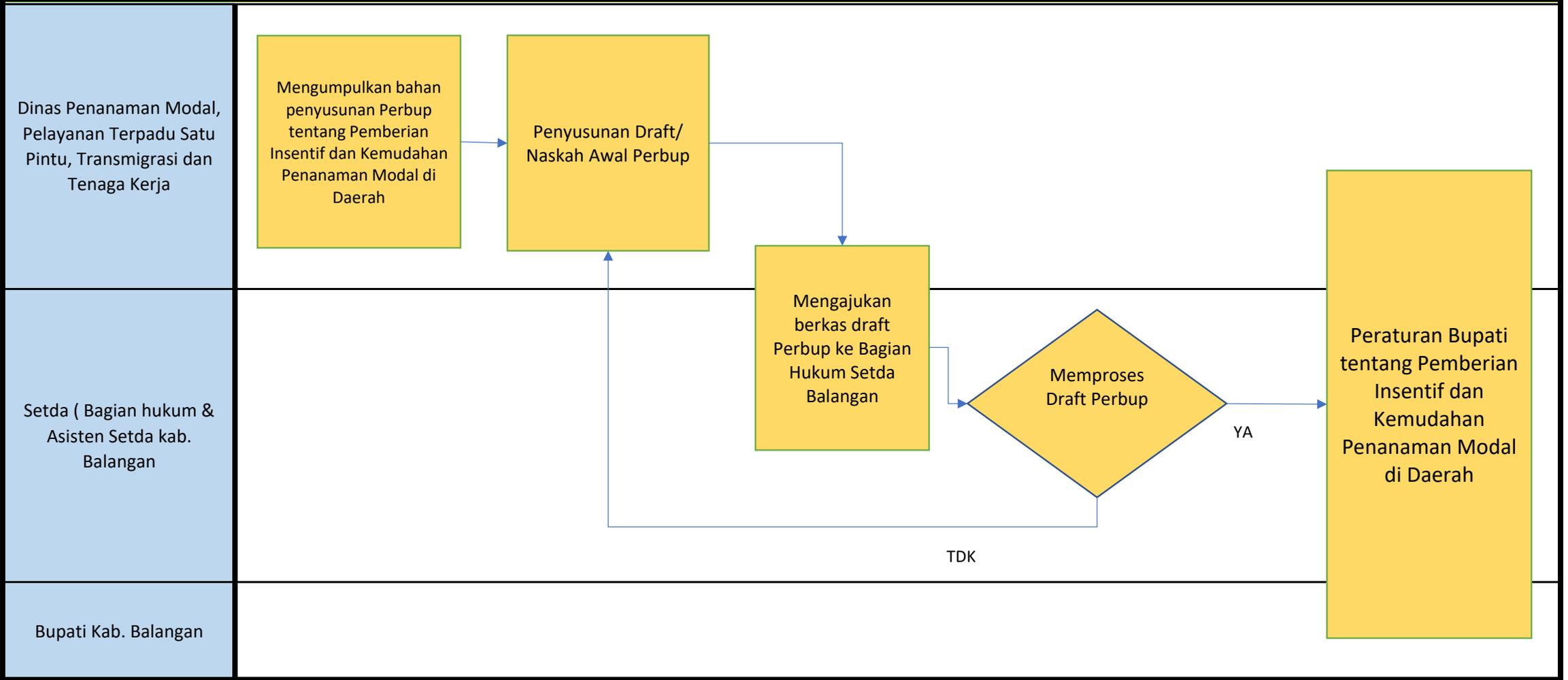
**BLG.04.22.CFM.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Wisata, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**



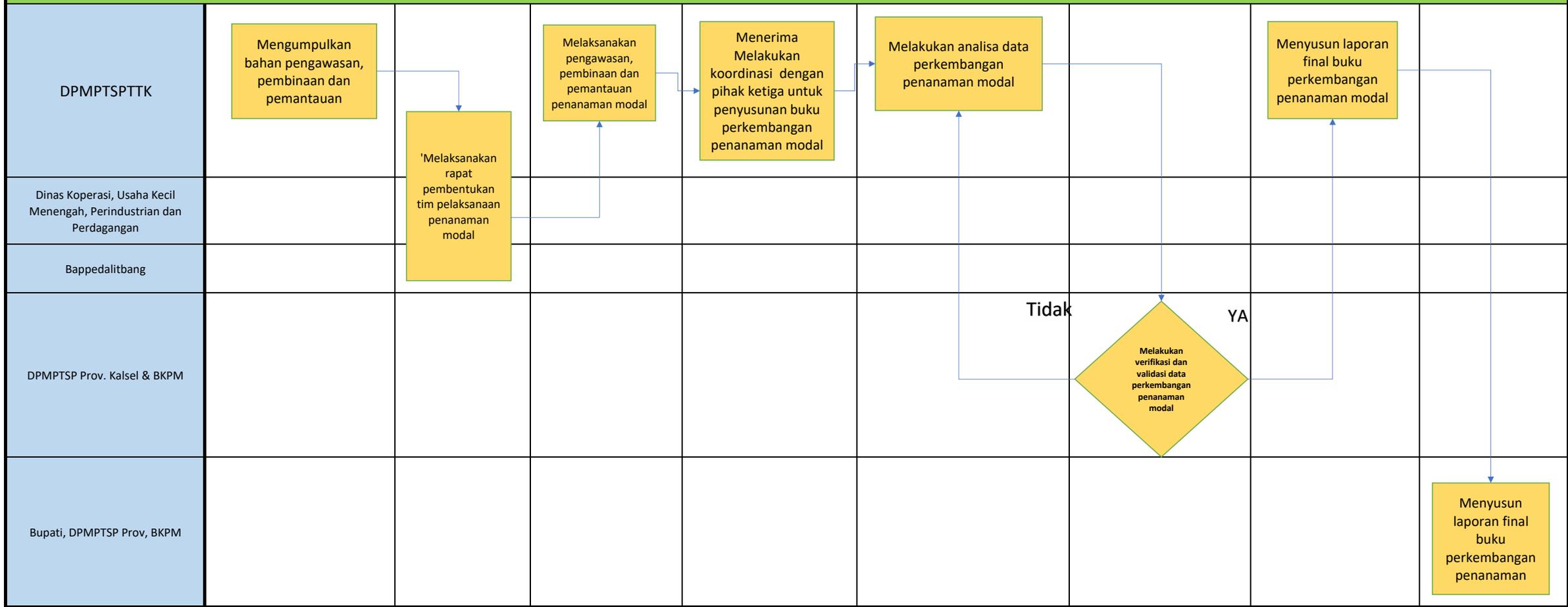
# BLG.04.23.CFM.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar



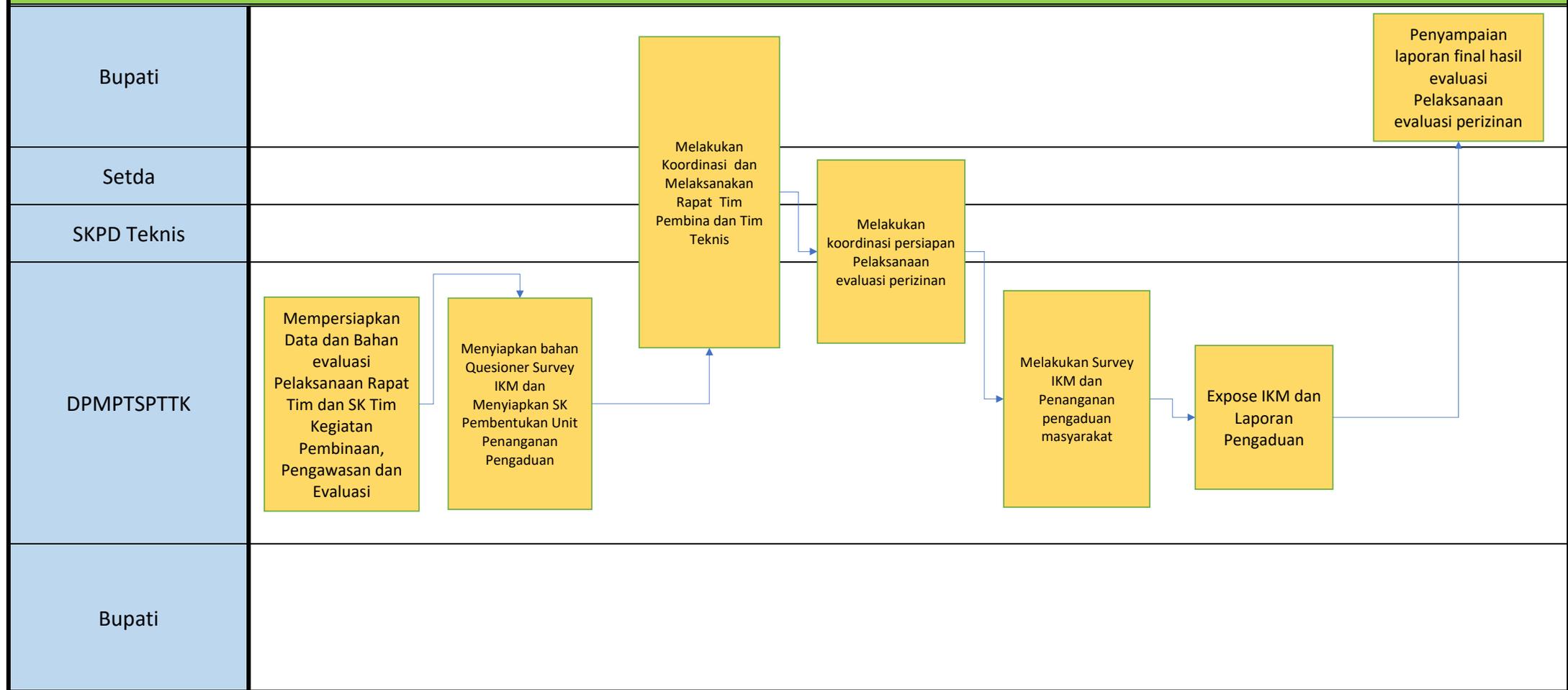
**BLG.04.24.CFM.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**



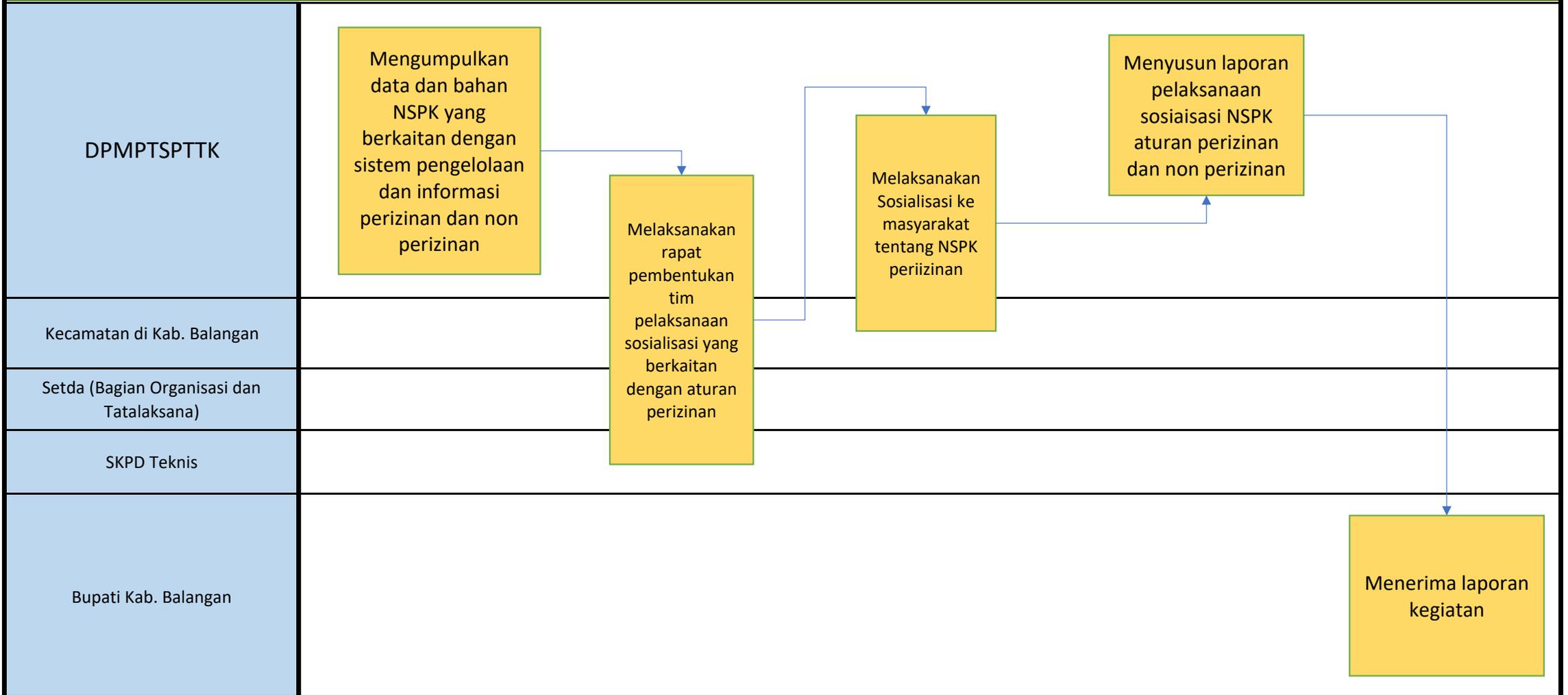
**BLG.04.25.CFM.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**



**BLG.04.26.CFM.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**



**BLG.04.27.CFM.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



## PETA RELASI BLG-04 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya

- 1) DKPPP
- 2) Bag. Hukum Setda
- 3) Pemerintah Kecamatan dan Desa
- 4) Pokdakan

### 02. Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

- 1) DKPPP
- 2) Bappedalitbang
- 3) BPP
- 4) Bag. Hukum Setda

### 03. Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- 1) DKPPP
- 2) Bappedalitbang
- 3) PKK
- 4) Pemerintahan Desa
- 5) UPT Balai Benih Ikan Lokal

### 04. Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 1) DKPPP
- 2) BPP
- 3) Pemerintah Kecamatan
- 4) UPPBJ-LPSE
- 5) Bappedalitbang
- 6) Pemerintahan Desa

### 05. Peningkatan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- 1) DKPPP
- 2) Setda
- 3) PUPRPerkim
- 4) Bappedalitbang
- 5) UPPBJ
- 6) Pemerintan Kecamatan dan Desa
- 7) Polres Balangan
- 8) BPP
- 9) Kejaksaan Negeri
- 10) Tim Apresial Tanah

### 06. Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 1) DKPPP
- 2) Bappedalitbang
- 3) Pemerintah Kecamatan dan Desa
- 4) BPP

**07. Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

- 1) DKPPP
- 2) Bappedalitbang
- 3) BPP
- 4) UPPBJ

**08. Peningkatan Penyuluhan Pertanian**

- 1) DKPPP
- 2) UPBBJ
- 3) Kelompok Tani
- 4) BPP

**09. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**

- 1) DKPPP
- 2) BPP
- 3) Pemerintah Kecamatan dan Desa

**10. Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

- 1) DKPPP
- 2) Bappedalitbang
- 3) BPP
- 4) DinkesPPKB
- 5) PKK
- 6) Dinas Koperasi, UMK & Perdagangan
- 7) Dishub
- 8) BPS
- 9) Pemerintah Desa

**11. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan**

- 1) DKPPP
- 2) Bappedalitbang
- 3) DinkesPPKB
- 4) Dinas Koperasi, UMK & Perdagangan

**12. Peningkatan Pengembangan UMKM**

- 1) Dinas Koperasi, UMK & Perdagangan
- 2) Pemerintah Desa
- 3) UPPBJ
- 4) Bappedalitbang

**13. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) Balai Diklat Koperasi & UKM
- 3) Bappedalitbang

**14. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)**

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) DPMPTSP
- 3) DinkesPPKB
- 4) Pemerintahan Desa
- 5) BPOM
- 6) MUI

**15. Peningkatan Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) Bappedalitbang

**16. Peningkatan Pengendalian Izin Usaha Industri**

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) Bappedalitbang
- 3) Pemerintah Kecamatan
- 4) LPPOM MUI

**17. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) Bappedalitbang
- 3) UPT Pasar
- 4) Pemerintah Desa

**18. Peningkatan Pengembangan Ekspor**

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) Bappedalitbang
- 3) Deskranasda

### 19. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) Bappedalitbang
- 3) Pemerintah Kecamatan

### 20. Peningkatan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- 1) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan
- 2) Bappedalitbang
- 3) PUPRPerkim
- 4) Dinas LH & Pertanahan
- 5) Pemerintah Kecamatan
- 6) BPKPAD
- 7) DPMPTSP

### 21. Peningkatan Daya Tarik Wisata

- 1) Disporapar
- 2) Pemerintahan Kecamatan/Desa
- 3) DPUPRPerkim
- 4) UPPBJ
- 5)

### 22. Peningkatan Pemasaran Pariwisata

- 1) Disporapar
- 2) Diskominfo
- 3) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian & Perdagangan

### 23. Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- 1) Disporapar
- 2) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian & Perdagangan

### 24. Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- 1) DPMPTSP
- 2) Bag. Hukum dan Asisten Setda Balangan

### 25. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1) DPMPTSP
- 2) Bag. Organisasi Setda Balangan
- 3) Bappedalitbang
- 4) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian & Perdagangan

### 26. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

- 1) DPMPTSP
- 2) SKPD Teknis
- 3) Pemerintah Kecamatan

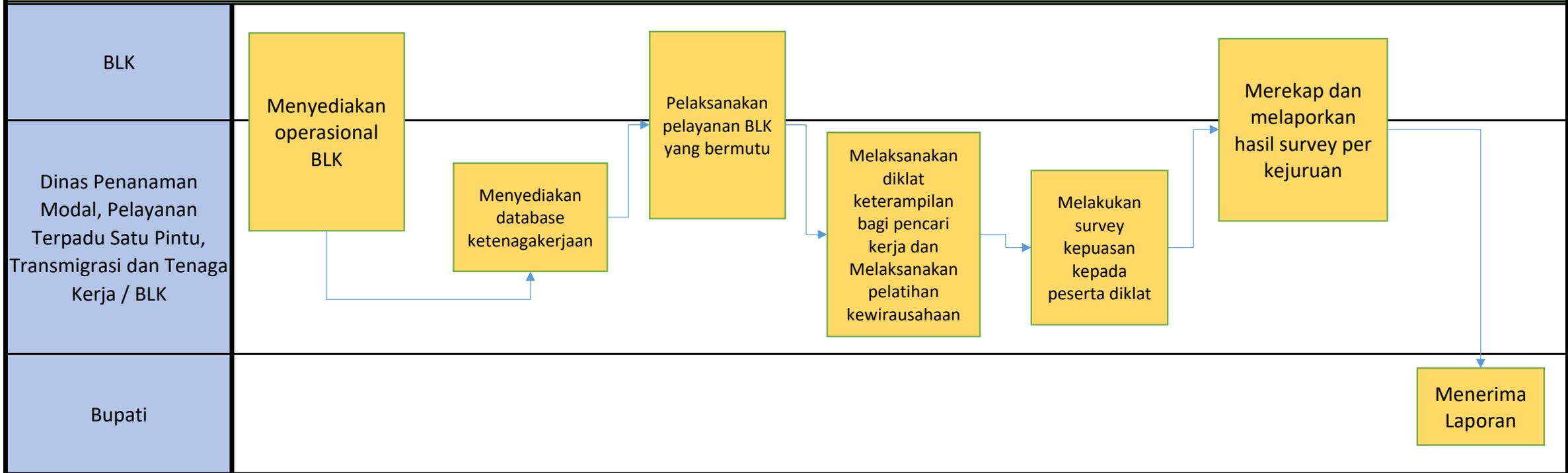
### 27. Peningkatan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- 1) DPMPTSP
- 2) Bag. Organisasi Setda Balangan
- 3) SKPD Teknis
- 4) Pemerintah Kecamatan

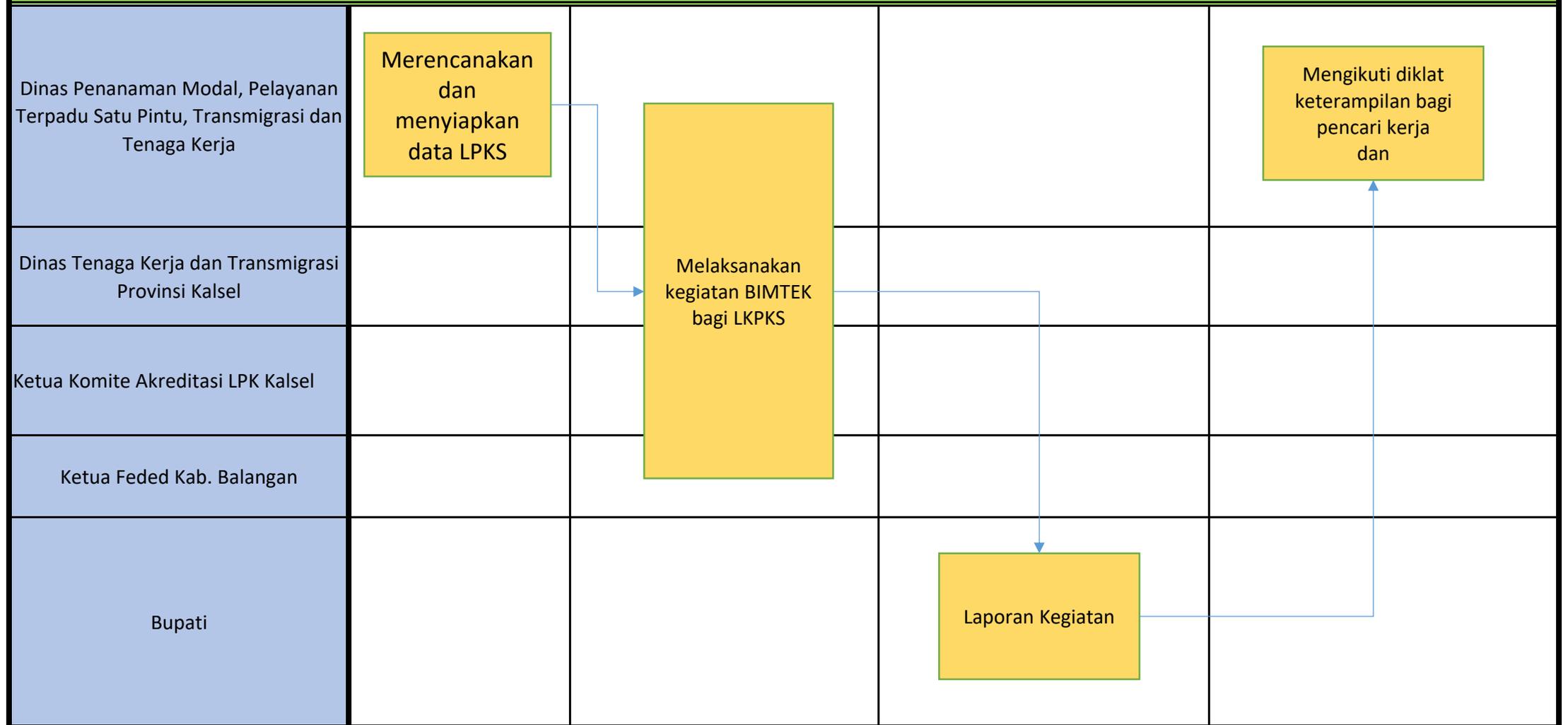
# PETA SUB PROSES



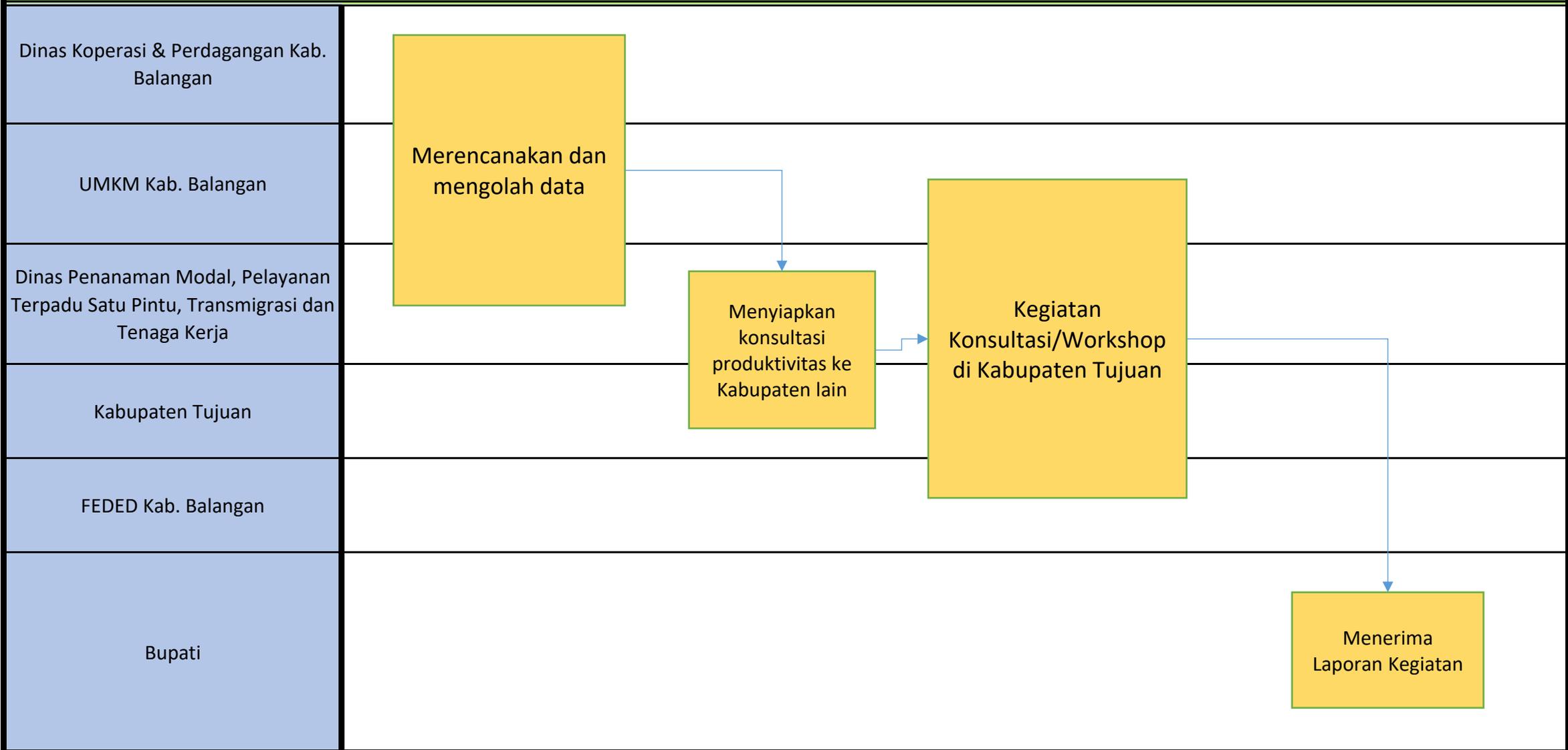
## BLG.05.01.CFM.01 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi



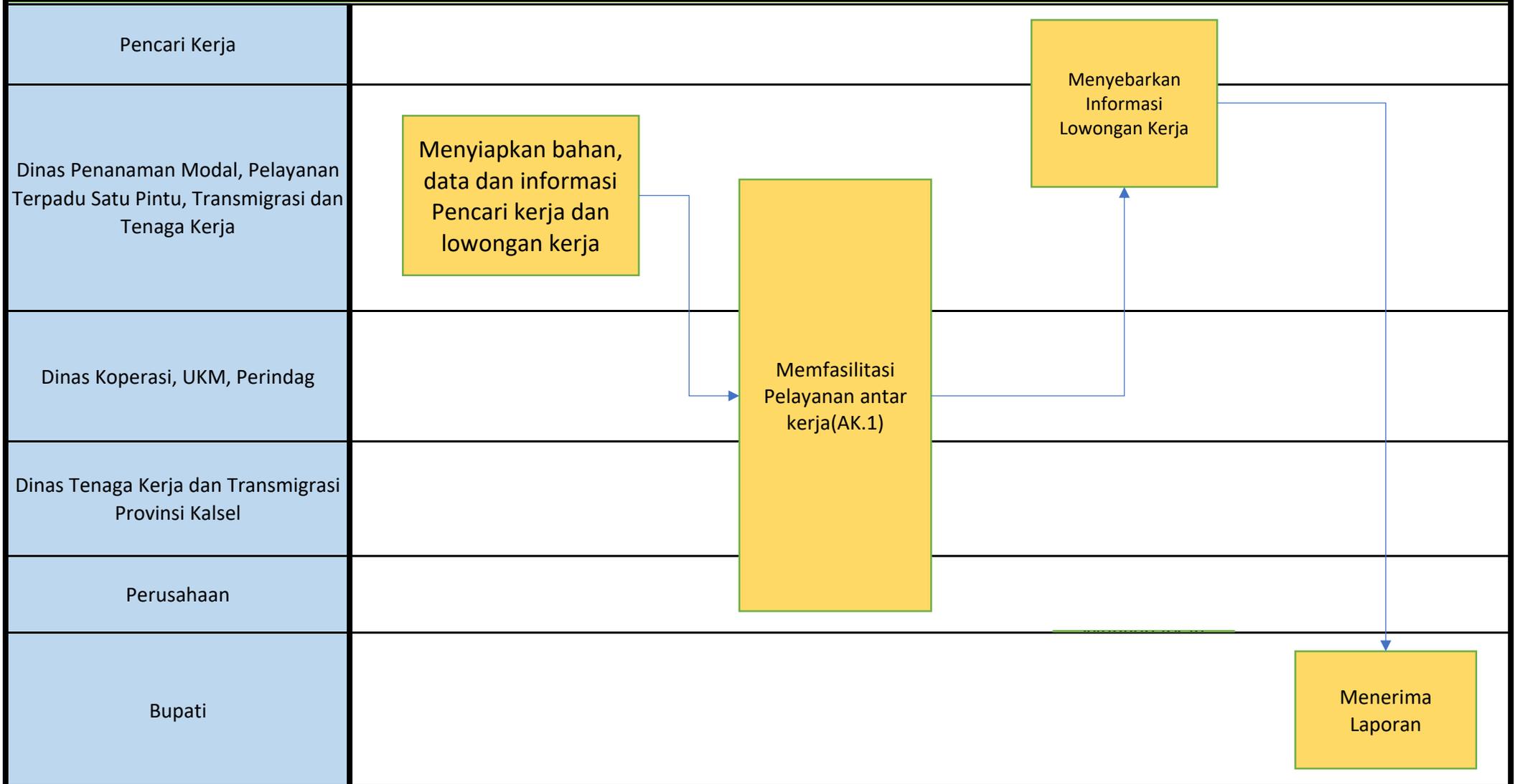
## BLG.05.01.CFM.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta



## BLG.05.01.CFM.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

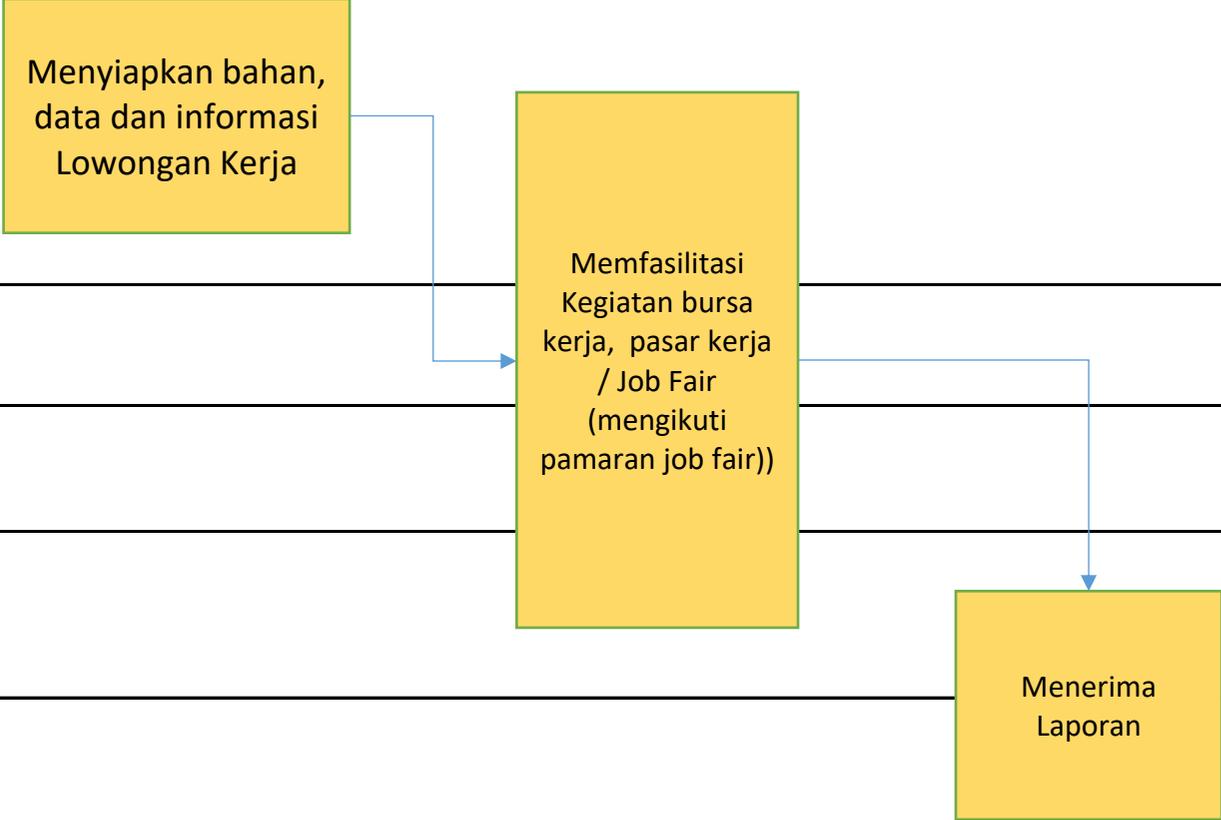


## BLG.05.02.CFM.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

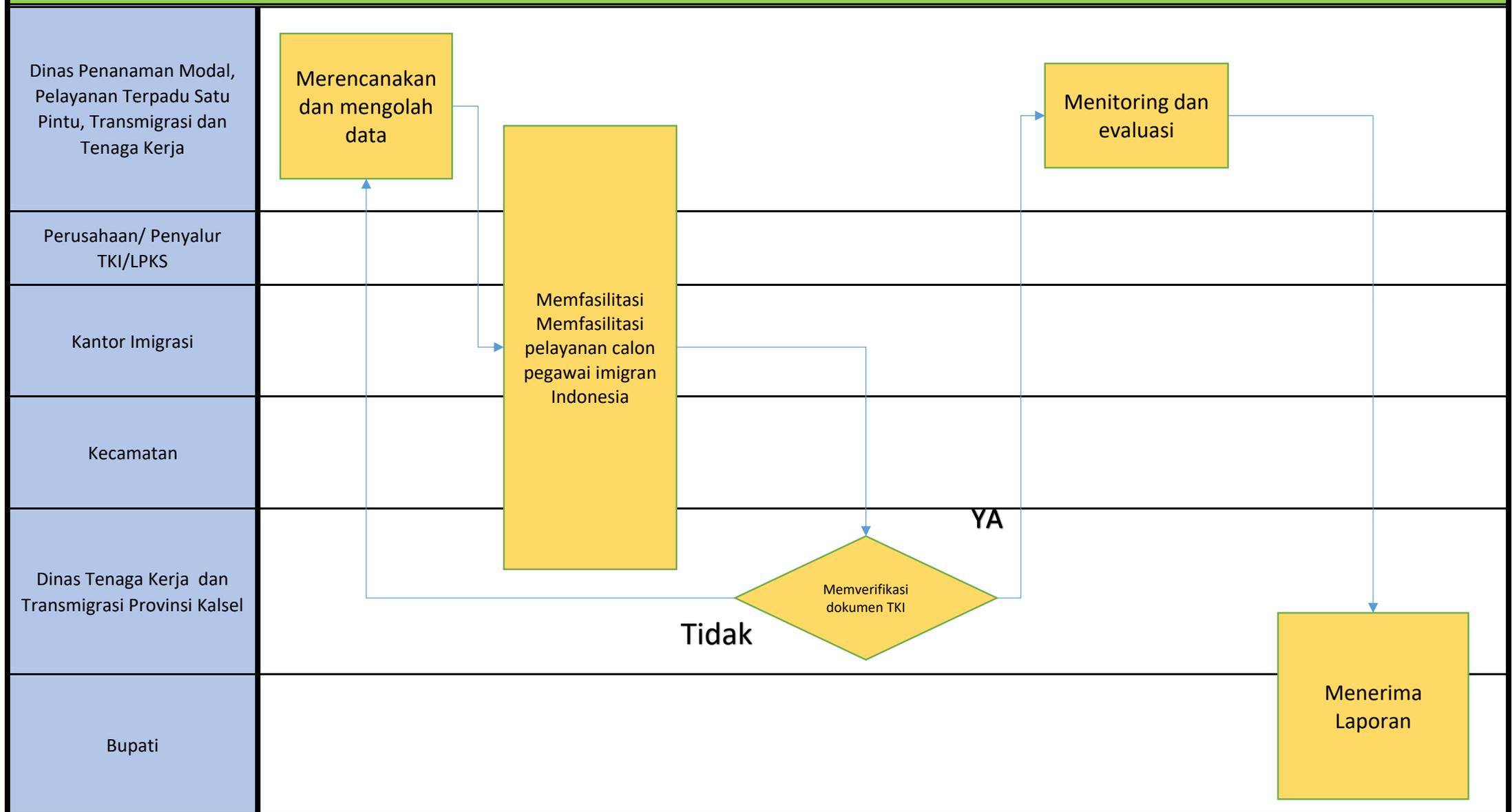


**BLG.05.02.CFM.02 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Perusahaan
Dinas Perdagangan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel
Bupati



## BLG.05.02.CFM.03 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota



## PETA RELASI BLG-05 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja

- 1) DPMPTSPPTK
- 2) BLK
- 3) Komite Akreditasi LPK Kalsel
- 4) Feded Kab. Balangan
- 5) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan

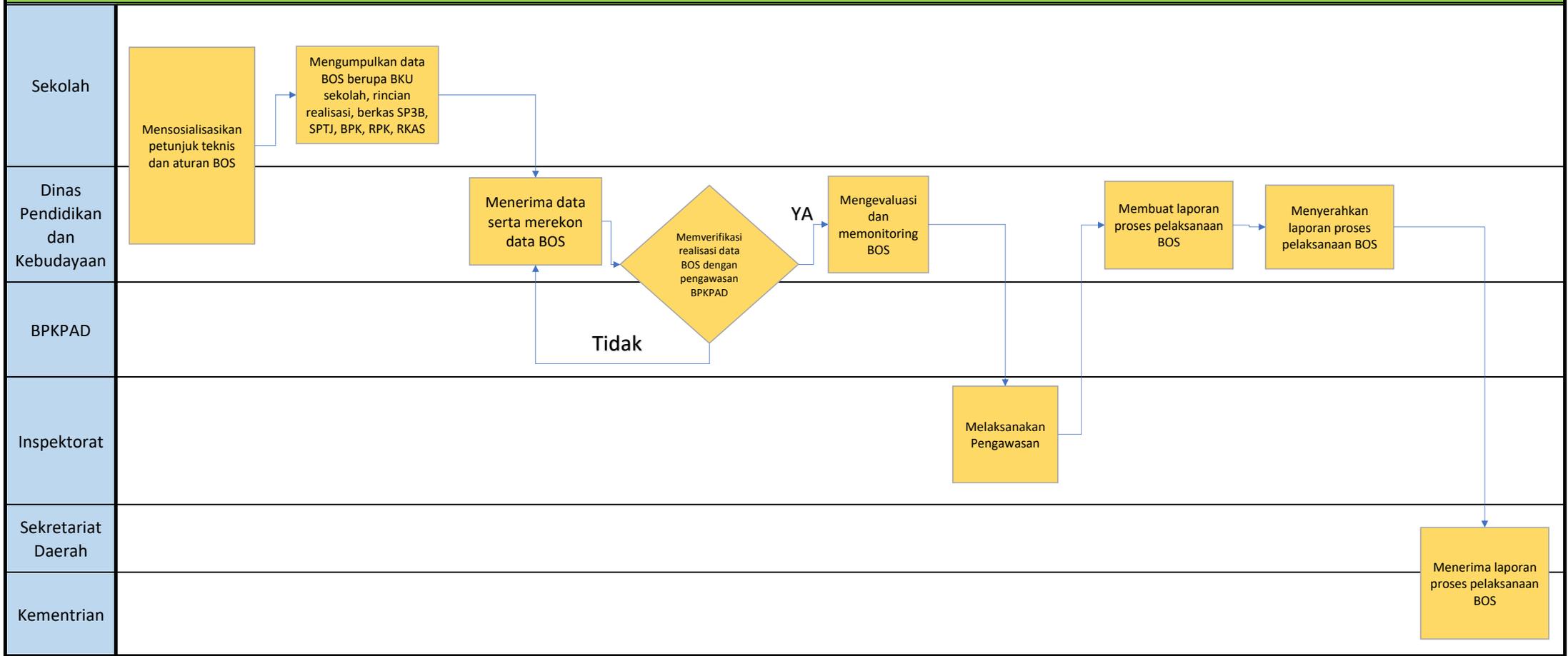
### 02. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja

- 1) DPMPTSPPTK
- 2) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan

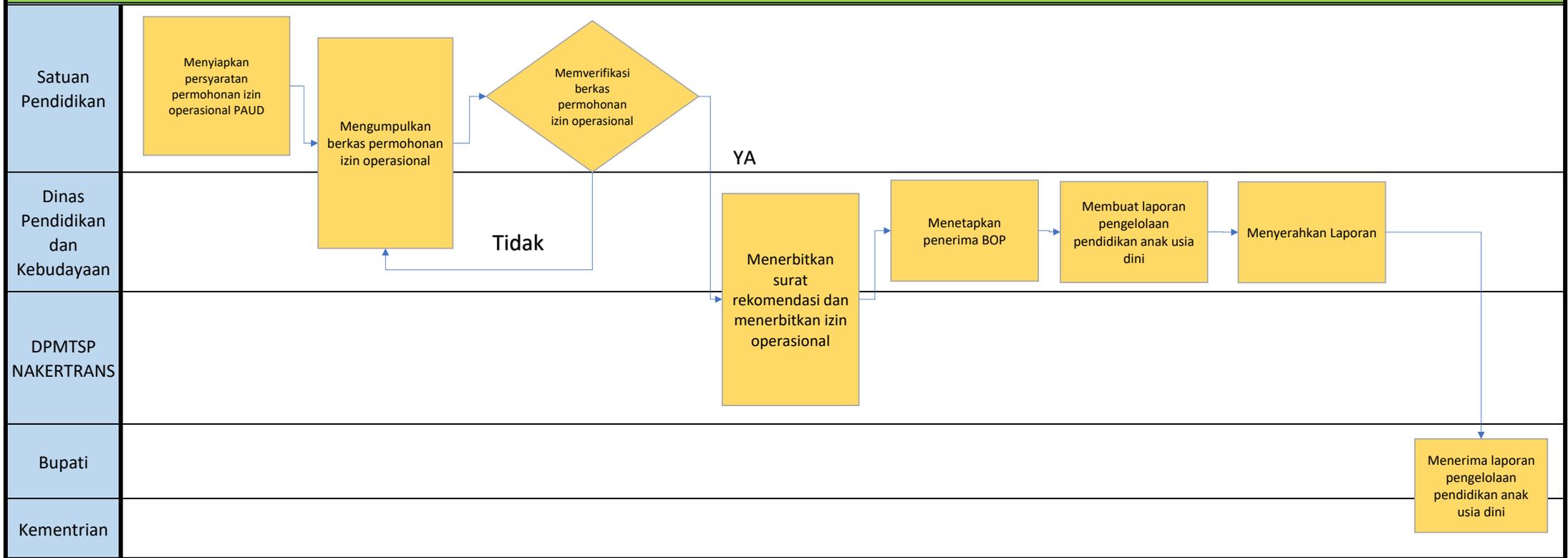
# PETA SUB PROSES



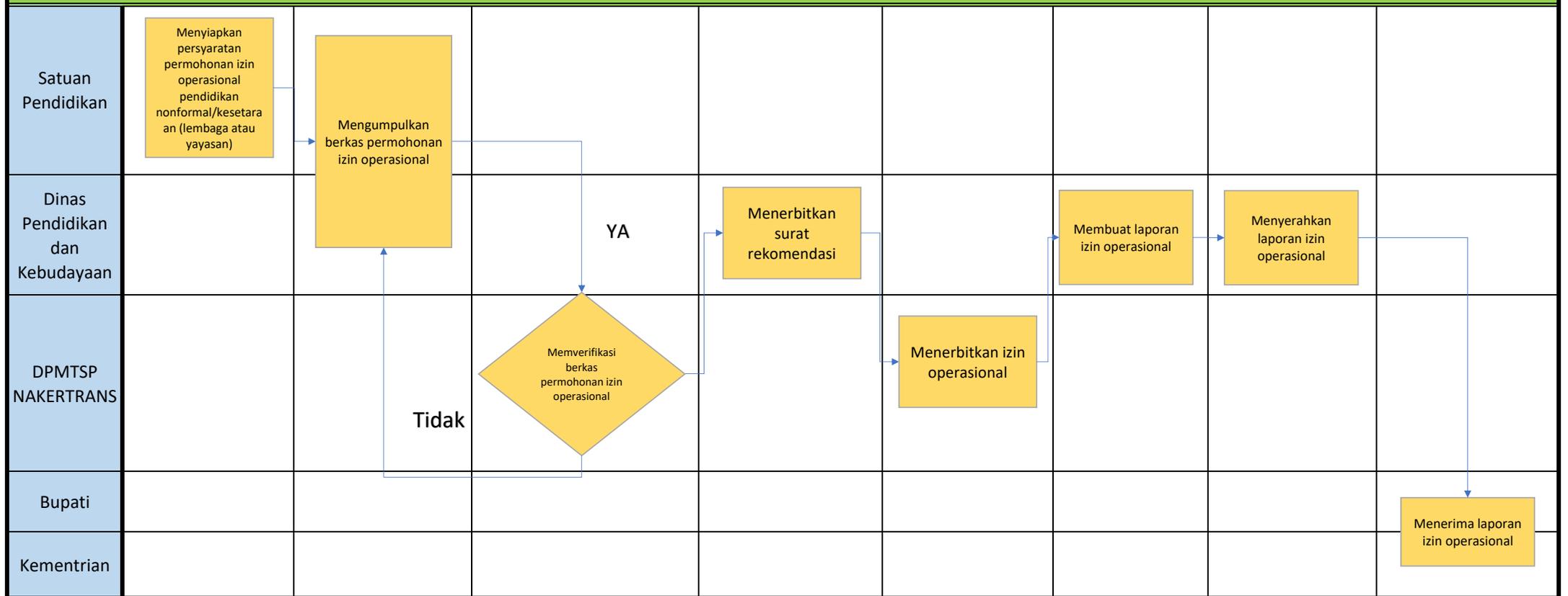
**BLG.06.01.CFM.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**



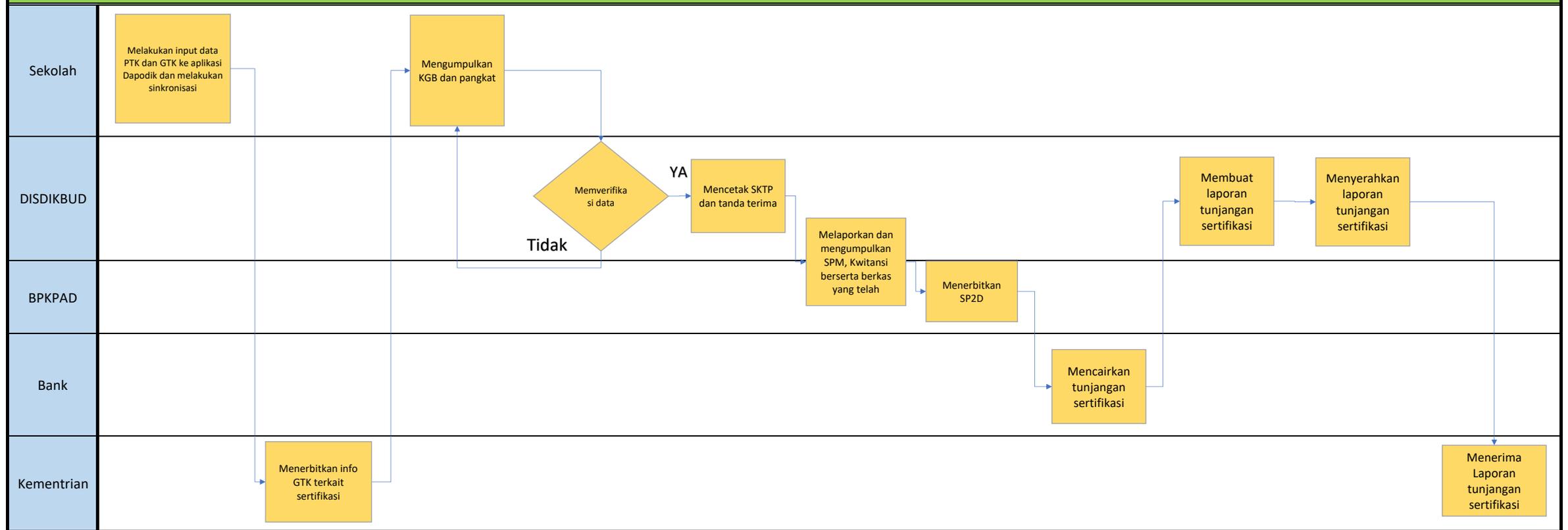
**BLG.01.CFM.02 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**



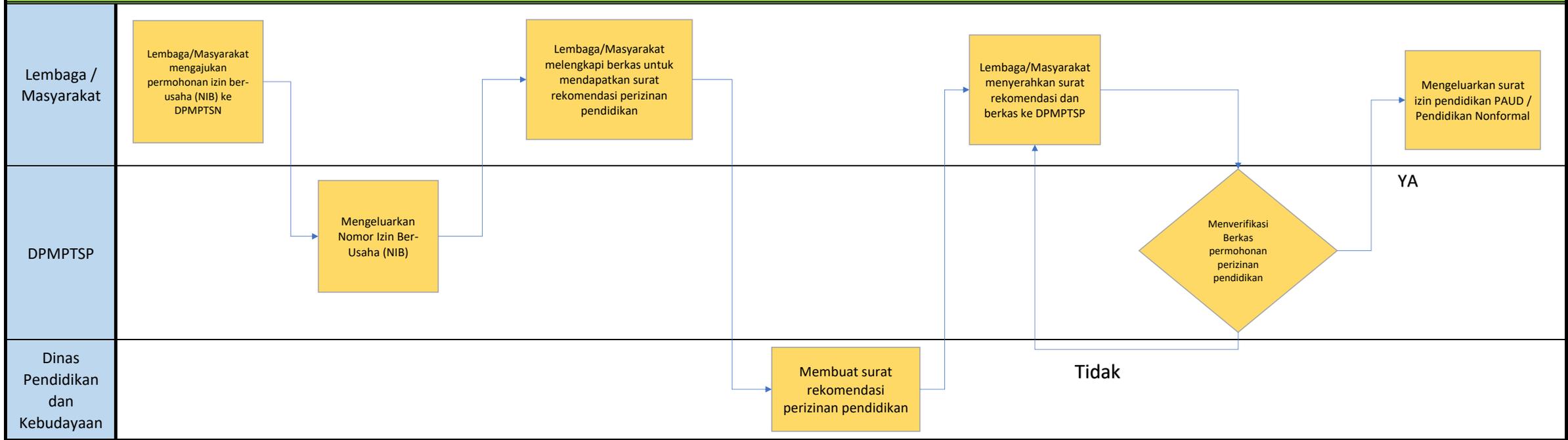
**BLG.06.01.CFM.03 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**



**BLG.06.02.CFM.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**



**BLG.06.03.CFM.01 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**



## PETA RELASI BLG-06 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Pengelolaan Pendidikan

- 1) DPMPTSPTTK
- 2) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan

### 02. Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) DPMPTSPTTK
- 2) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan

### 03. Peningkatan Pengendalian Perizinan Pendidikan

- 1) DPMPTSPTTK
- 2) Dinas Koperasi, UMK, Perindustrian & Perdagangan

# PETA SUB PROSES

## INPUT

*Kebijakan/regulasi tentang Kesehatan*

**Pemerintah** →

*Permintaan informasi, konsultasi, Informasi Publik*

**Perangkat Daerah** →

*Permintaan informasi, konsultasi, dan layanan*

## BLG-07

### PENINGKATAN INDEKS KESEHATAN

#### BLG-07.01

Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

#### BLG-07.02

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan

#### BLG-07.03

Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

#### BLG-07.04

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

#### BLG-07.05

Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

## OUTPUT

*Akuntabilitas/ Laporan*

→ **Pemerintah**

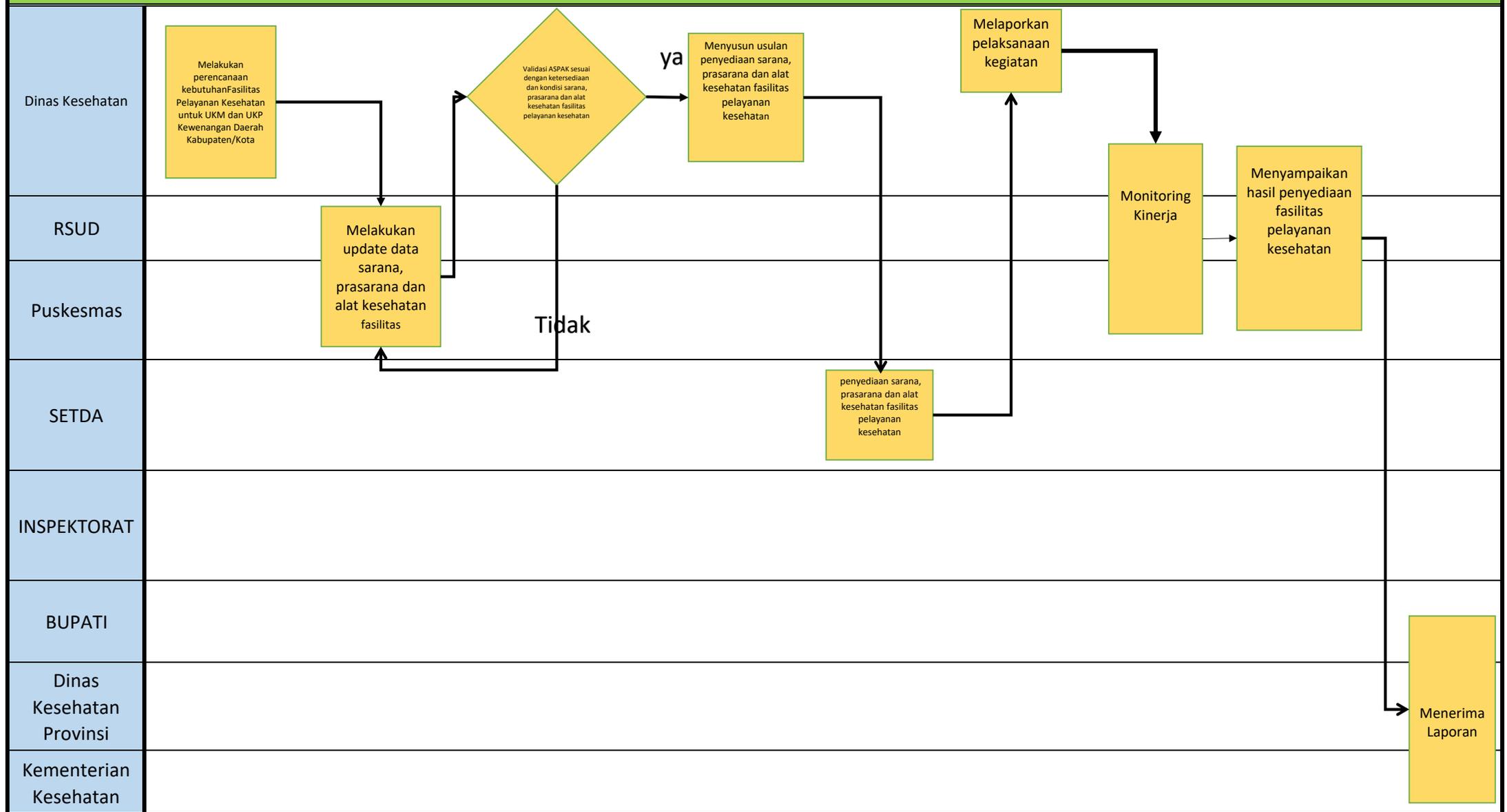
*Permintaan informasi, konsultasi, Informasi Publik*

Pengembangan teknologi informasi

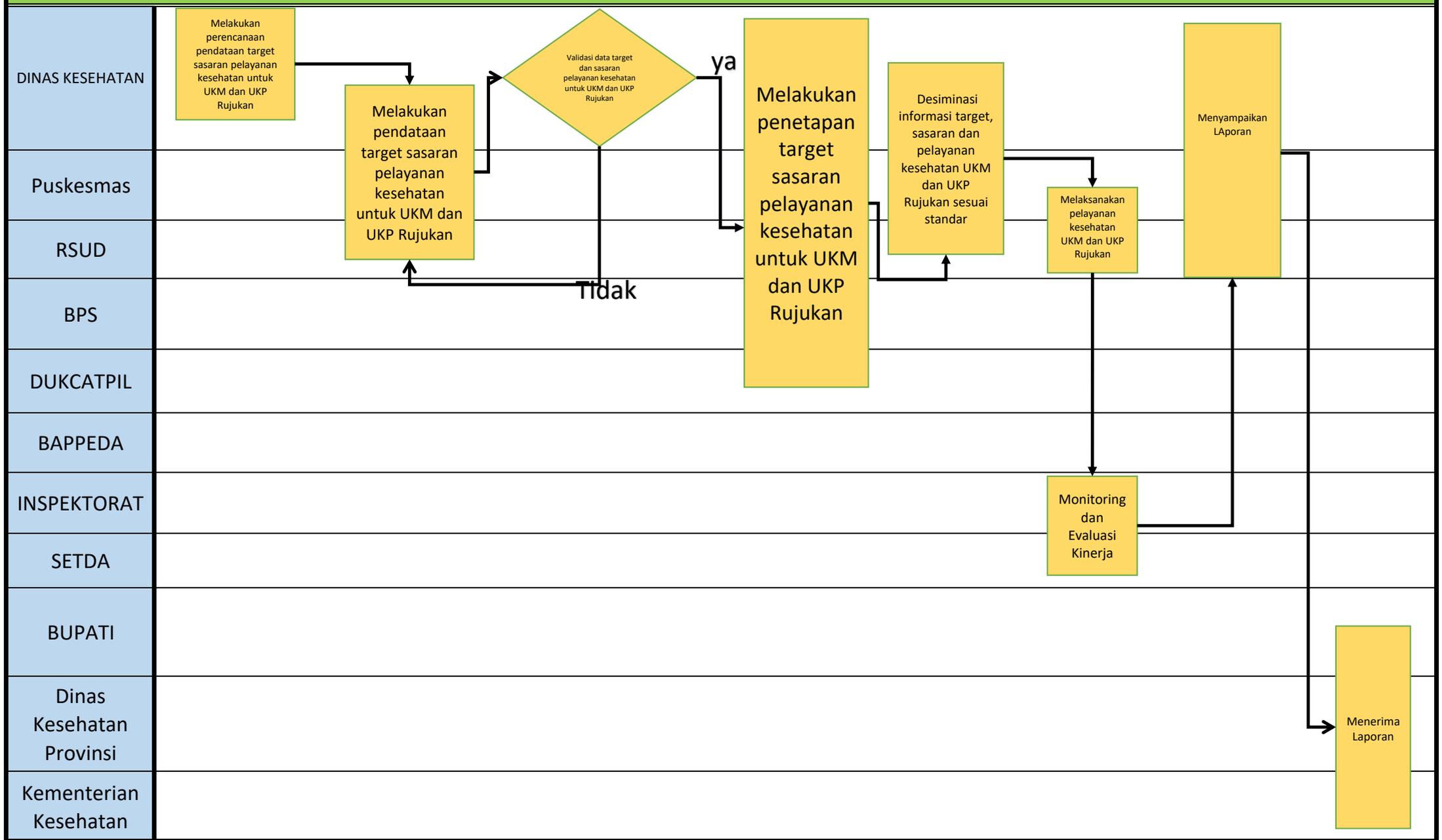
→ **Perangkat Daerah**

1. SDM Kesehatan memadai
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan tersedia
3. Derajat Kesehatan masyarakat meningkat

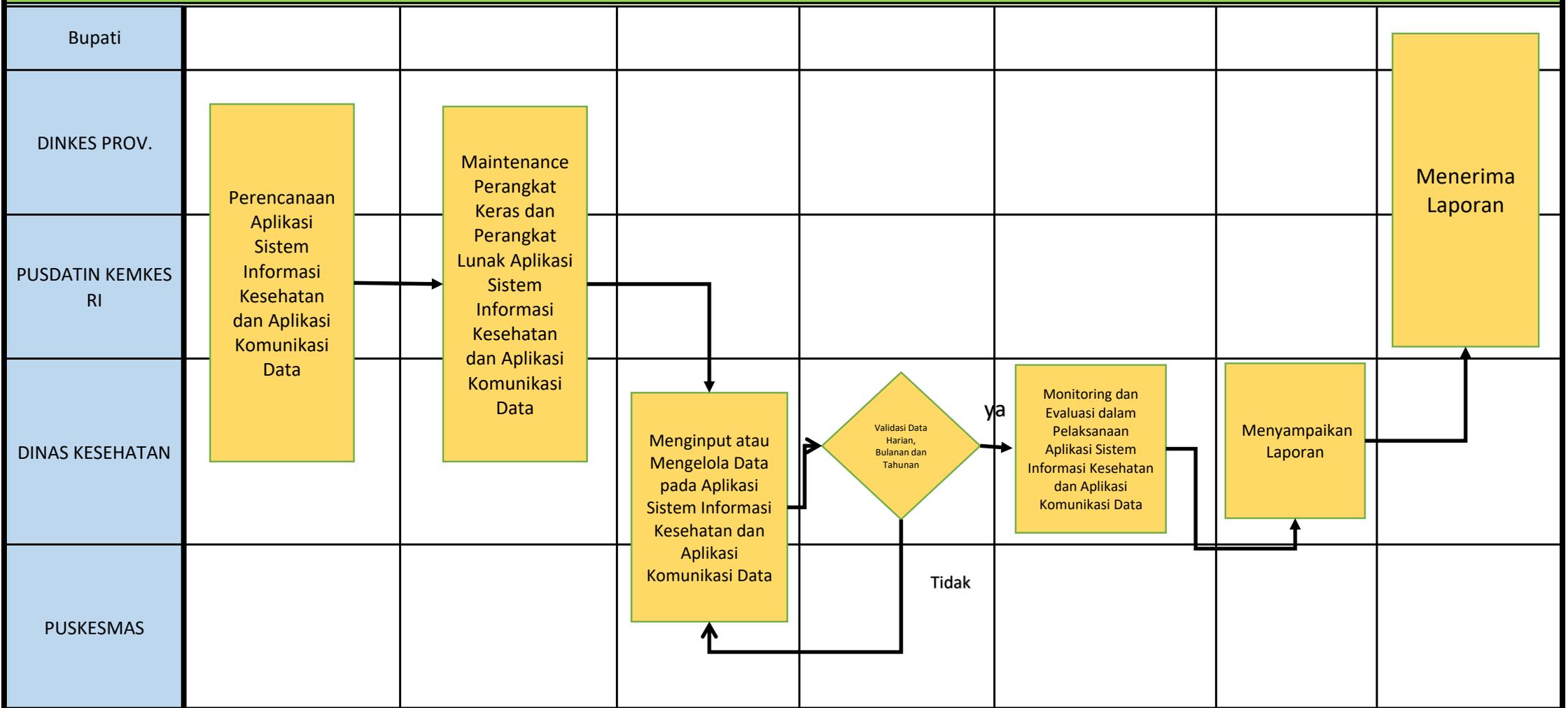
**BLG.07.01.CFM.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**



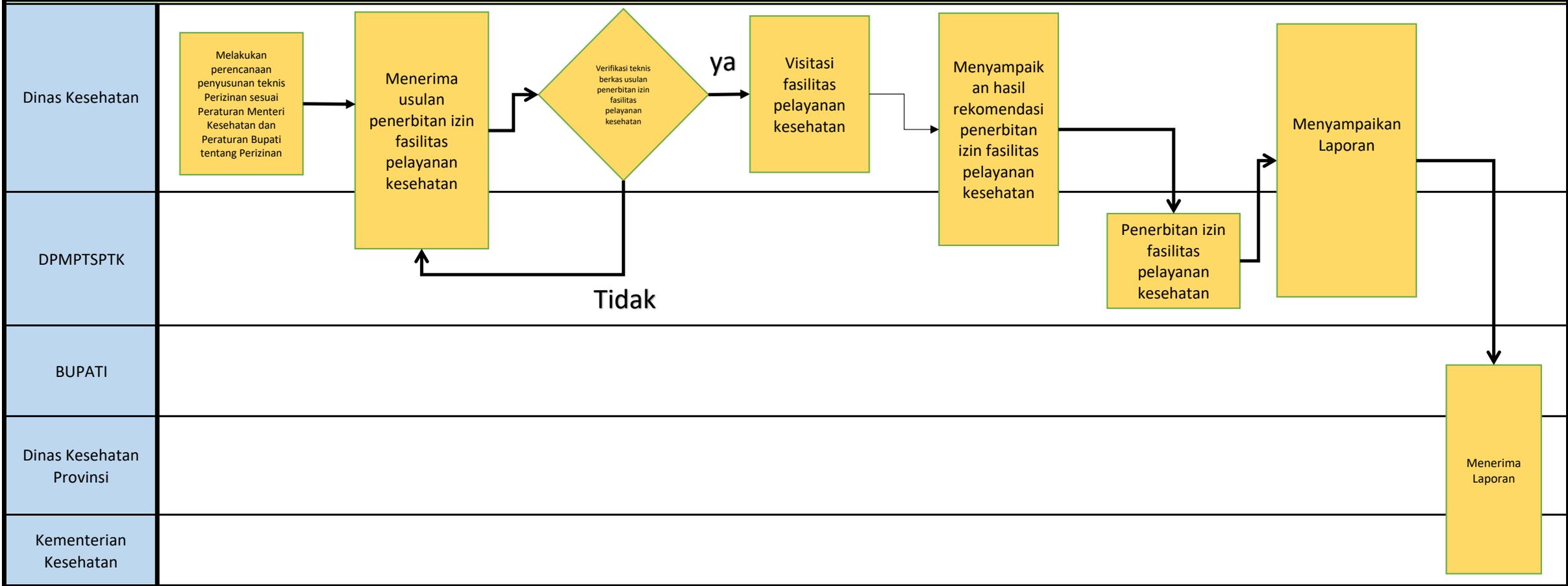
## BLG.07.01.CFM.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



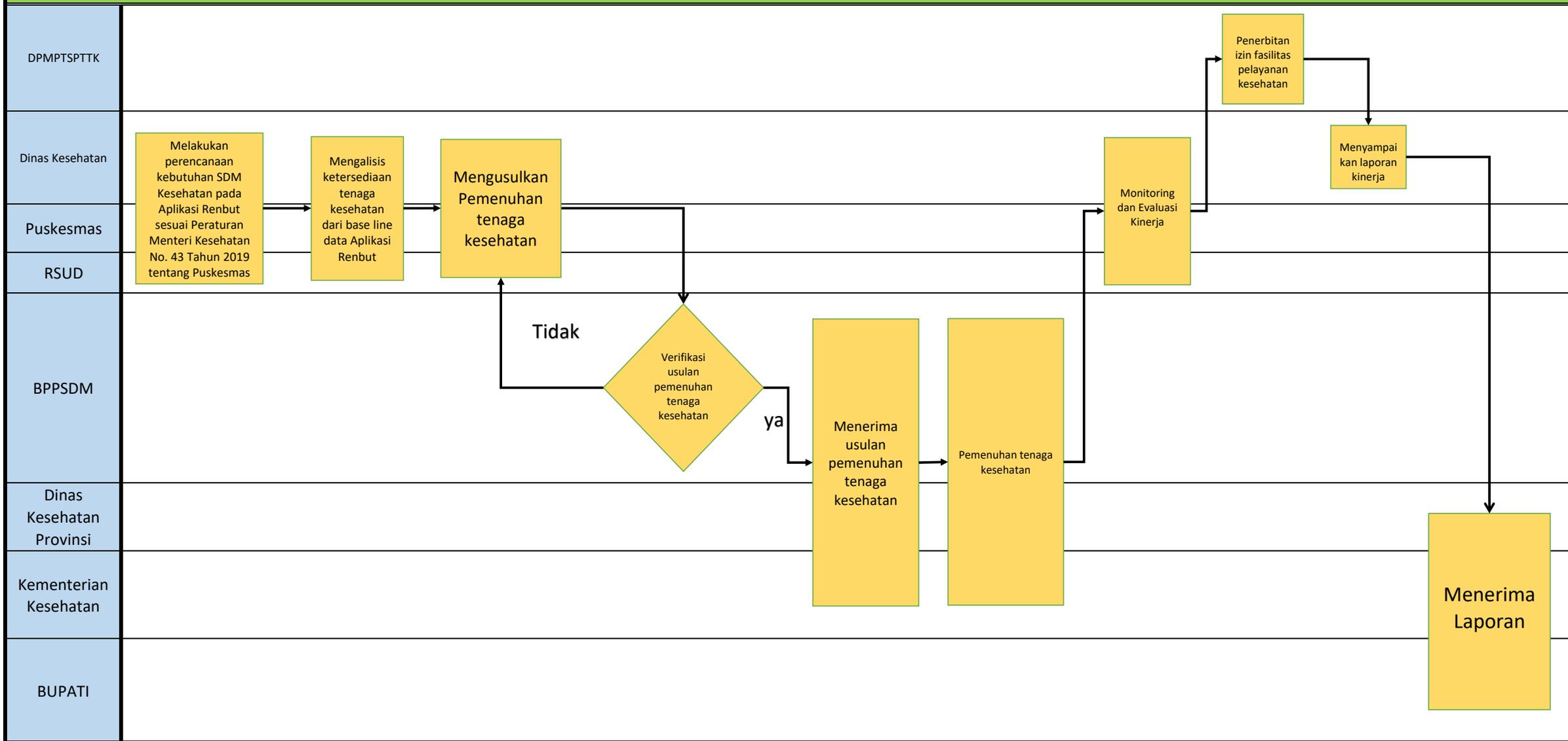
## BLG.07.01.CFM.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi



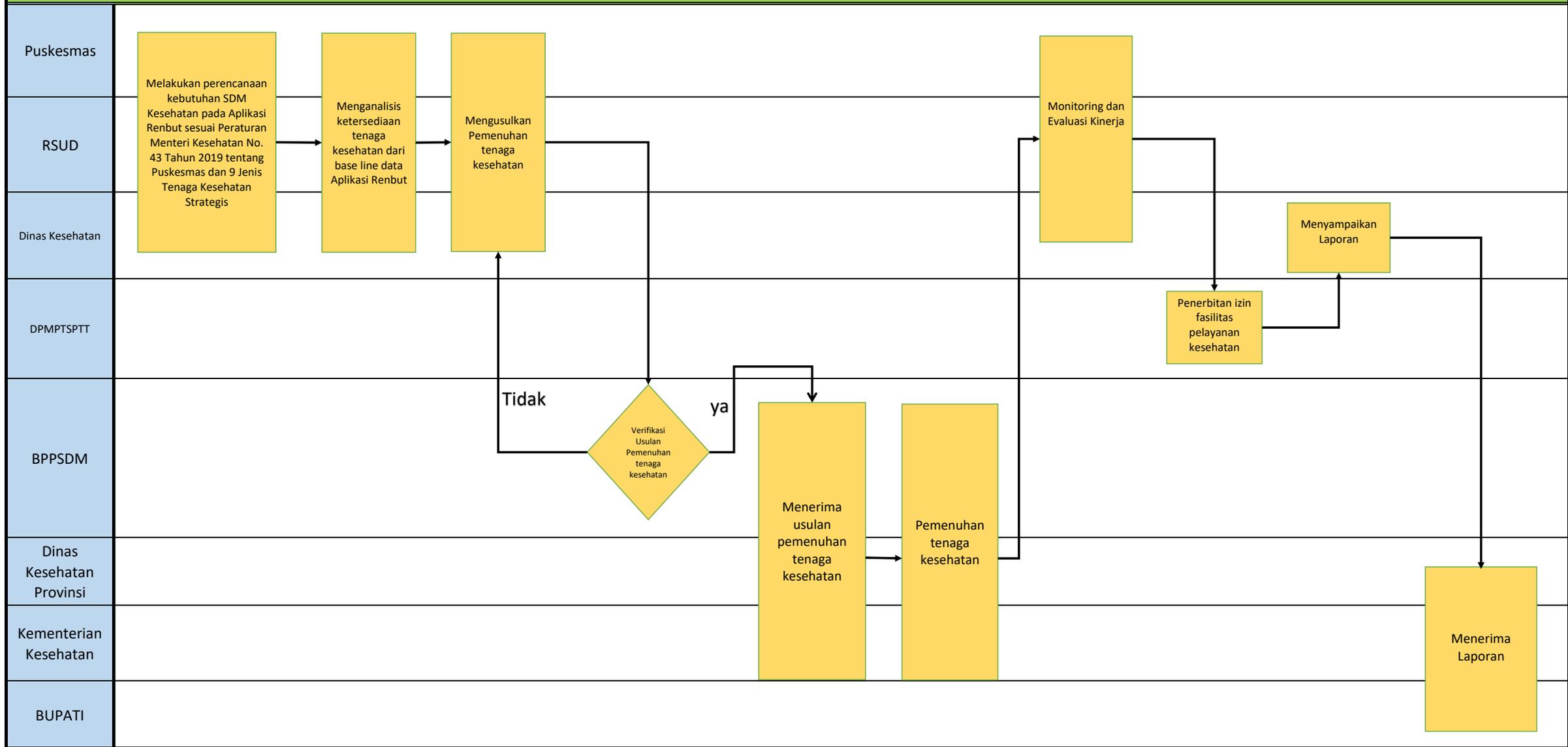
**BLG.07.01.CFM.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



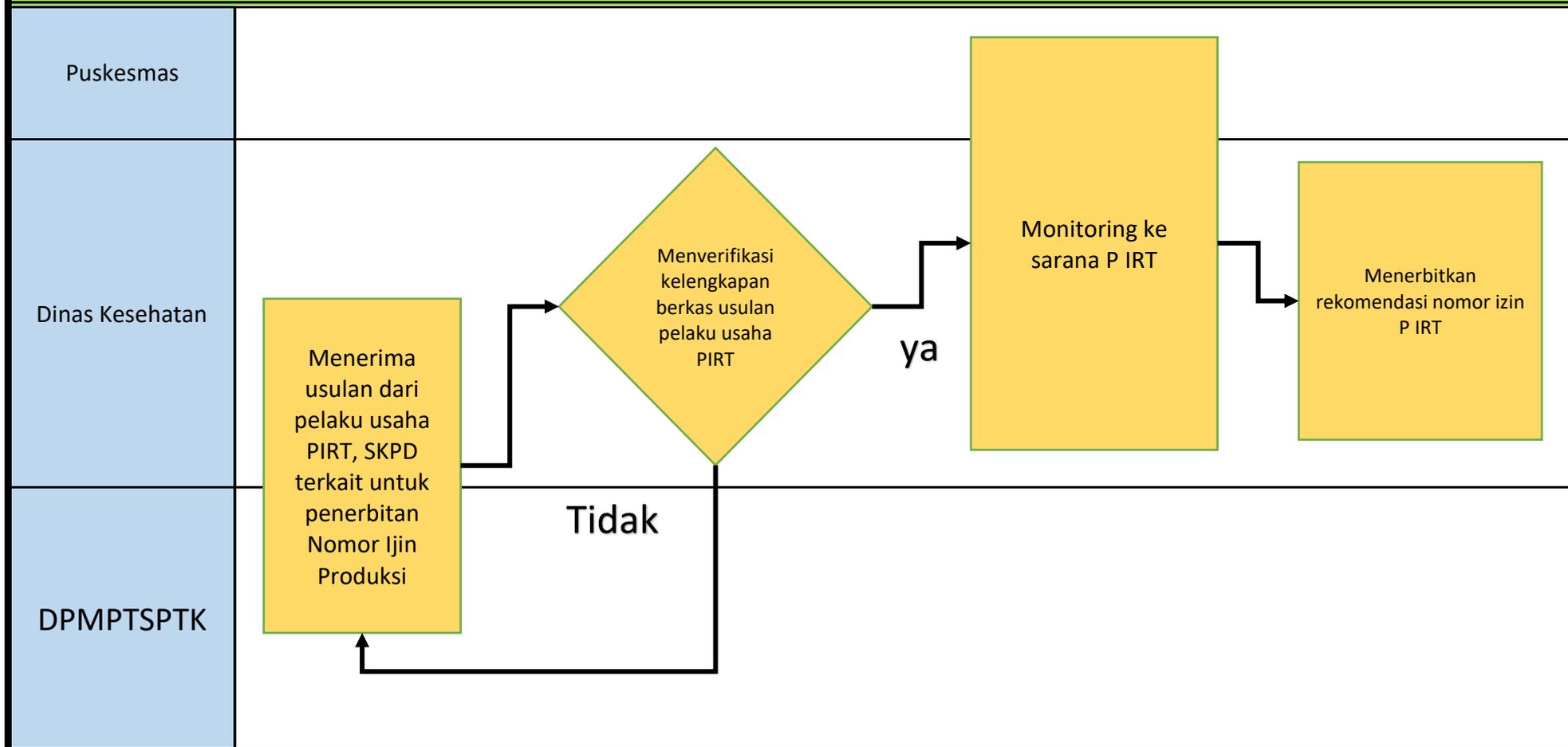
**BLG.07.02.CFM.01 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber data manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota**



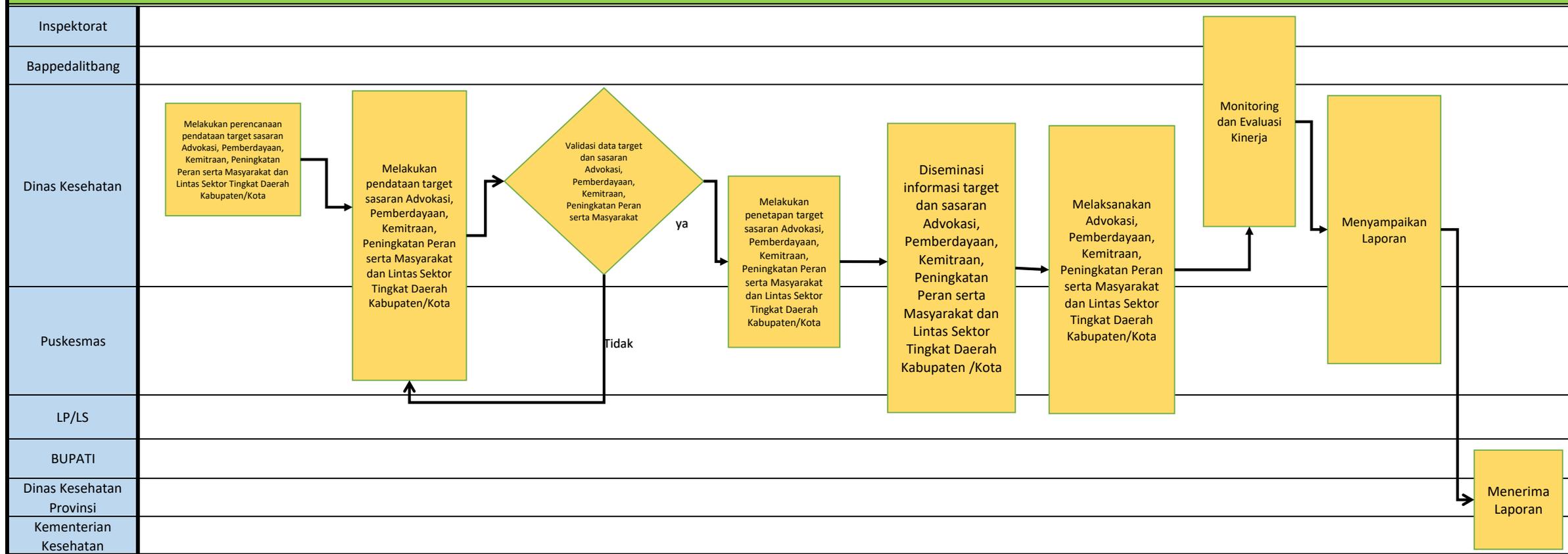
**BLG.07.02.CFM.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



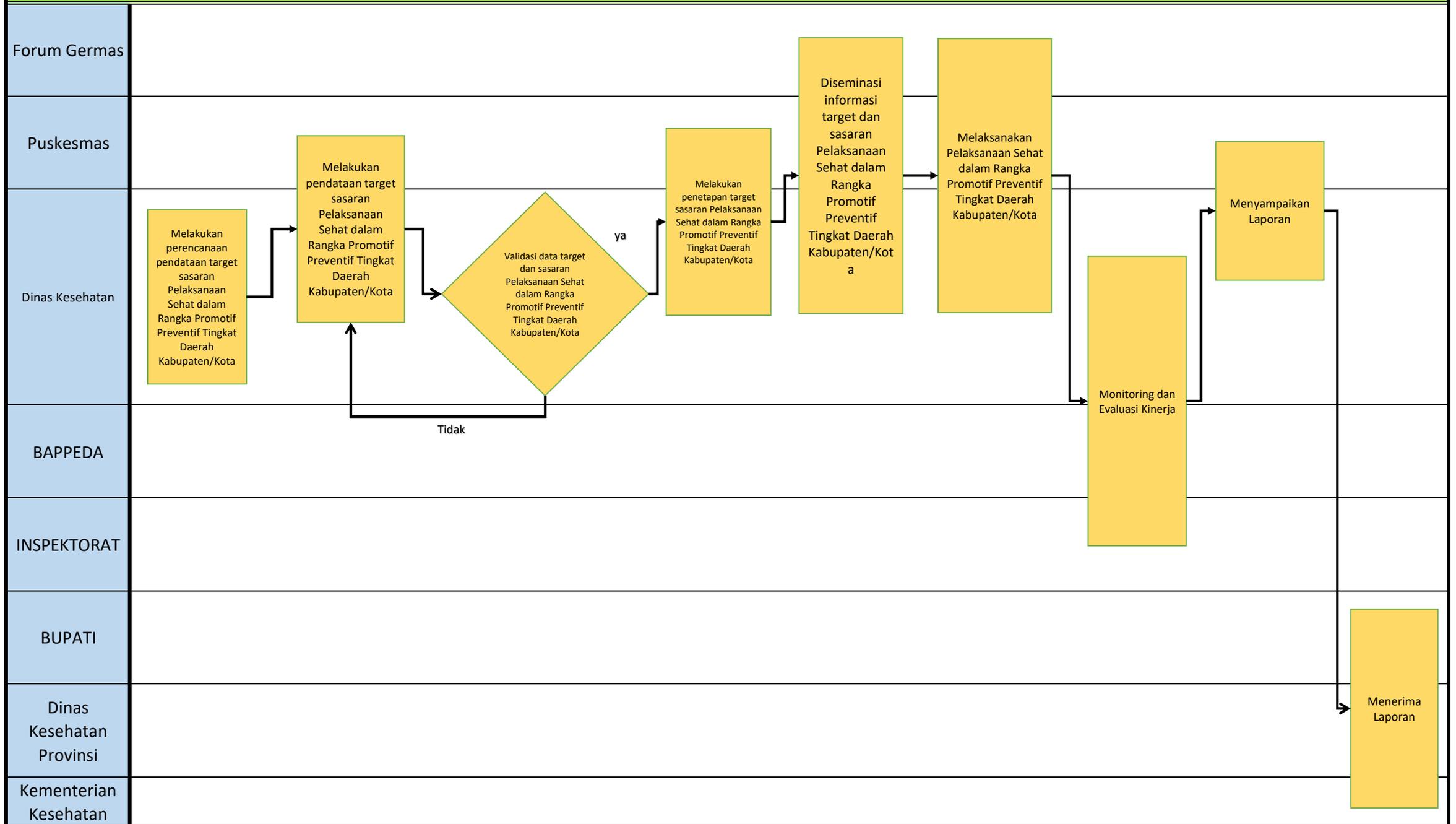
**BLG.07.03.CFM.01 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga**



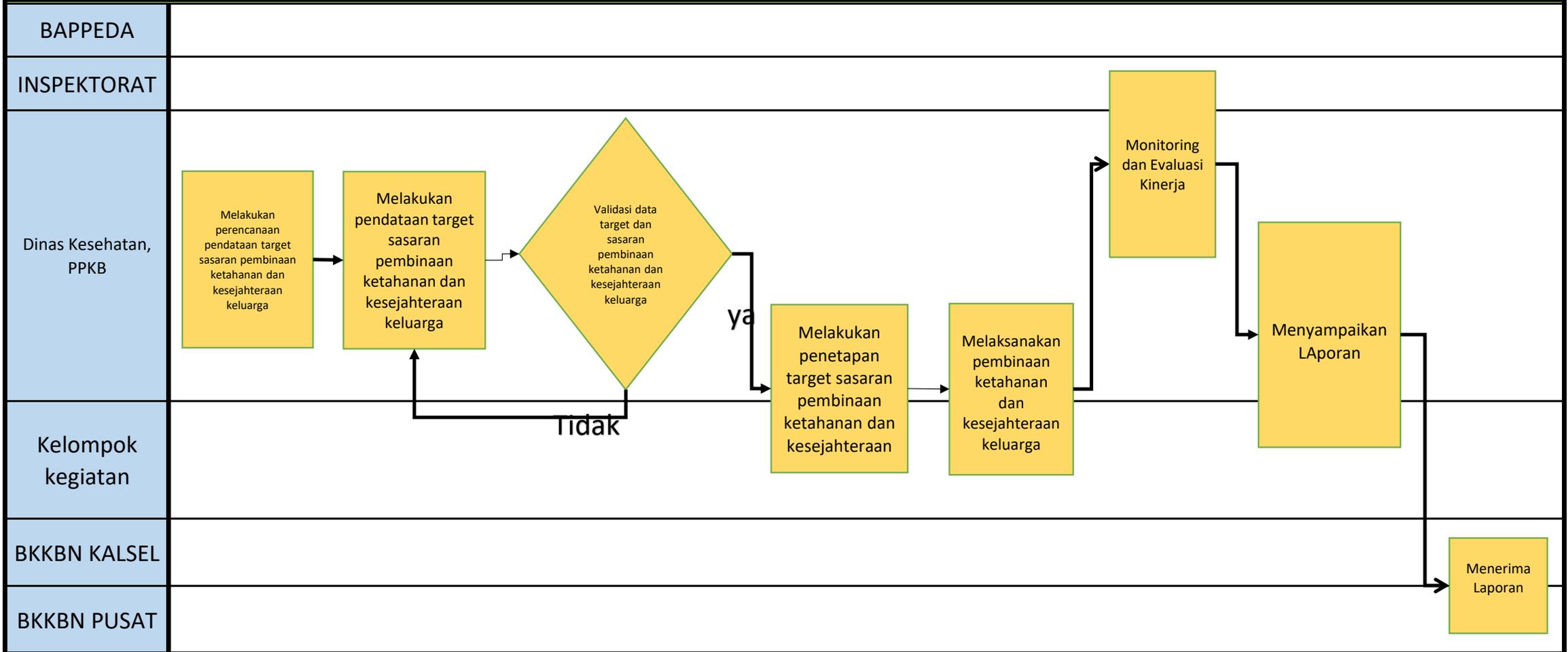
**BLG.07.04.CFM.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



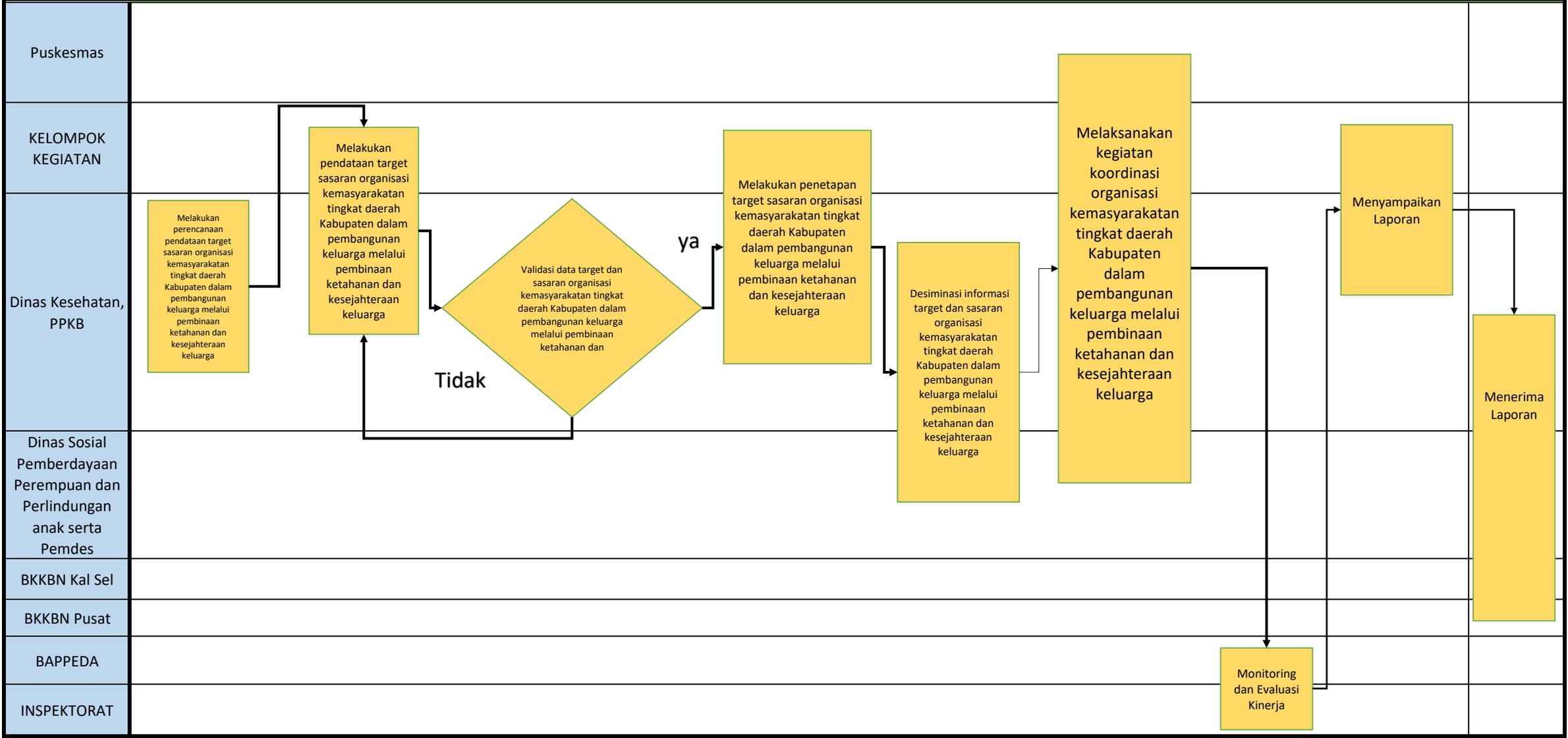
**BLG.07.04.CFM.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



**BLG.07.05.CFM.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**



**BLG.07.05.CFM.02 Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**



## PETA RELASI BLG-07 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) DinkesPPKB
- 2) RSUD
- 3) Puskesmas
- 4) Setda
- 5) Inspektorat
- 6) BPS
- 7) Disdukcapil
- 8) Bappedalitbang
- 9) DPMPTSP

### 02. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan

- 1) DinkesPPKB
- 2) DPMPTSP
- 3) Puskesmas
- 4) RSUD
- 5) BKPSDM

### 03. Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- 1) DinkesPPKB
- 2) Puskesmas
- 3) DPMPTSP

### 04. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- 1) DinkesPPKB
- 2) Inspektorat
- 3) Bappedalitbang
- 4) Puskesmas

### 05. Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

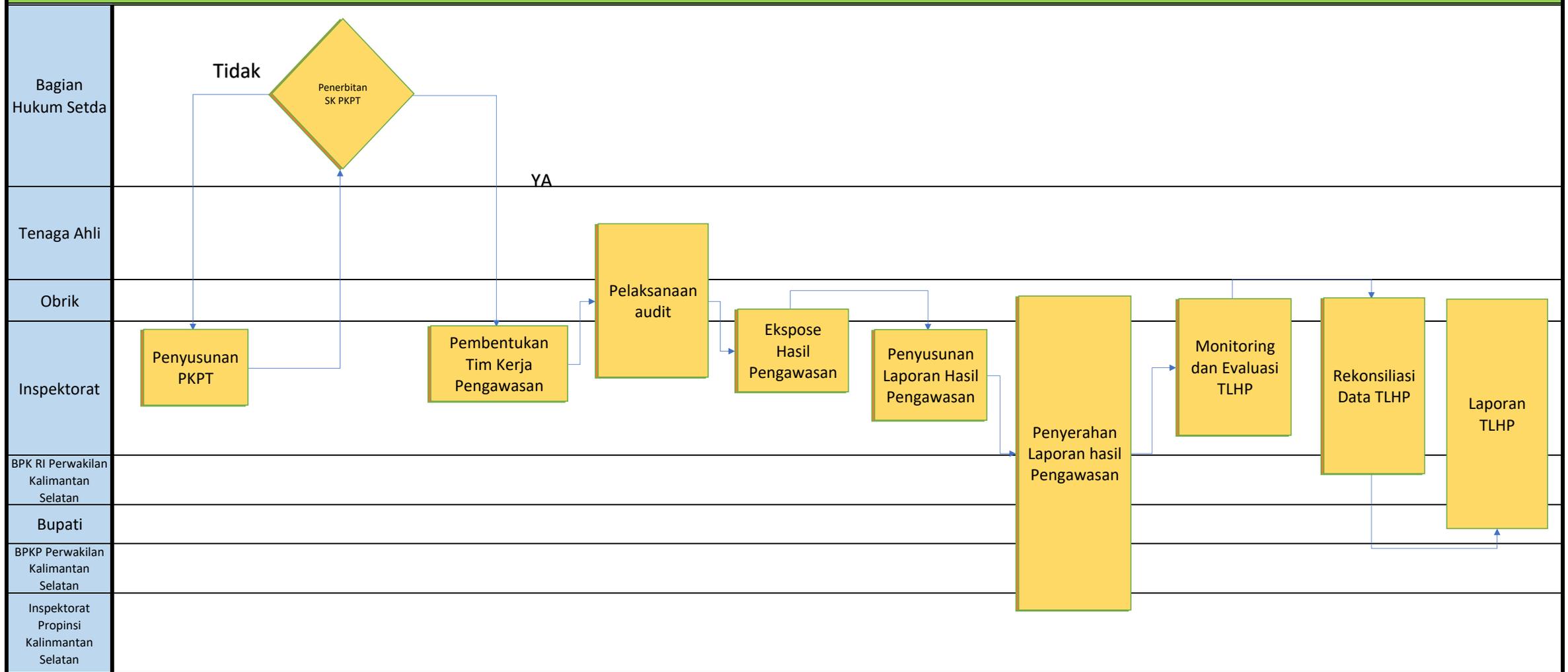
- 1) DinkesPPKB
- 2) Bappedalitbang
- 3) Inspektorat

# PETA SUB PROSES

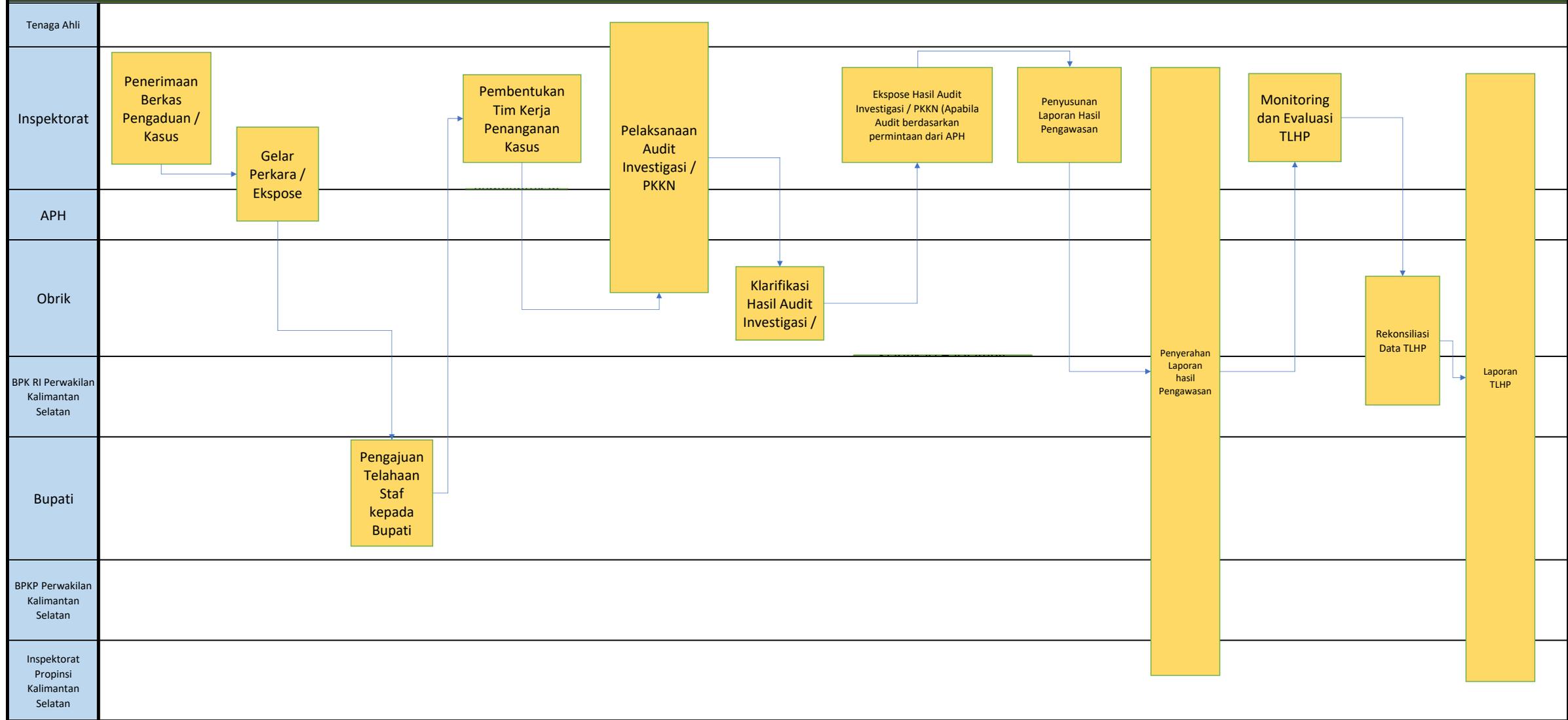




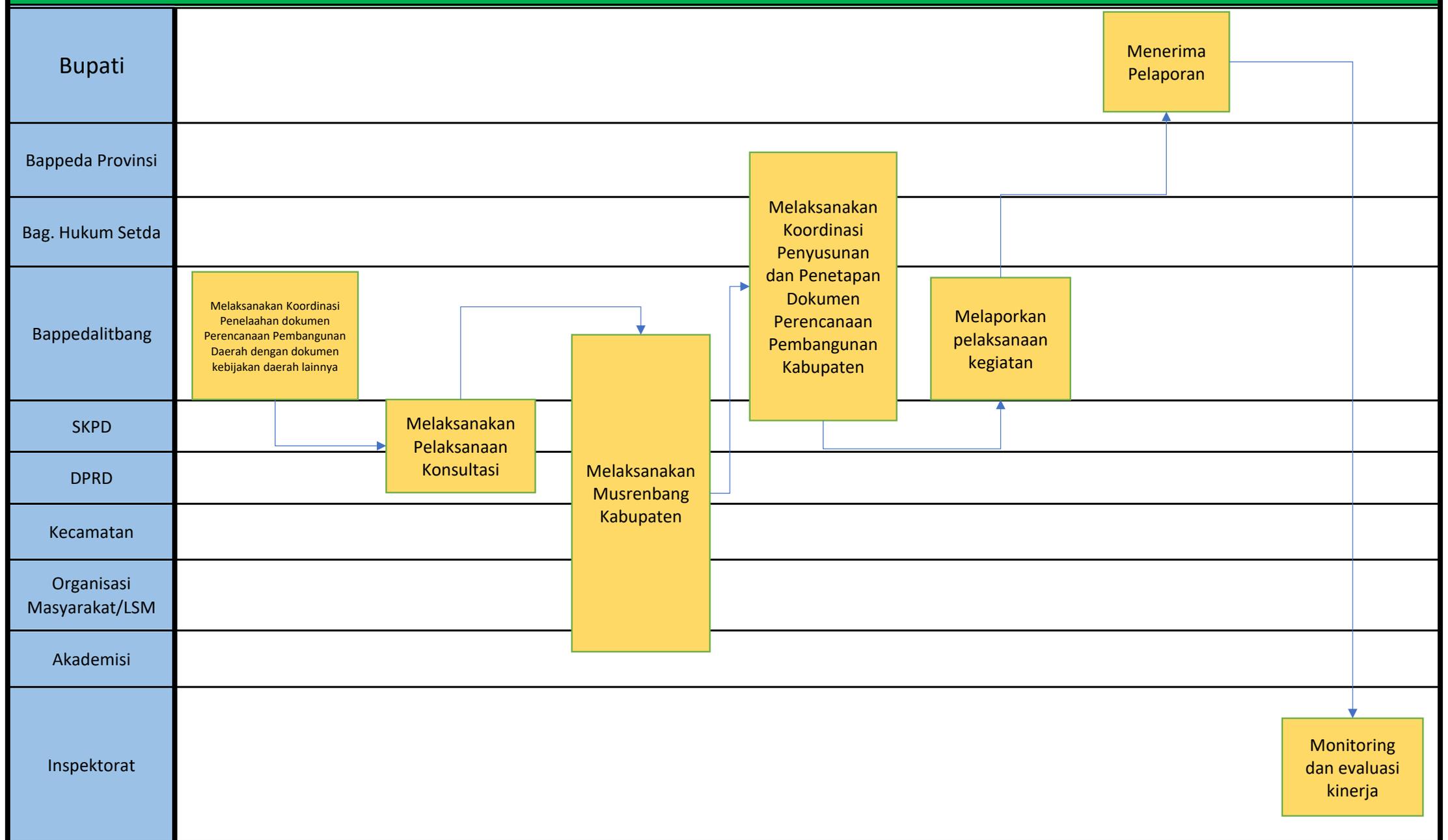
**BLG.08.02.CFM.01 Pengawasan Internal**



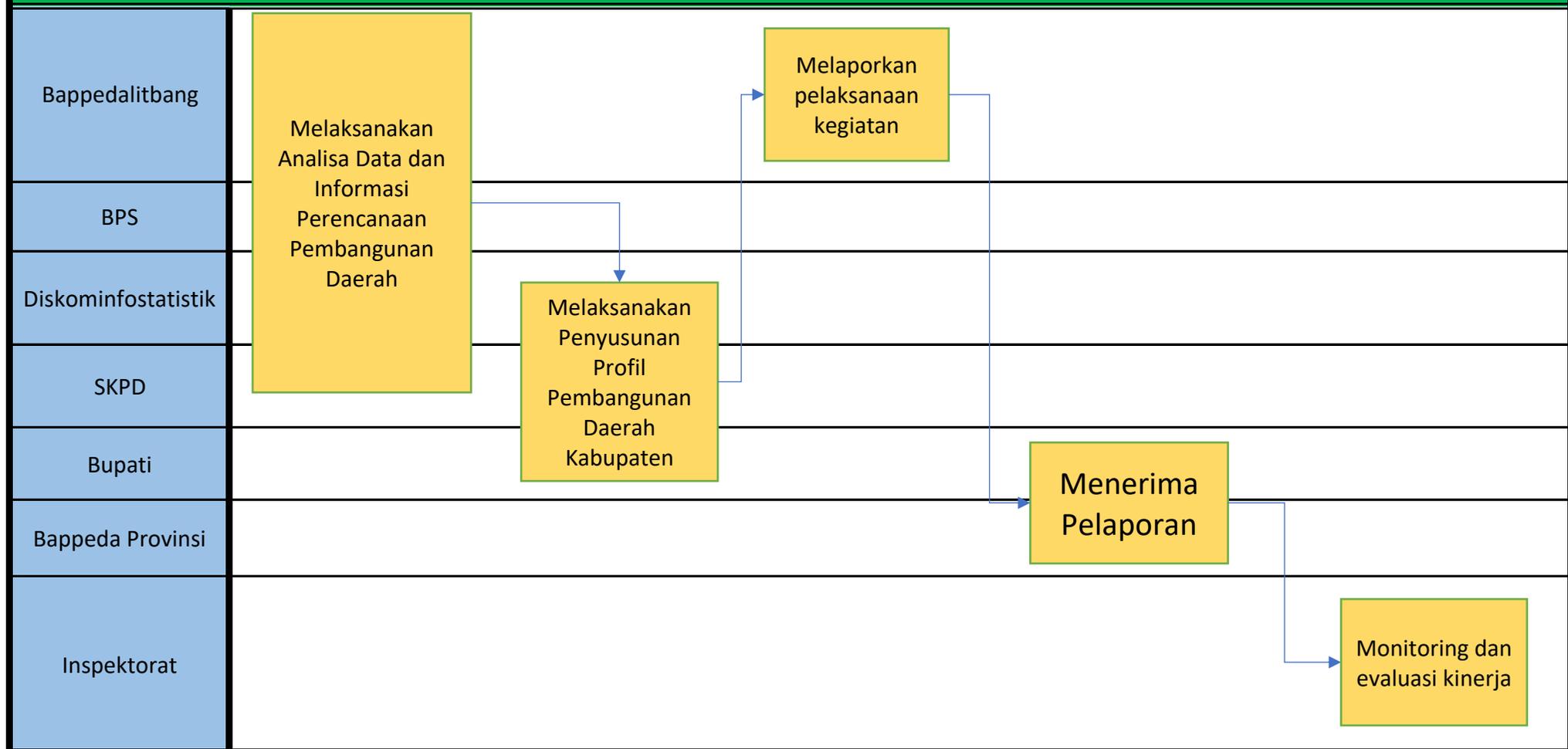
**BLG.08.02.CFM.01 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**



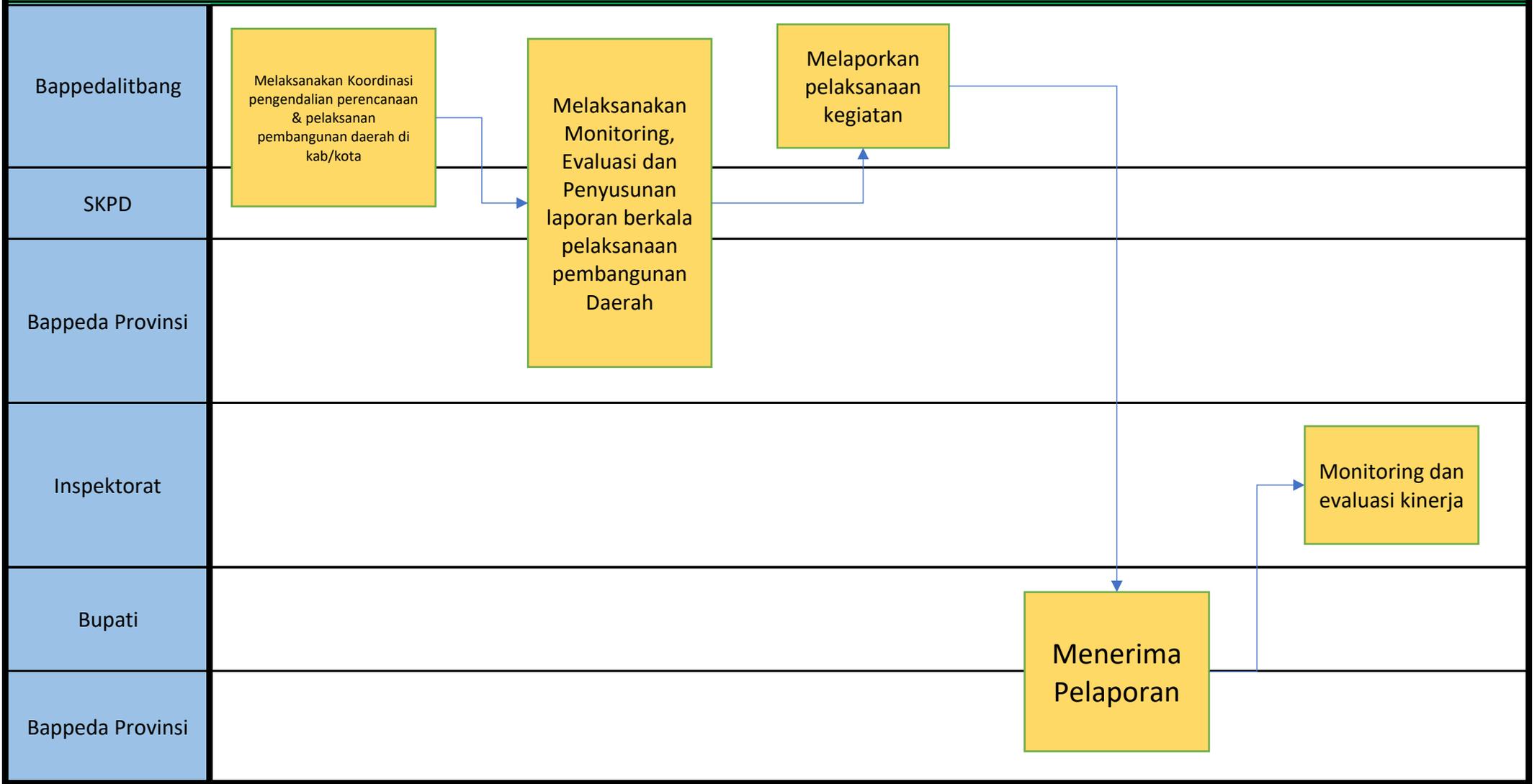
## BLG.08.03.CFM.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan



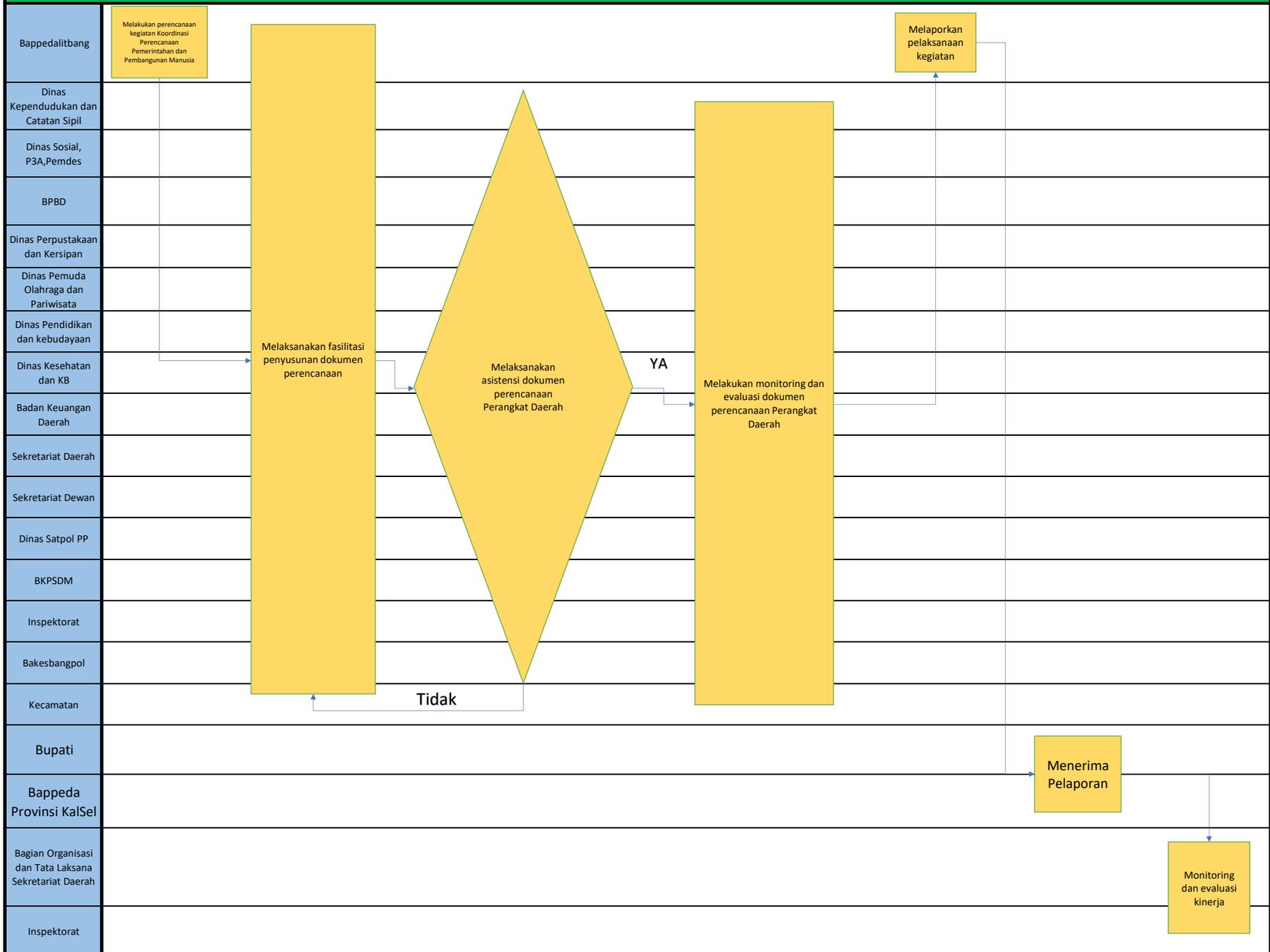
## BLG.08.03.CFM.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



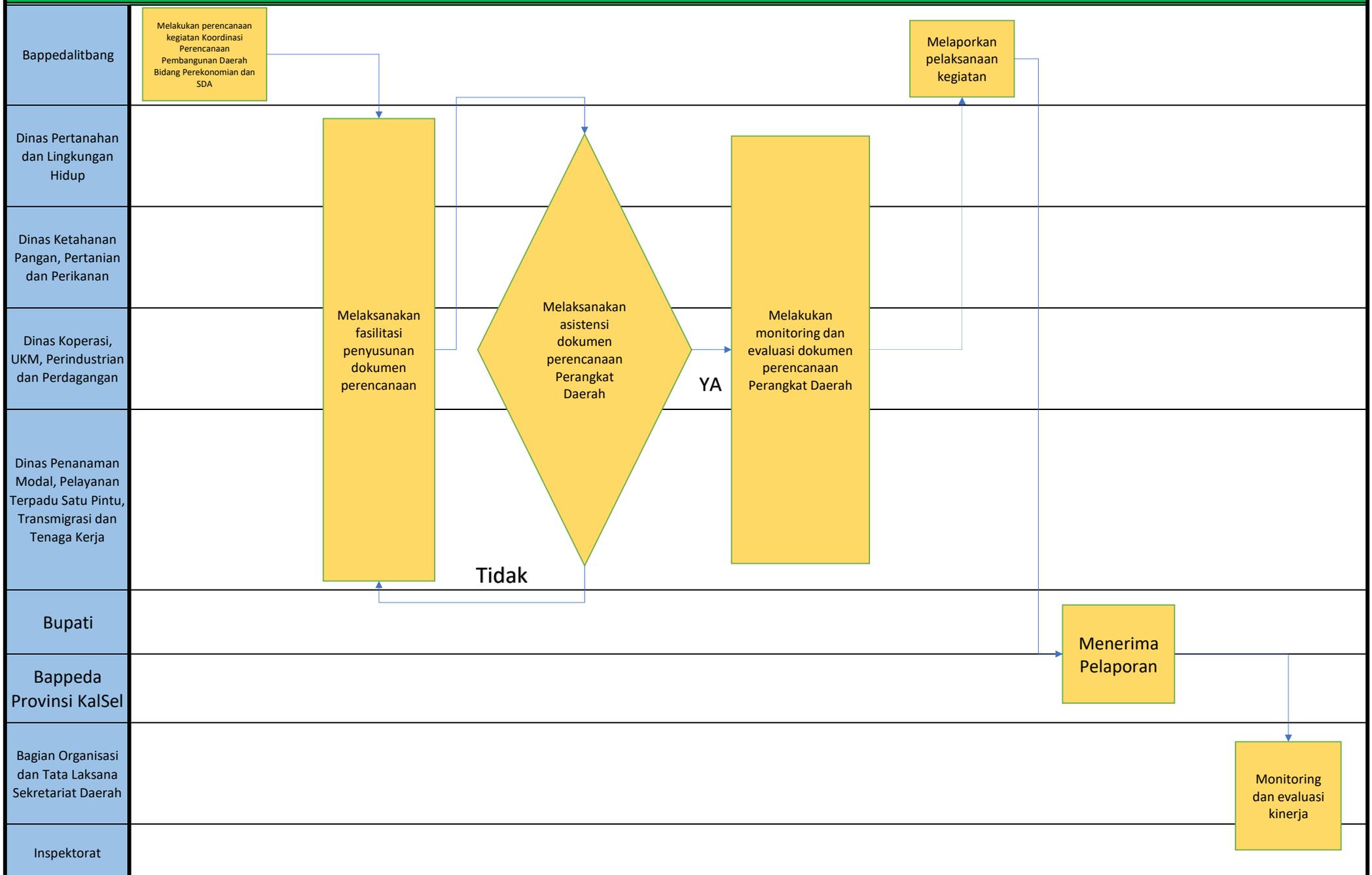
## BLG.08.03.CFM.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah



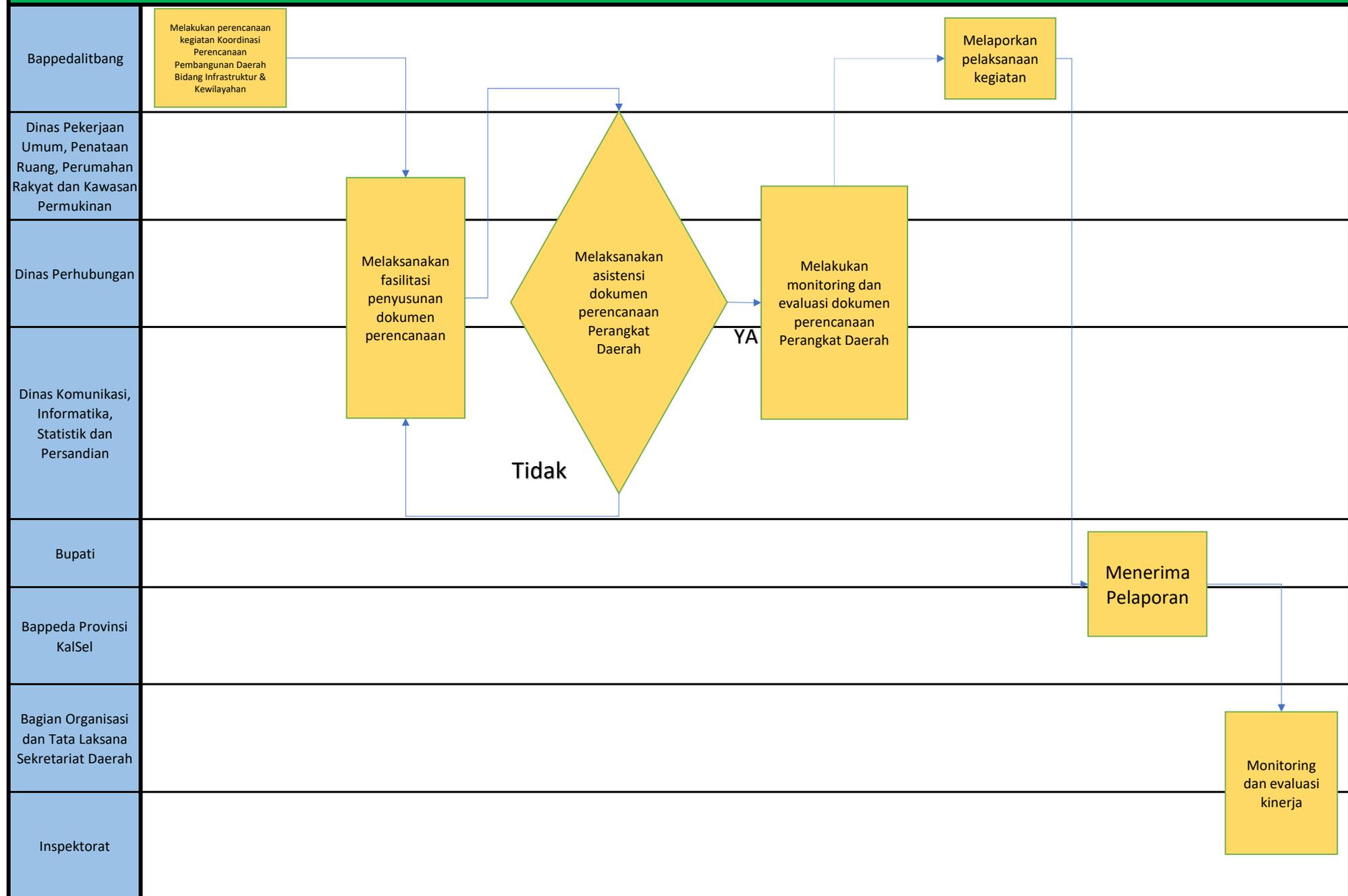
**BLG.08.04.CFM.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**



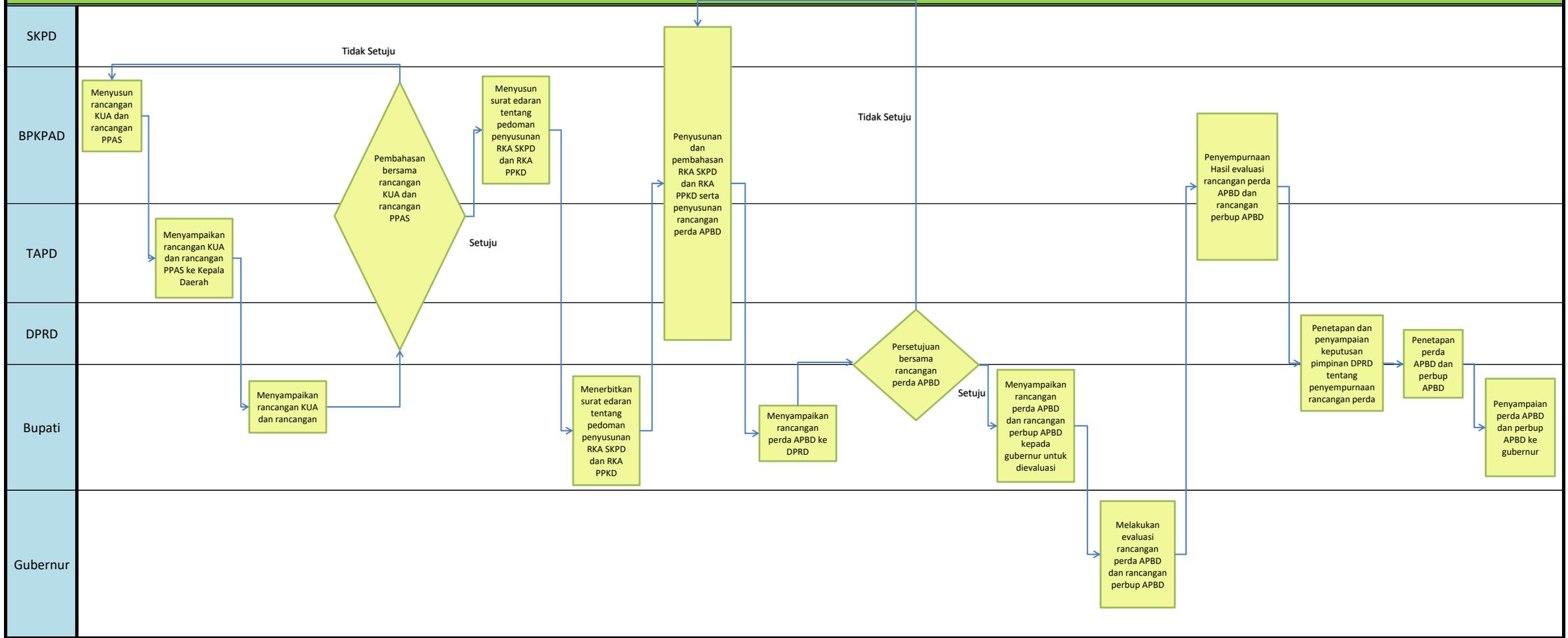
**BLG.08.04.CFM.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**



## BLG.08.02.CFM.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

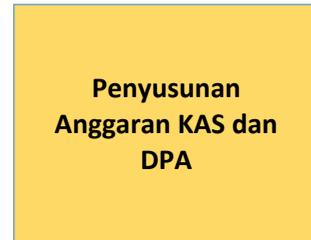


**BLG.08.05.CFM.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**



**BLG.08.05.CFM.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

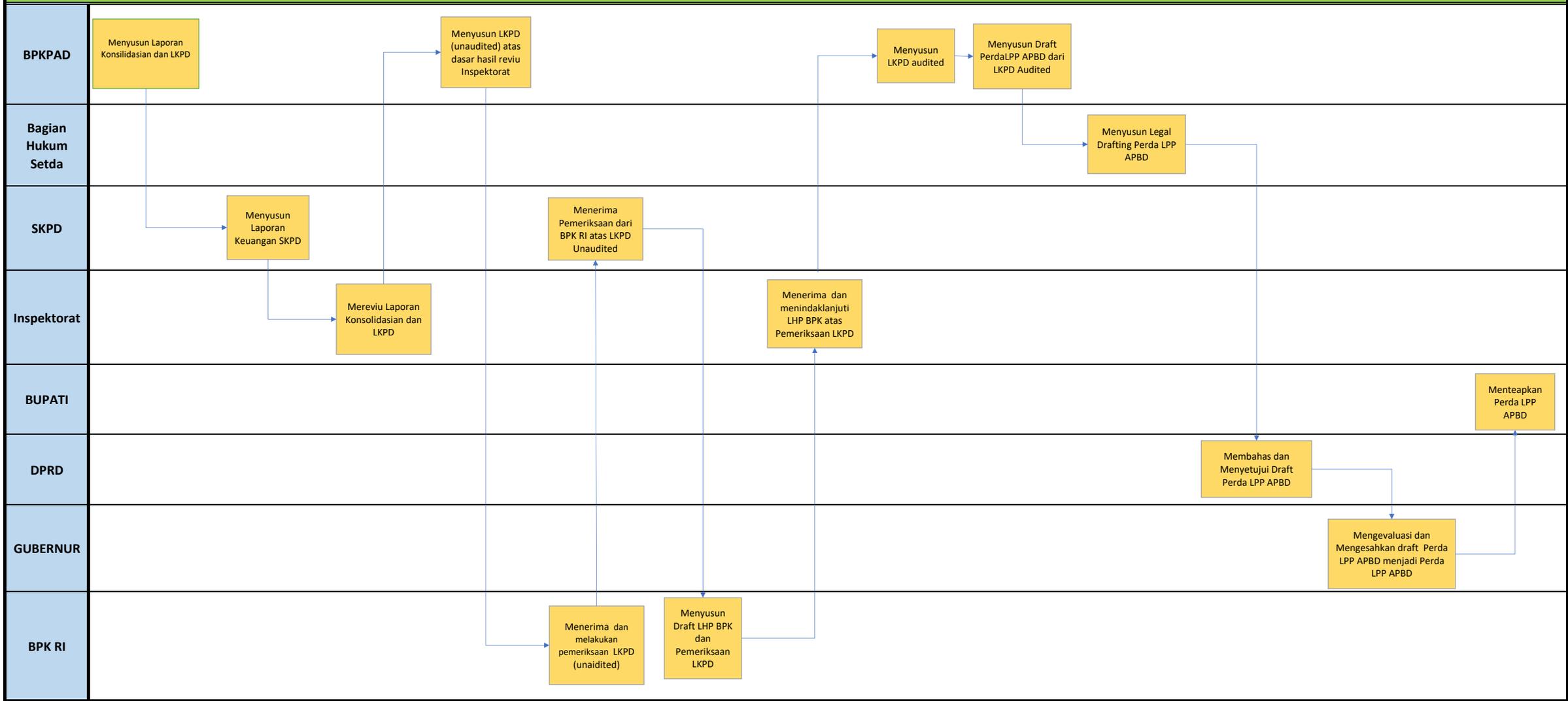
**SKPD**



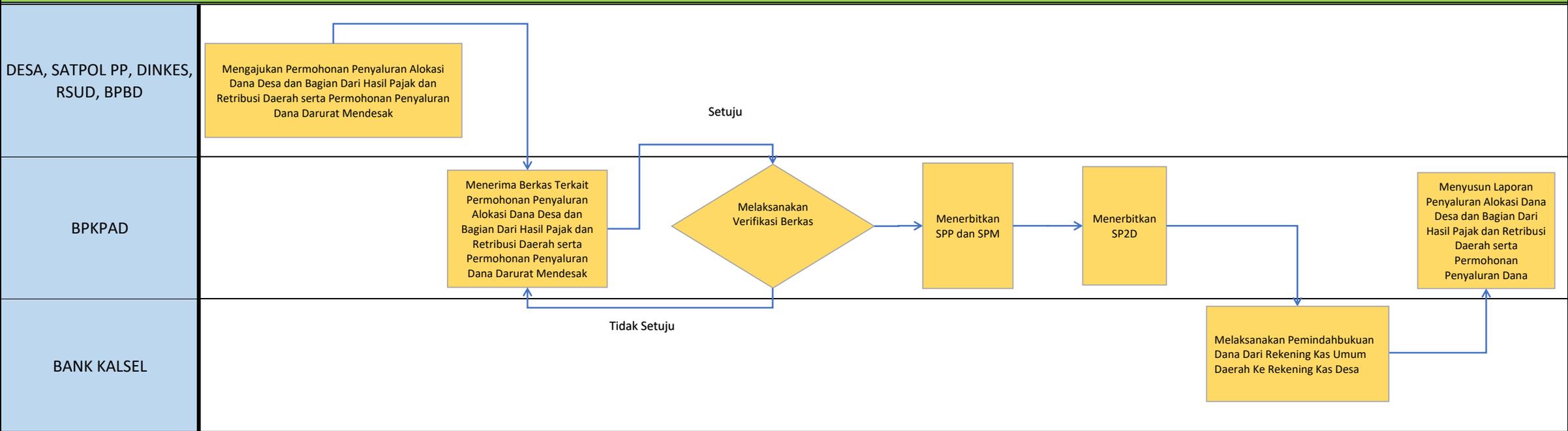
**BPKPAD**



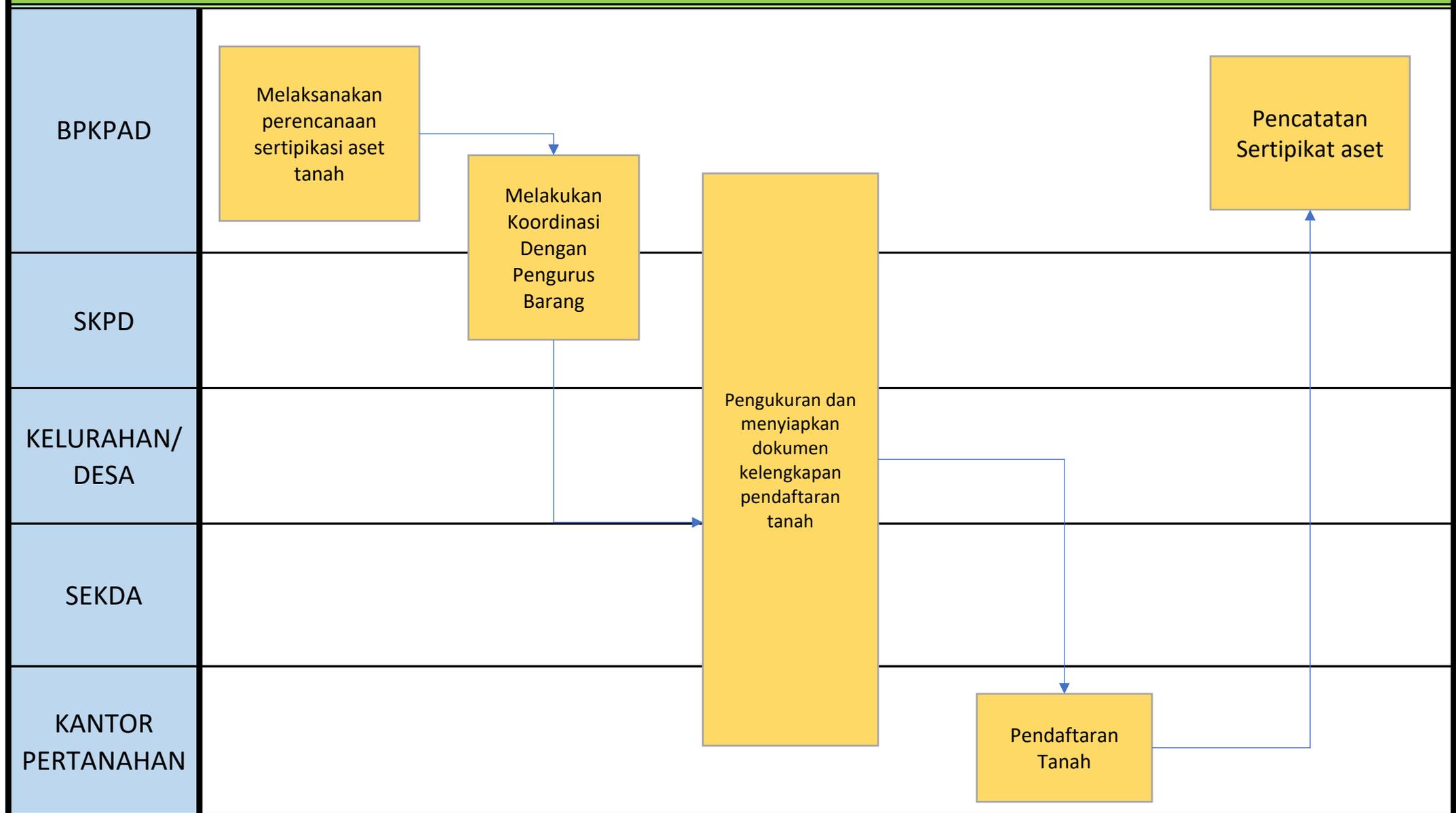
**BLG.08.05.CFM.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**



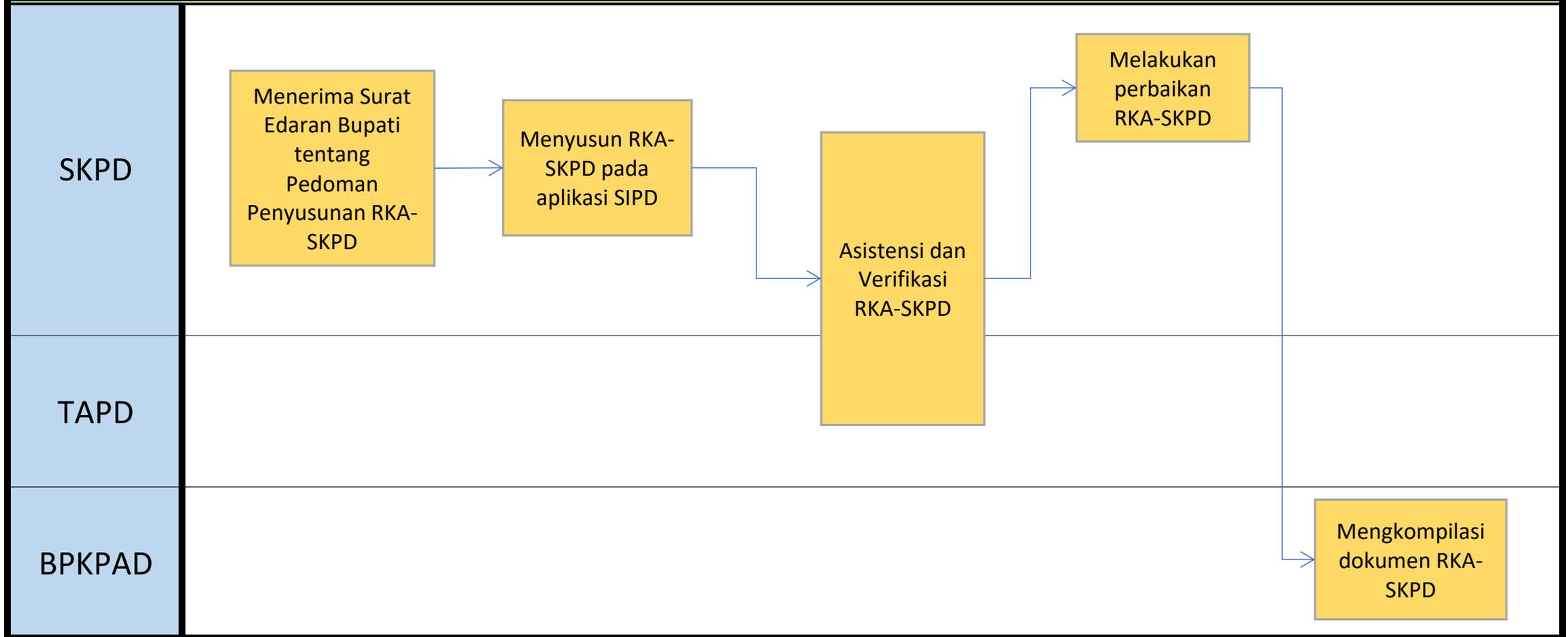
**BLG.08.05.CFM.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**



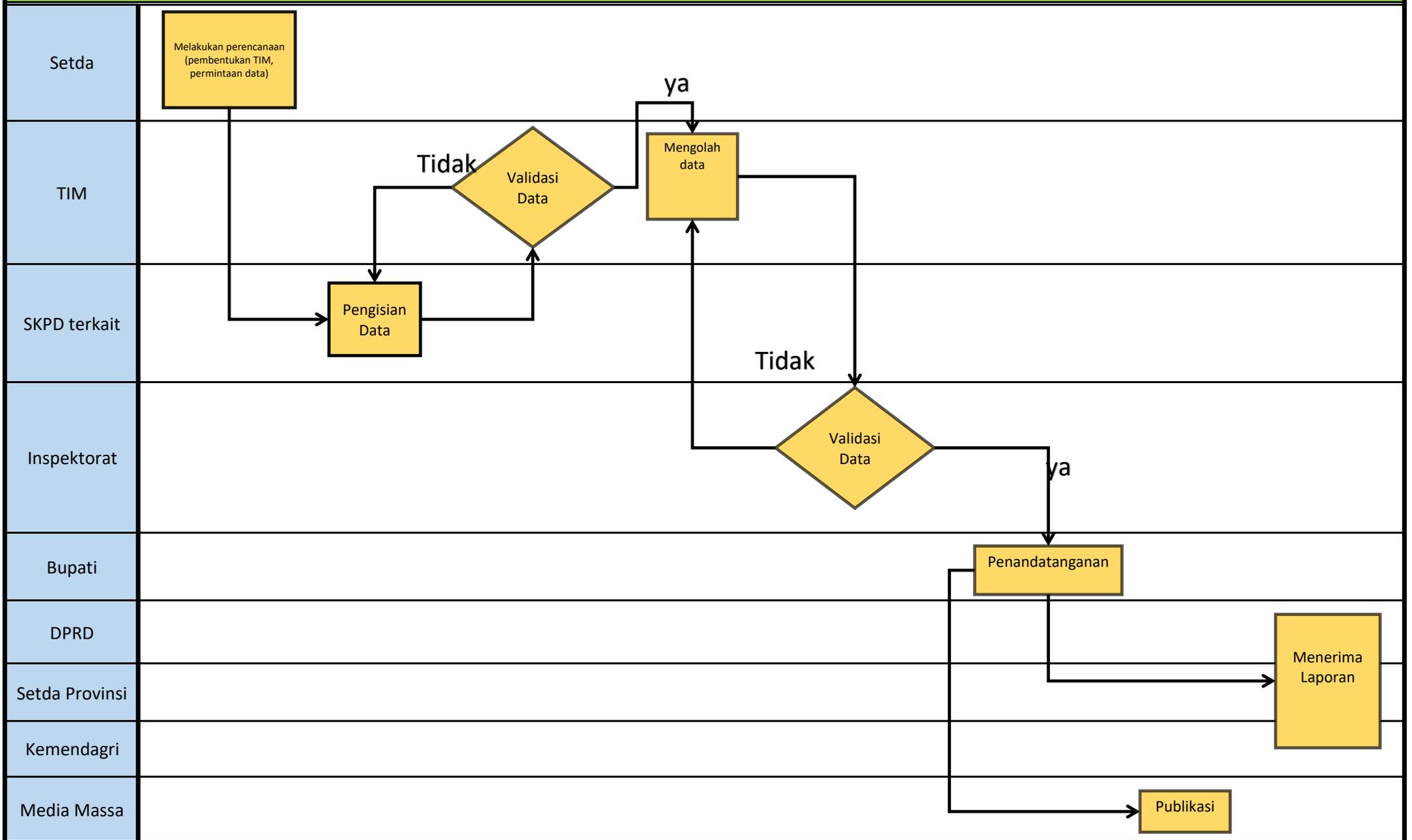
## BLG.08.06.CFM.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah



## BLG.08.07.CFM.01 Pendampingan dan Asistensi



**BLG.08.08.CFM.01 Administrasi Tata Pemerintahan**



## PETA RELASI BLG-08 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Setda
- 2) Inspektorat
- 3) Bappedalitbang
- 4) BKPSDM
- 5) BPKPAD
- 6) Diskominfo
- 7) UPPBJ

### 02. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan

- 1) Inspektorat
- 2) Bag. Hukum Setda
- 3) Oriks
- 4) APH

### 03. Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah

- 1) Bappedalitbang
- 2) DPRD
- 3) Pemerintah Kecamatan
- 4) Bag. Hukum Setda
- 5) BPS
- 6) Diskominfo
- 7) SKPD

### 04. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Bappedalitbang
- 2) Disdukcapil
- 3) Dinsos, PPPA serta Pemdes
- 4) BPBD
- 5) Disperpusip
- 6) Dispotapar
- 7) Disdikbud
- 8) DinkesPPKB
- 9) BPKPAD
- 10) Setda
- 11) Setwan DPRD
- 12) Satpol PP
- 13) BKPSDM
- 14) Inspektorat
- 15) Bakesbangpol
- 16) Kecamatan
- 17) Bag. Organisasi Setda
- 18) Dis LH dan Pertanian
- 19) DKPPP
- 20) Dinas Koperasi, UMK Perindustrian & Perdagangan

### 05. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) BPKPAD
- 2) TAPD
- 3) DPRD
- 4) SKPD
- 5) Bag. Hukum Setda
- 6) 31 OPD
- 7) Inspektorat
- 8) pemerintahan Desa
- 9) Satpol PP
- 10) DinkesPPKB
- 11) RSUD
- 12) BPBD

### 06. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 1) BPKPAD
- 2) Kecamatan/Kelurahan/Desa
- 3) Setda
- 4) BPN

### 07. Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- 1) BPKPAD
- 2) SKPD

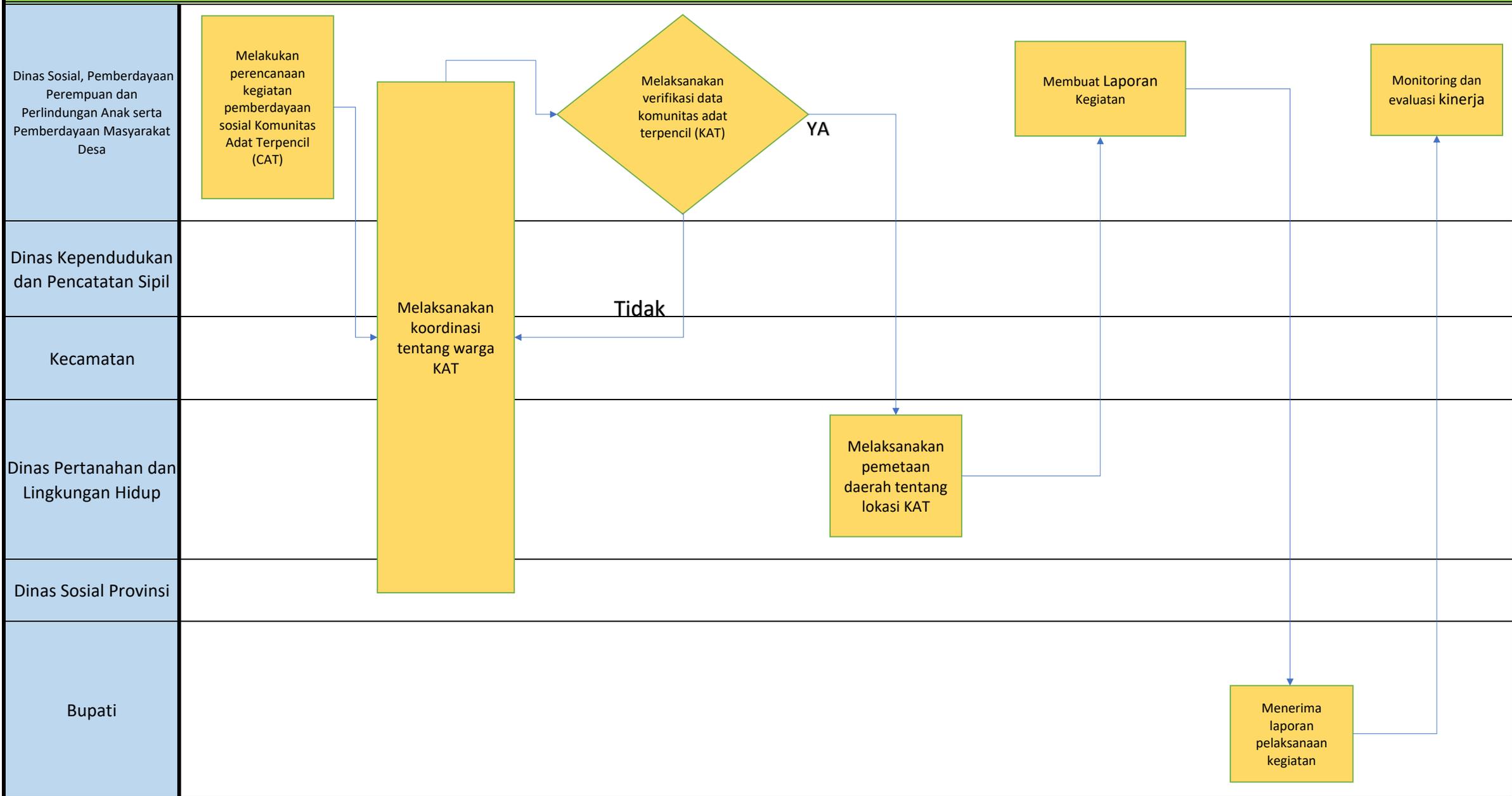
### 08. Peningkatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Setda
- 2) SKPD Terkait
- 3) Inspektorat
- 4) DPRD

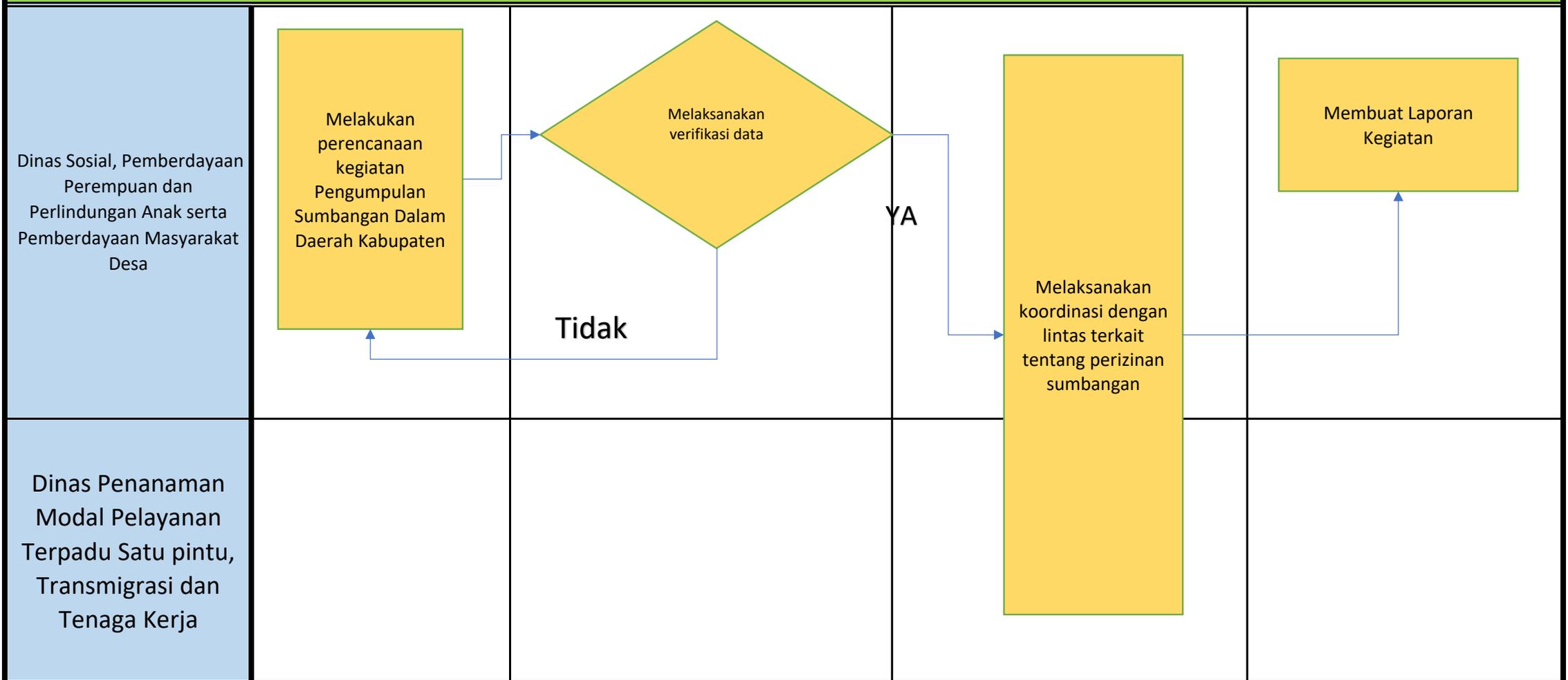
# PETA SUB PROSES



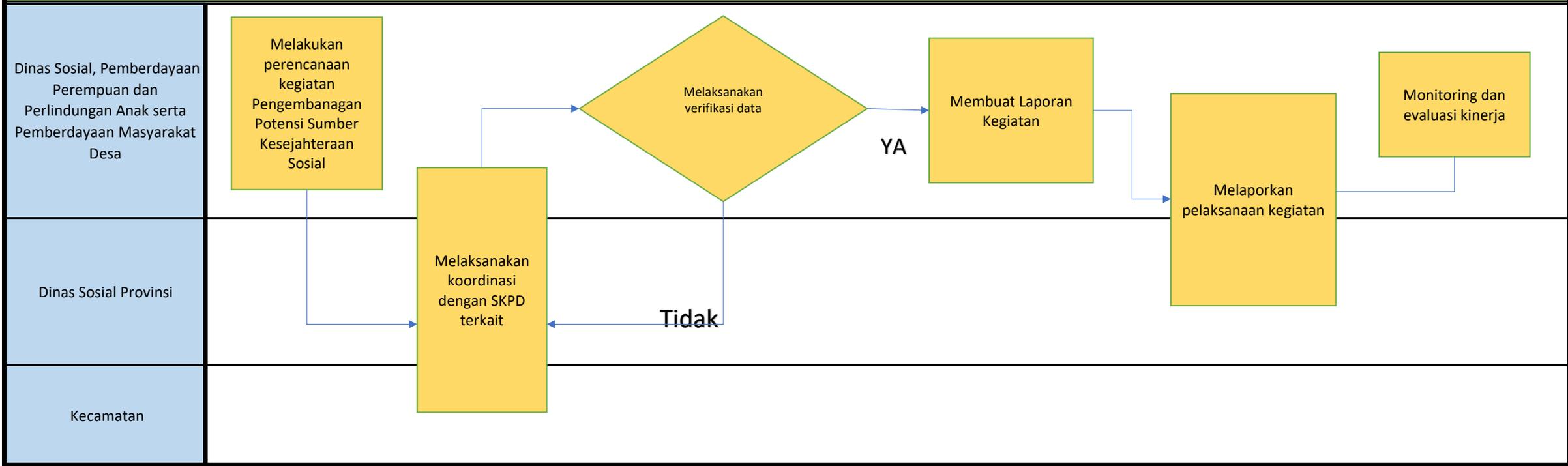
**BLG.09.01.CFM.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**



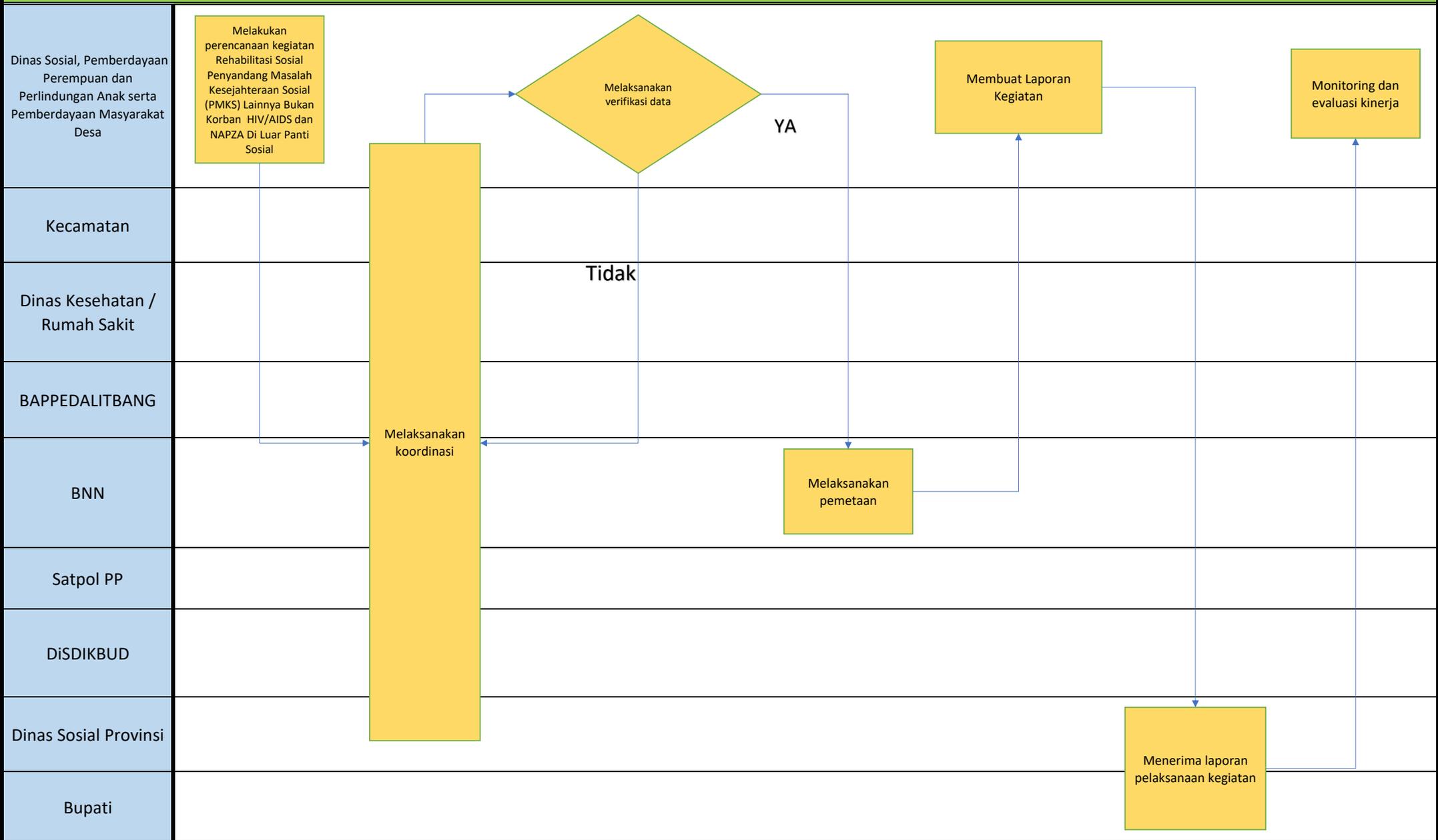
**BLG.09.01.CFM.02 Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**



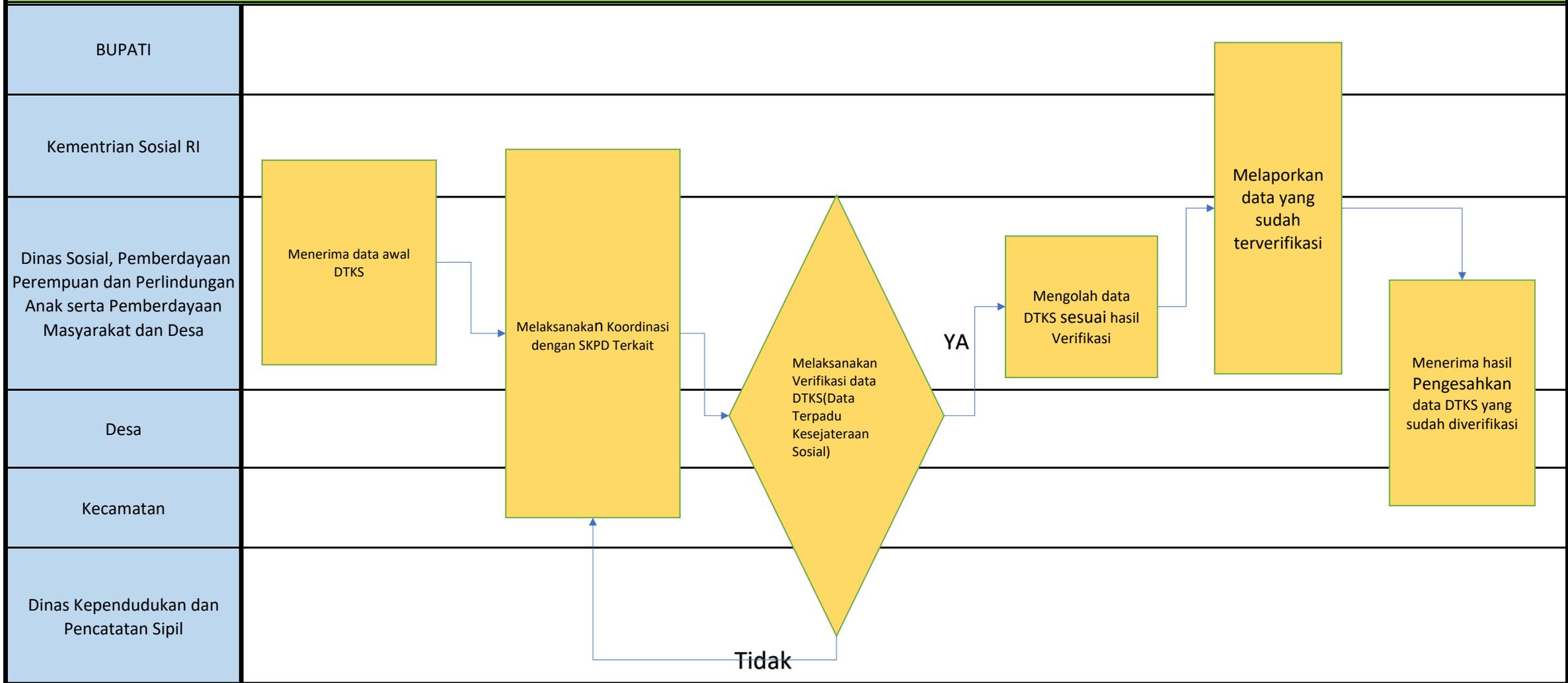
**BLG.09.01.CFM.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Kota**



**BLG.09.02.CFM.01 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial**



**BLG.09.03.CFM.01 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**



## PETA RELASI BLG-09 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Pemberdayaan Sosial

- 1) Dinsos, PPPA Setda PMD
- 2) Disdukcapil
- 3) Kecamatan
- 4) Dinas LH & Pertanahan
- 5) DPMPTSP

### 02. Peningkatan Rehabilitasi Sosial

- 1) Dinsos, PPPA Setda PMD
- 2) Kecamatan
- 3) DinkesPPKB
- 4) RSUD
- 5) Bappedalitbang
- 6) BNN
- 7) Satpol PP

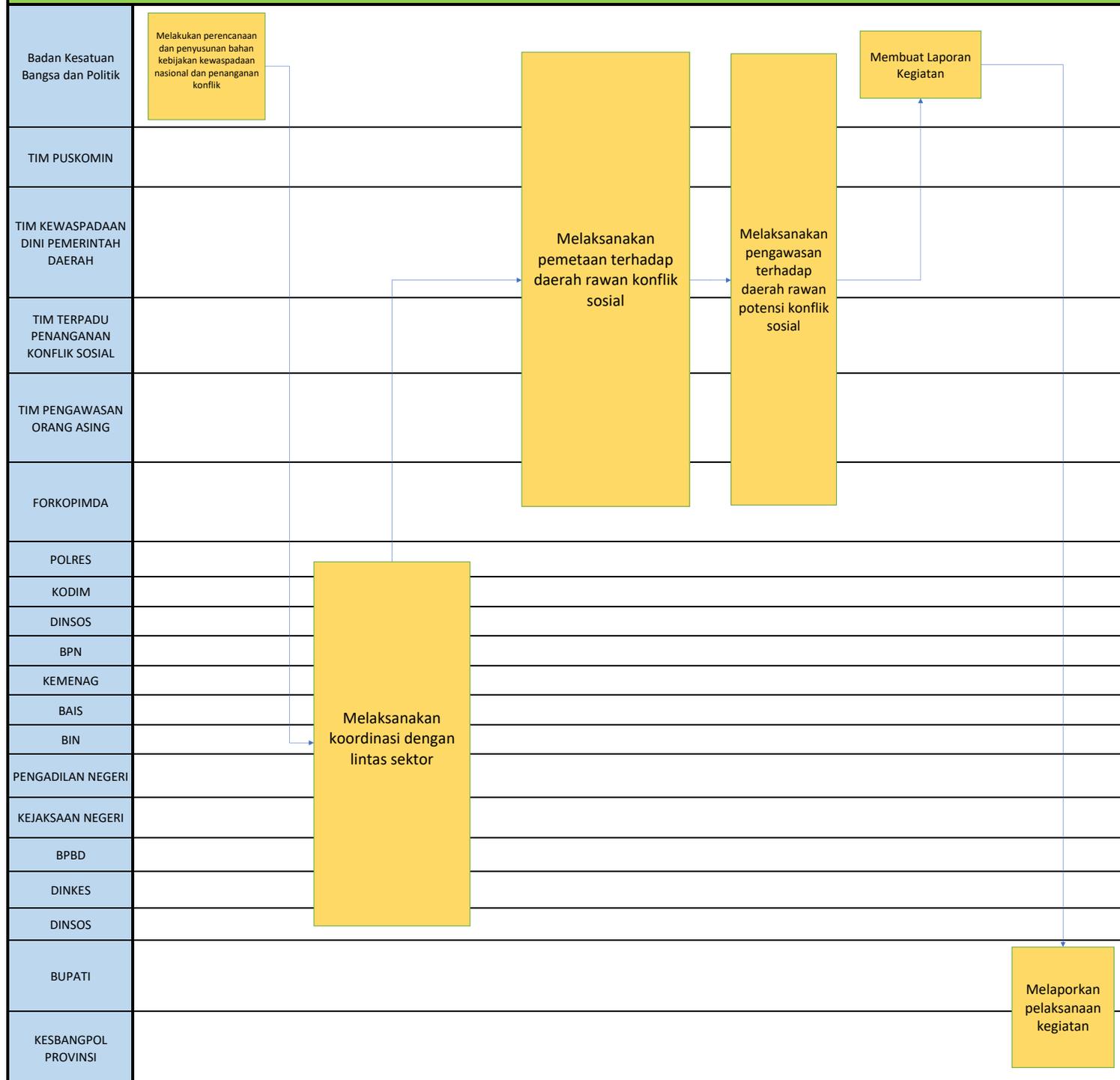
### 03. Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Dinsos, PPPA Setda PMD
- 2) Kecamatan/Desa
- 3) Disdukcapil

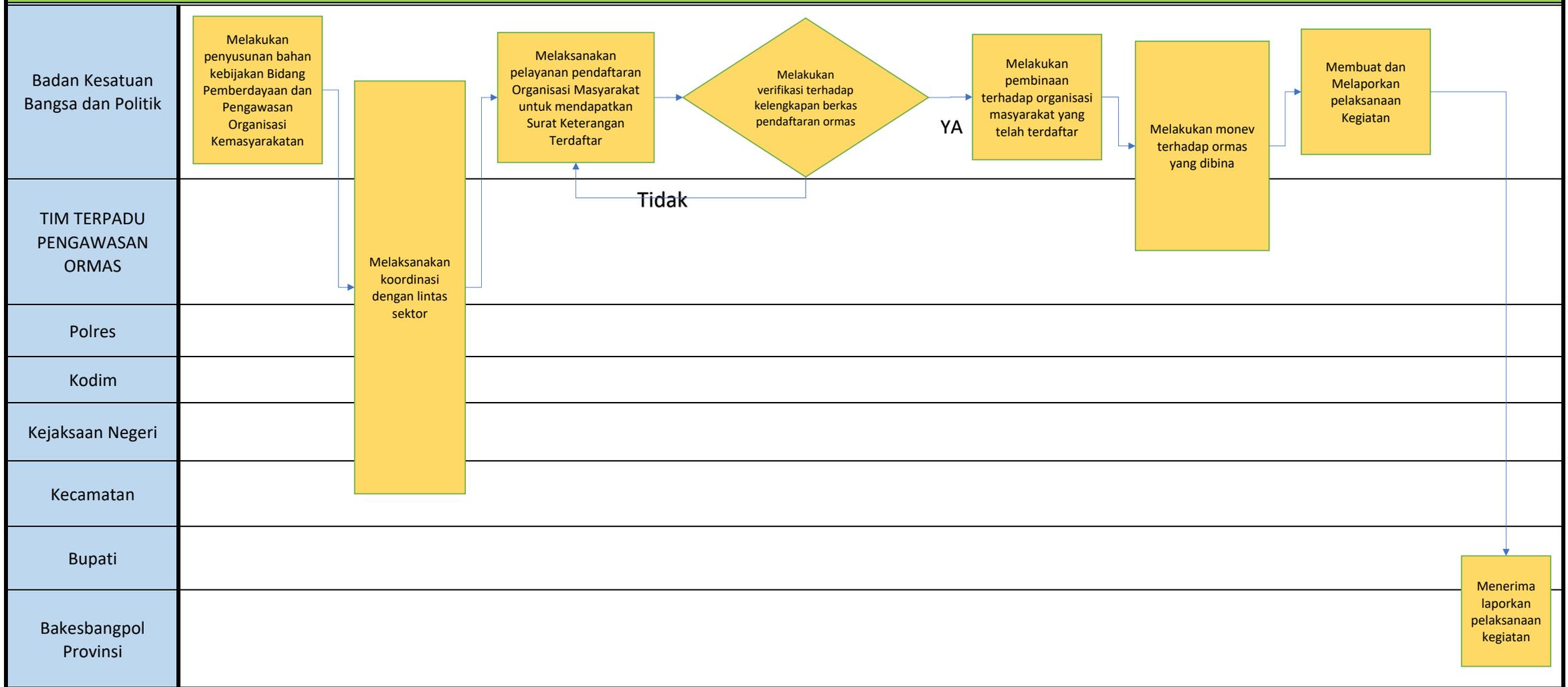
# PETA SUB PROSES



**BLG.10.01.CFM.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**



**BLG.10.02.CFM.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**



## PETA RELASI BLG-10 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

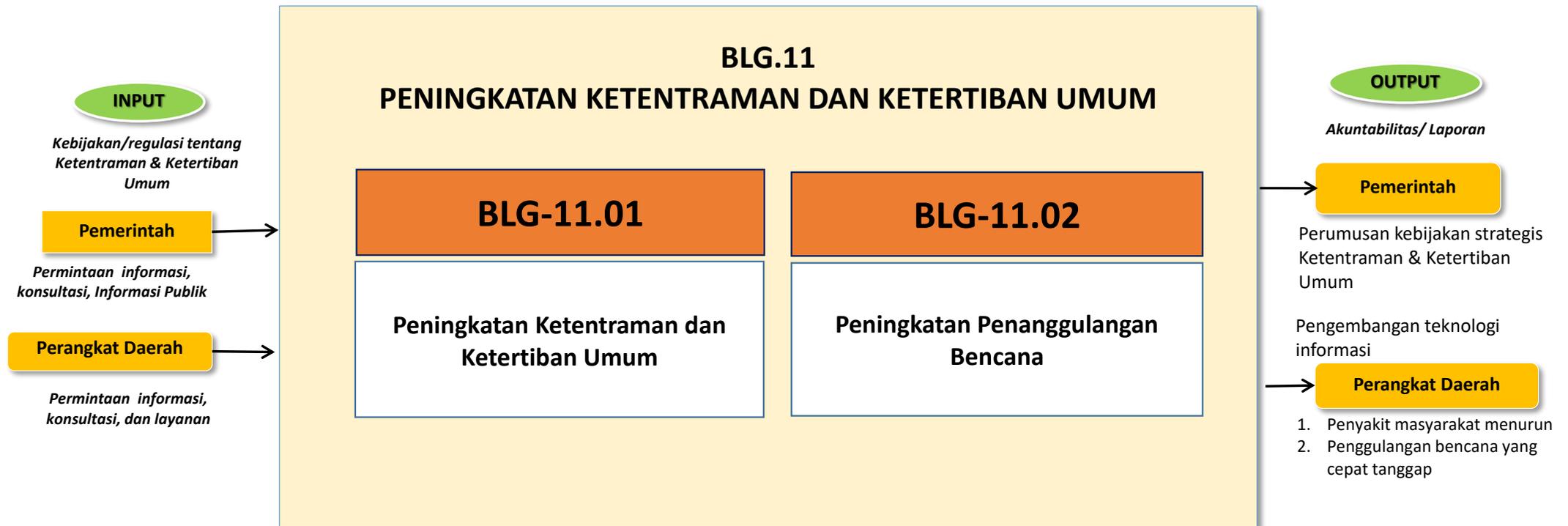
### 01. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

- 1) Bakesbangpol
- 2) Polres
- 3) Kodim
- 4) Dinsos, PPPA serta PMD
- 5) BPN
- 6) Kemenag
- 7) BAIS
- 8) BIN
- 9) Pengadilan Negeri
- 10) Kejaksaan Negeri
- 11) BPBD
- 12) DinkesPPKB

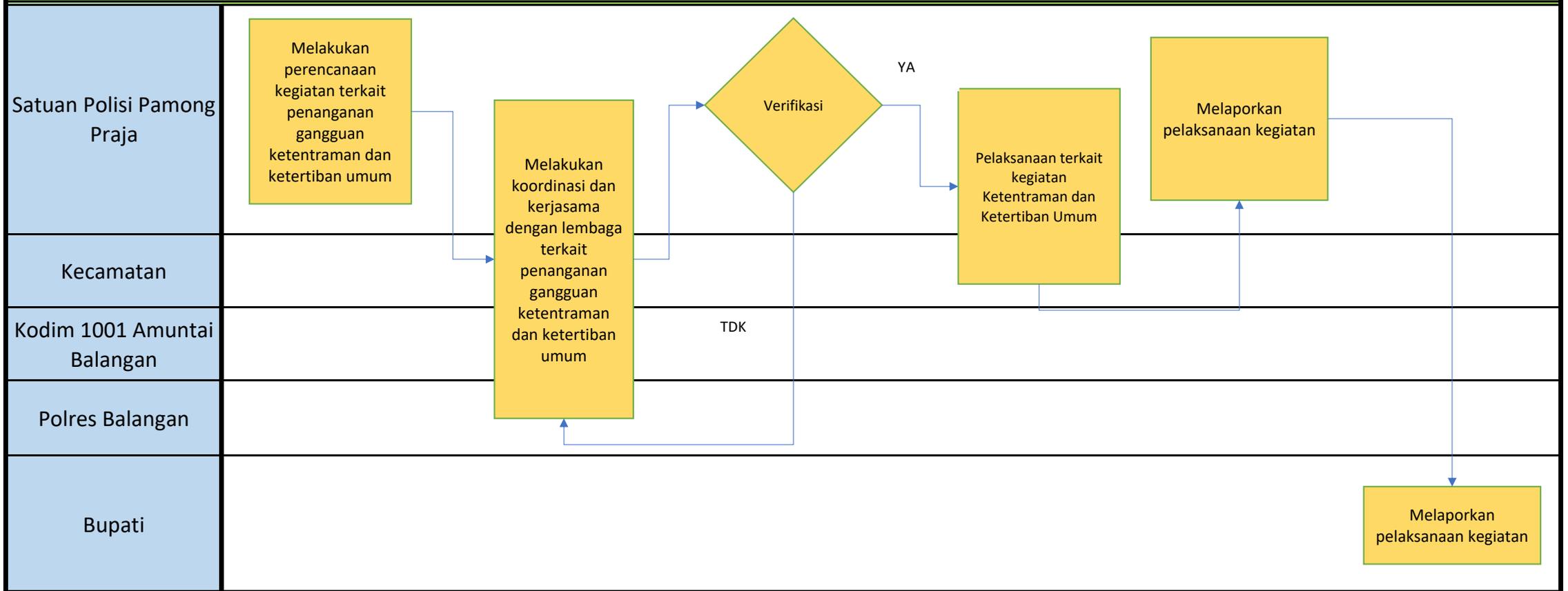
### 02. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

- 1) Polres
- 2) Kodim
- 3) Kejaksaan Negeri
- 4) Kecamatan

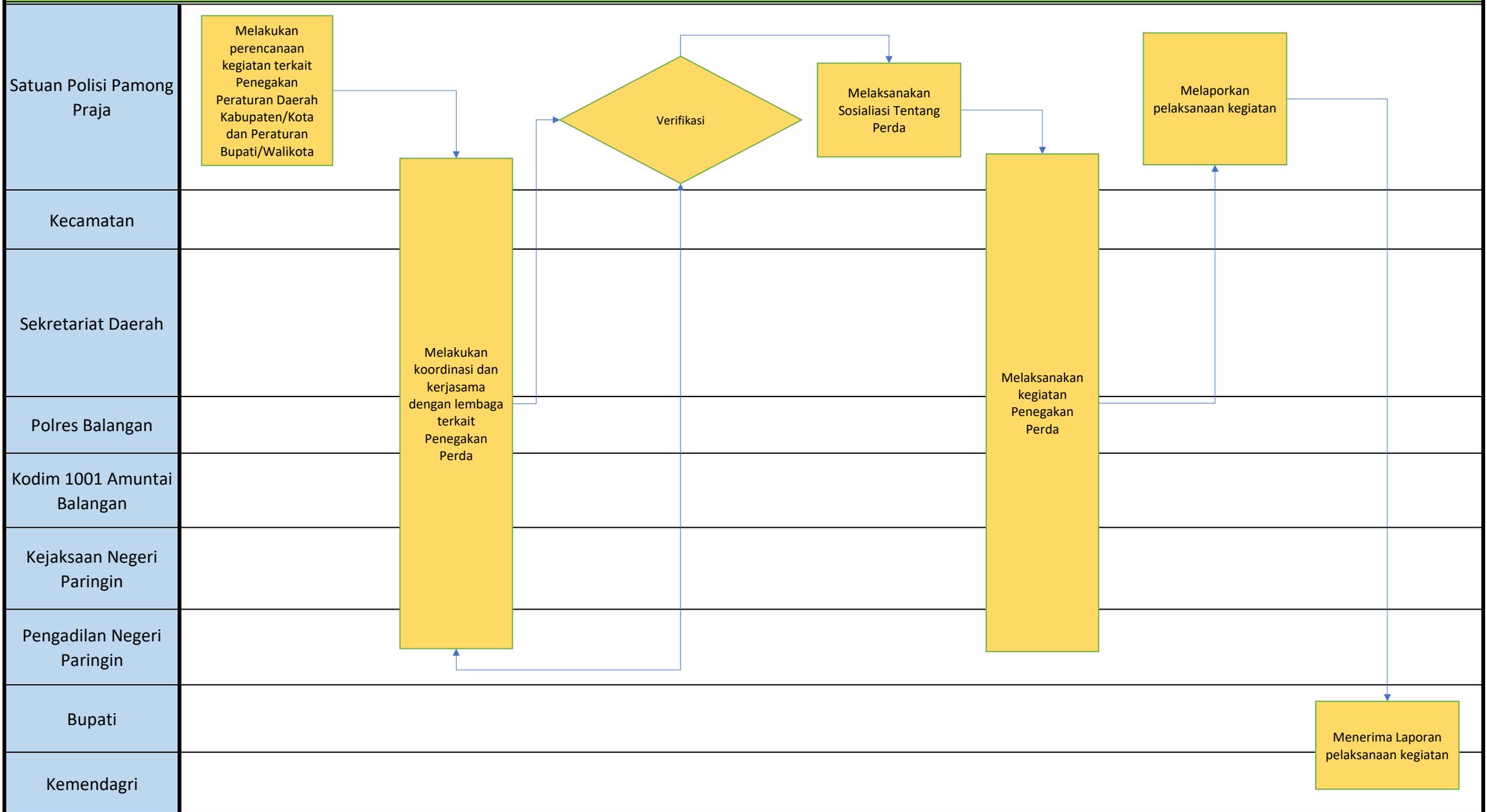
# PETA SUB PROSES



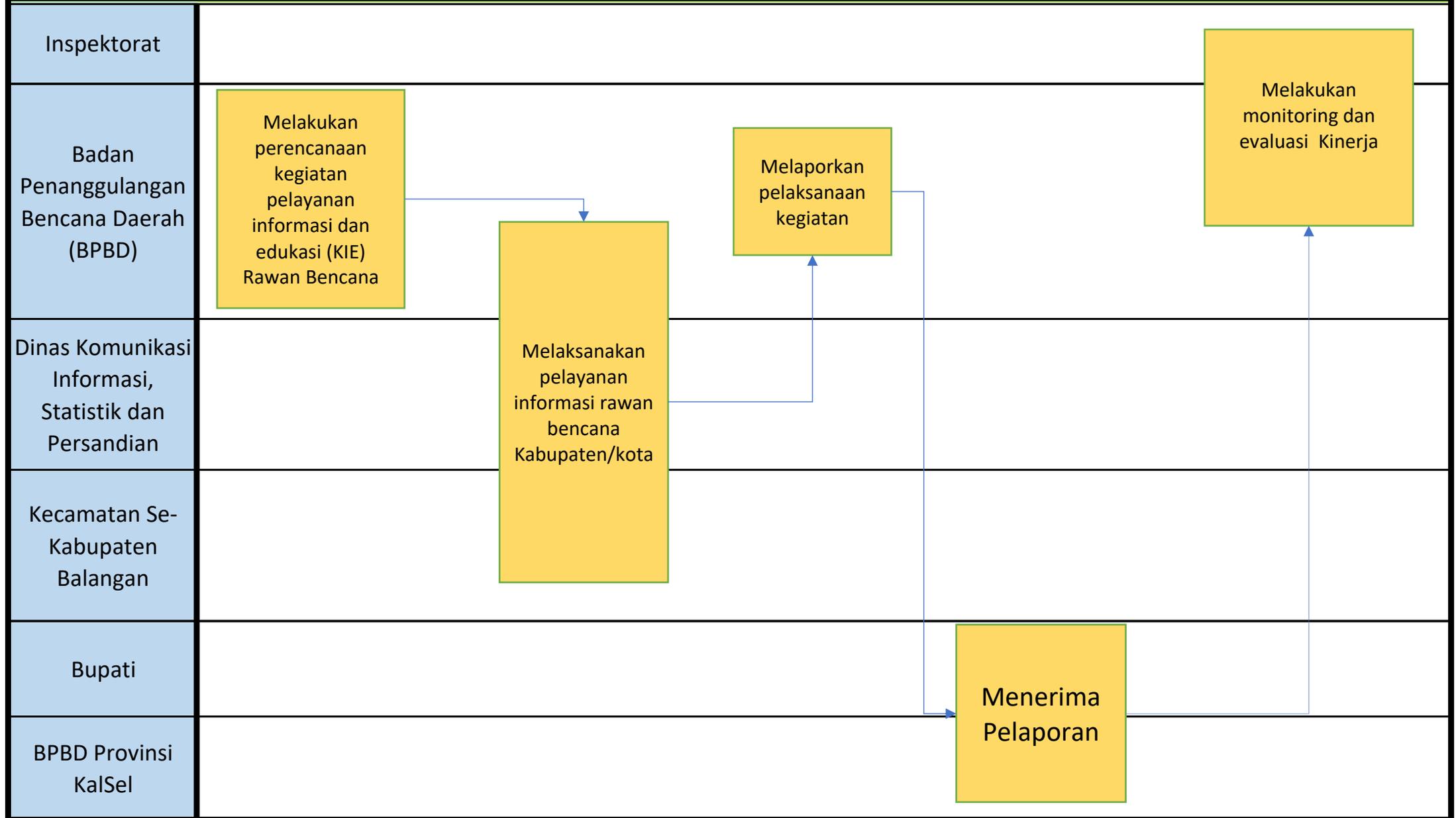
**BLG.011.01.CFM.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**



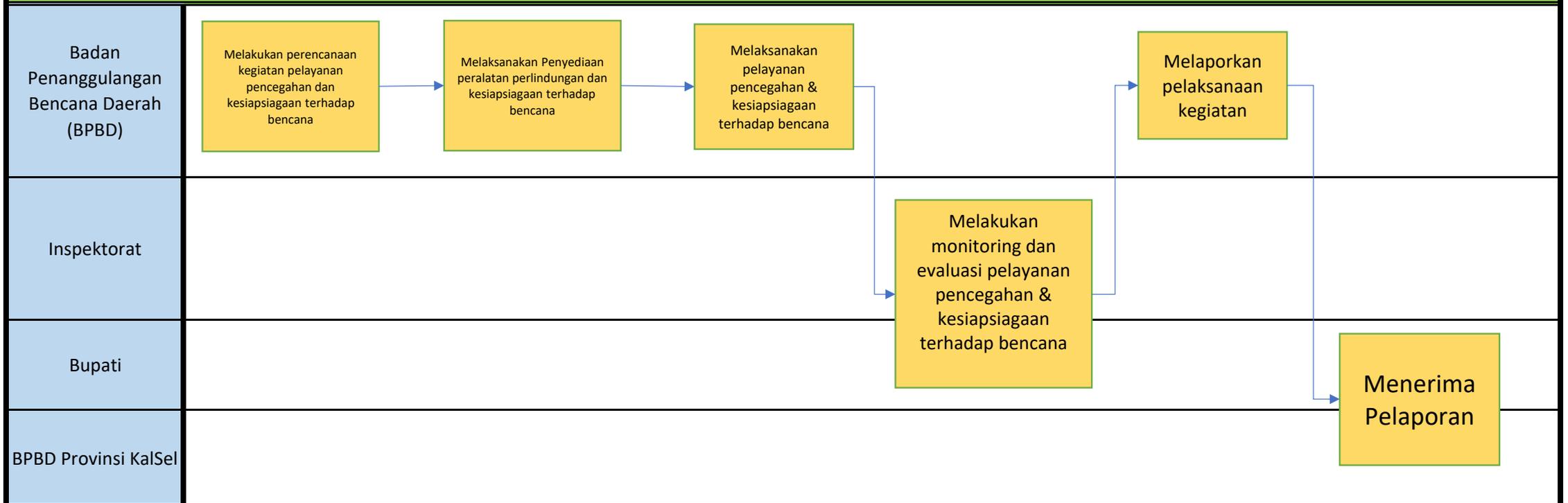
**BLG.011.01.CFM.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**



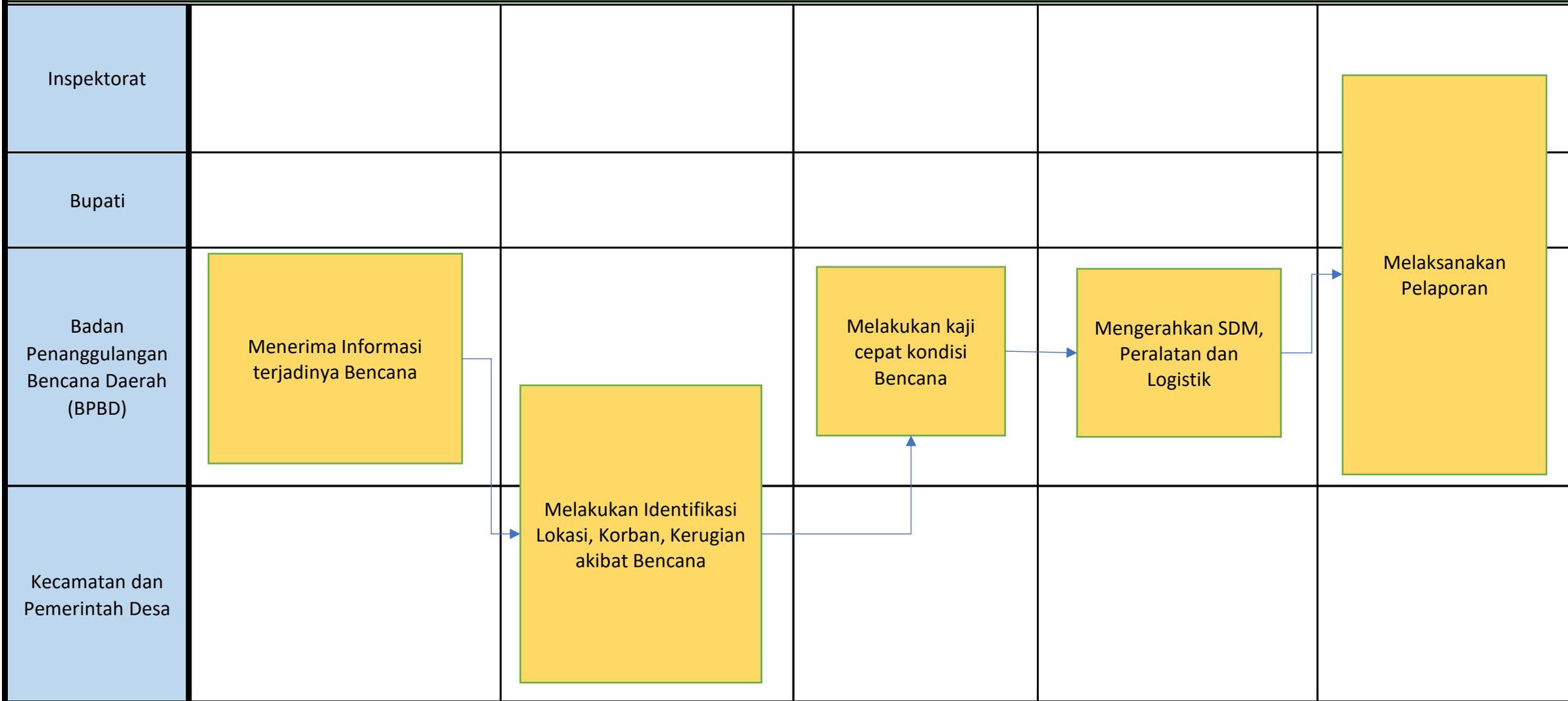
## BLG.11.02 CFM.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota



## BLG.11.02 CFM.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana



## BLG.11.02 CFM.02 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana



## PETA RELASI BLG-011 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) SatpolPP
- 2) Polres
- 3) Kodim
- 4) Kejaksaan Negeri
- 5) Kecamatan
- 6) Setda

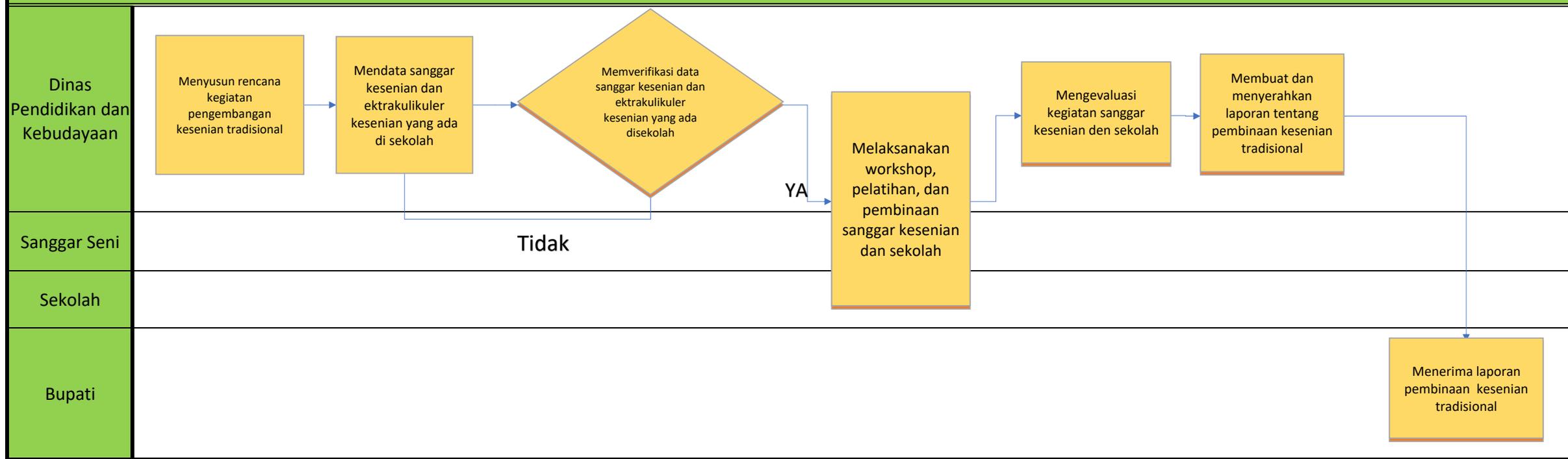
### 02. Peningkatan Penanggulangan Bencana

- 1) BPBD
- 2) Diskominfosan
- 3) Kecamatan
- 4) Inspektorat

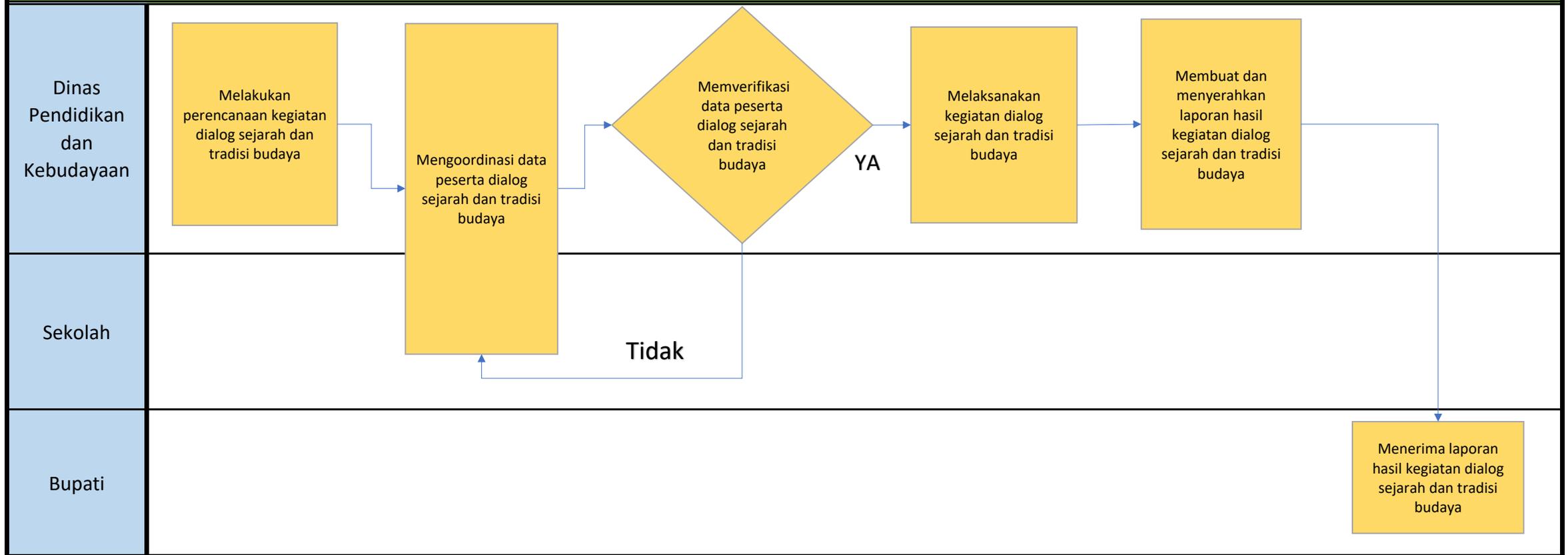
# PETA SUB PROSES



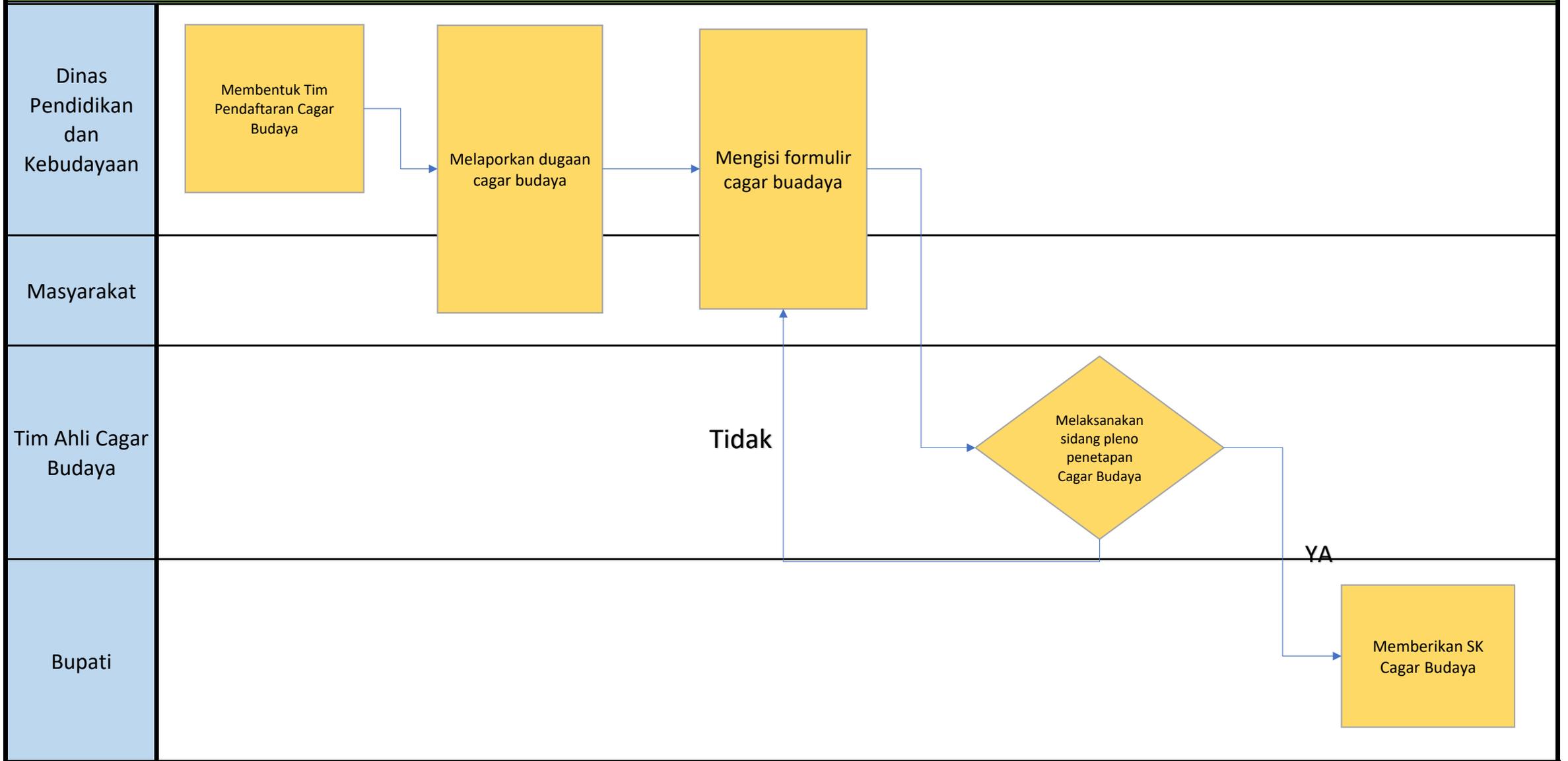
**BLG.012.01.CFM.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kesenian Tradisional**



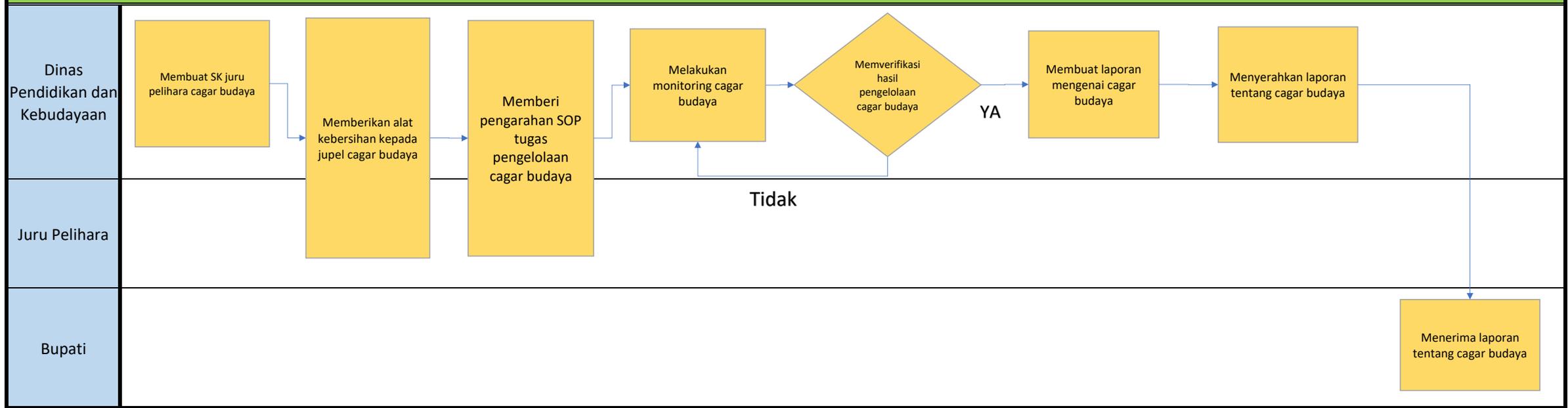
**BLG.012.02.CFM.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kesenian Tradisional**



BLG.12.03.CFM.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota



**BLG.012.03.CFM.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**



## PETA RELASI BLG-12 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Pengembangan

- 1) Disdikbud
- 2) Sanggar Seni
- 3) Sekolah

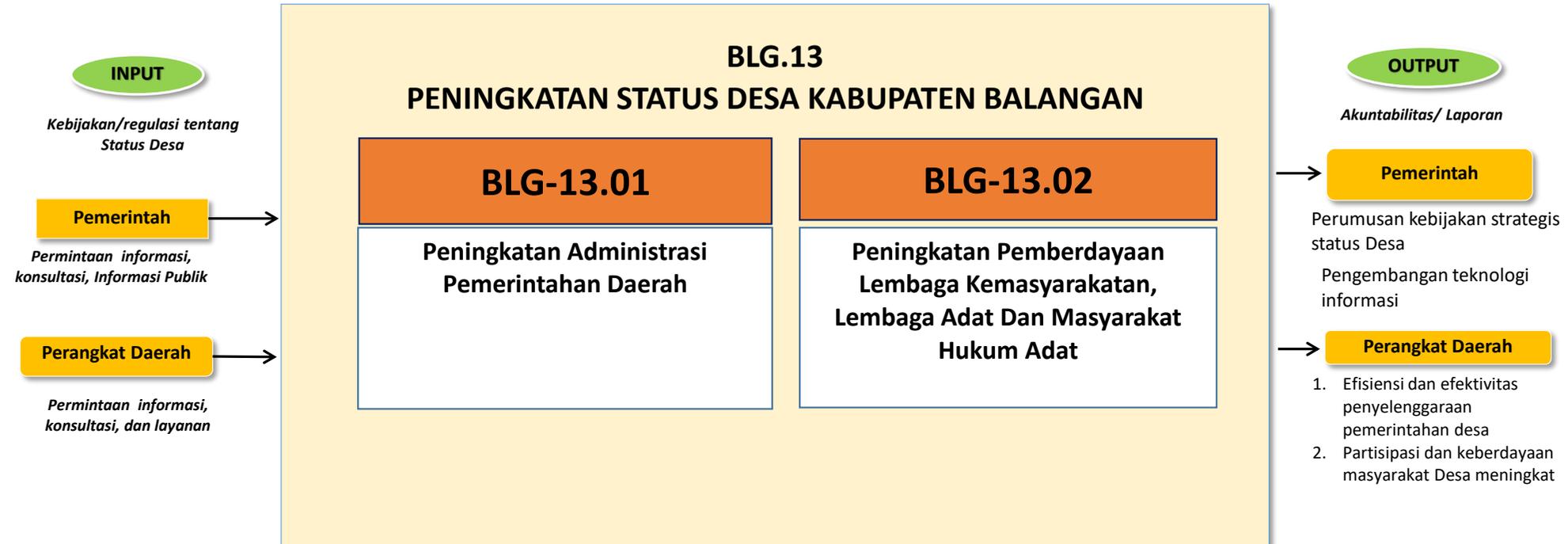
### 02. Peningkatan Pembinaan Sejarah

- 1) Disdikbud
- 2) Sekolah

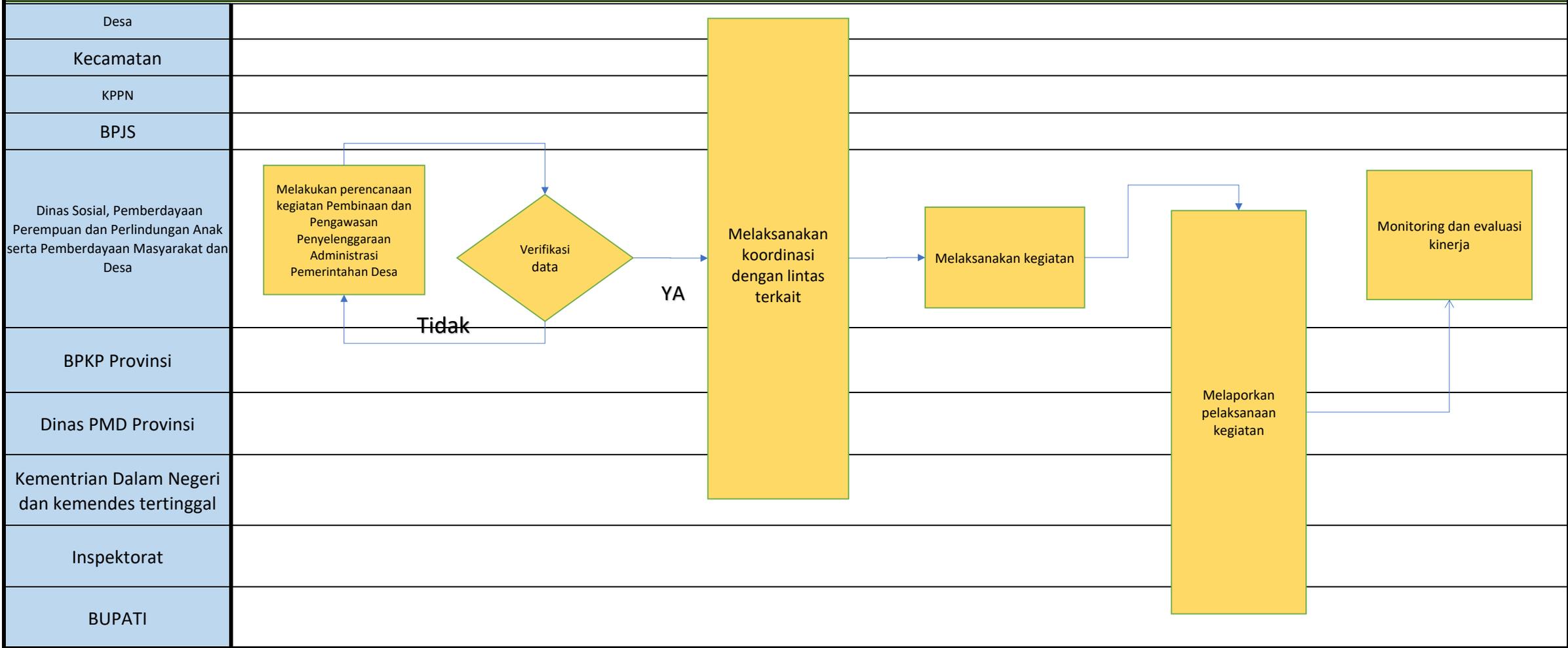
### 03. Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

- 1) Disdikbud
- 2) Tim Ahli Cagar Budaya

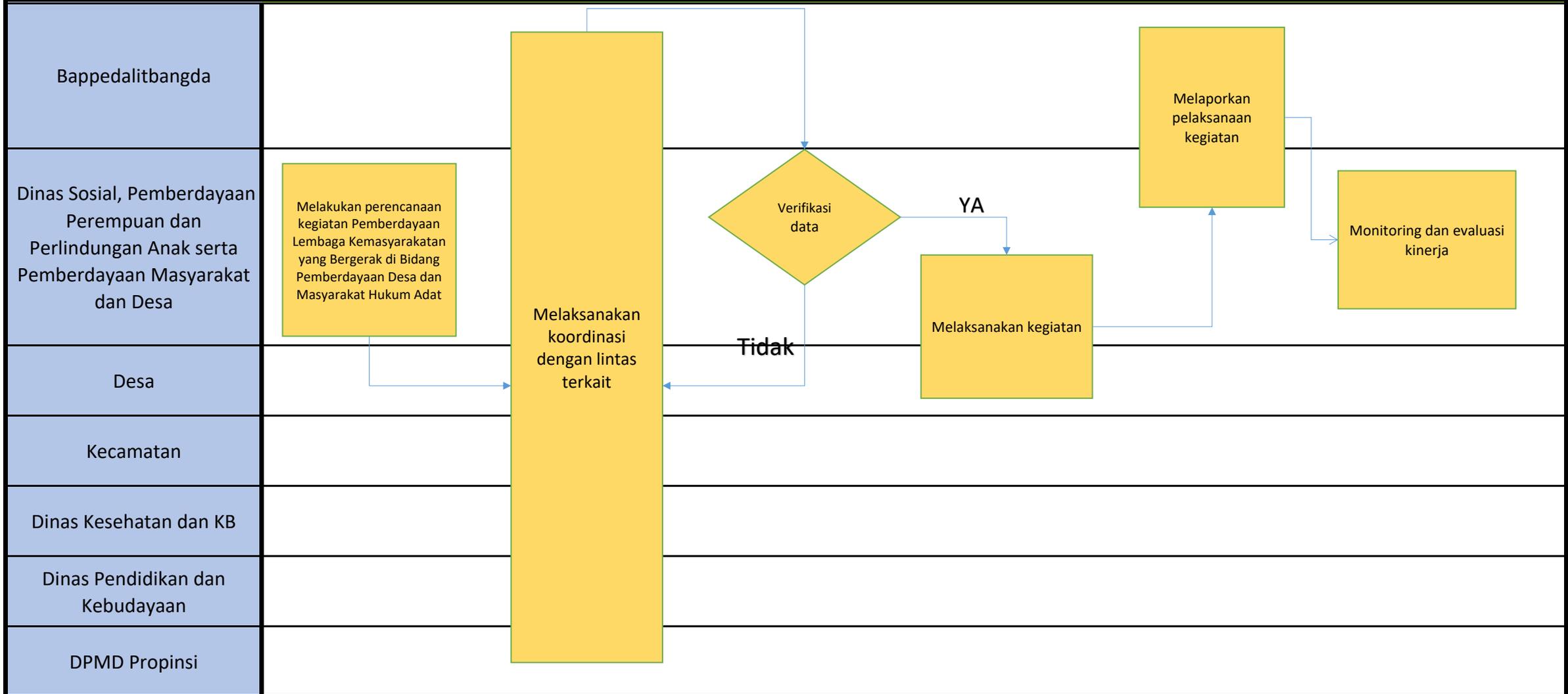
# PETA SUB PROSES



**BLG.13.01.CFM.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**



**BLG.013.02.CFM.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Hukum Adat**



## PETA RELASI BLG-13 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

### 01. Peningkatan Administrasi Pemerintahan Daerah

- 1) Dinsos, PPPA Serta PMD
- 2) Kecamatan/ Desa
- 3) KPPN
- 4) BPJS
- 5) Inspektorat

### 02. Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat

- 1) Dinsos, PPPA Serta PMD
- 2) Kecamatan/ Desa
- 3) DinkesPPKB
- 4) Bappedalitbang
- 5) Disdikbud



H. ABDUL HADI